



HAK ANAK DI MATA MEDIA

**KOMPILASI KARYA JURNALISTIK TERBAIK
TENTANG ANAK**



HAK ANAK DI MATA MEDIA

KOMPILASI KARYA JURNALISTIK TERBAIK
TENTANG ANAK

HAK ANAK DI MATA MEDIA

KOMPILASI KARYA JURNALISTIK TERBAIK TENTANG ANAK

Penulis:

Kategori Cetak/ Online

Adi Renaldi - VICE Indonesia; Aditya Widya Putri - Tirto.id; Fabio Maria Lopes Costa - Harian Kompas; Ayu Prawitasari - Harian Solopos; Frans Labi Kobun - Koran Jubi; Fadiyah - Tirto.id; Erick Tanjung - Suara.com; Madina Nusrat, Ryan Rinaldy dan Satrio Wisanggeni - Harian Kompas; Elviza Diana - Mongabay.co.id; Risna Halidi - Suara.com; Alexander - rrmolbengkulu.com

Kategori Foto

Ignas Kunda - Media Indonesia; Abriansyah Liberto - Tribun Sumsel; Masyudi Firmansyah - Bisnis Sulawesi; Wisnu Widiatoro - Harian Kompas; Hengky Ola Sura - The Jakarta Post; Iggyo El Fitra (Fitra Yogi) - Antara Foto; Chaideer Mahyuddin - Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta; Theo Rizky - Tribun Pekanbaru; Agung Parameswara - The Jakarta Post; Riski Cahyadi - Tribun Medan

Kategori TV

Nima Grafina Sirait - Kompas TV; Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Sri - CNN Indonesia TV; Kintan Wida Bastari - DAAI TV; Miftah Faridl dan Priyuda Anangga Dipa - CNN Indonesia TV; Fitriana Ambarwati - DAAI TV; Andreas Wicaksono dan Ranga Umara - CNN Indonesia TV; Latifah Zaid Nahdi dan Pandu Prakoso - Narasi TV; Oki Budhi Priambodo - BBC News Indonesia; Dwiki Marta Muharam dan Ayomi Amindoni - BBC News Indonesia; Yogi Tujuliarto - CNN Indonesia TV; Muhammad Sridipo, Defry Novaldi, Wahyu Santiko - Jawapos TV

Kategori Radio

Ardi - RRI Merauke; Achmad Aulia - Smart FM Palembang; Tim KBR - KBR Petrus Riski - VOA Indonesia; Imam Komarudin - RRI Boven Digoel; Nurul Mahfud - RRI Batam; Ustad Mukorobin - RRI Purwokerto; Eko Susanto - I Radio FM Jakarta; Anik Hasanah - RRI Surabaya; Elvidayanty dan Khairil Anwar - KBR

Editor: Endah Lismartini

Desain dan Tata Letak: Krisna Sahwono

Cetakan Pertama: Juli 2020

Penerbit:



ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

Jalan Sigura-Gura No 6a, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan

Tel. +62 21 2207 9779 Fax. +62 21 2207 9779

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id, Web: www.aji.or.id

Didukung oleh:



DAFTAR ISI

Kata pengantar AJI Indonesia	8
Kata pengantar UNICEF Indonesia	11

Kategori Cetak/ Online

Juri Kategori Cetak/Online	15
Nominasi:	
1. Menyambangi Sunatan Massal Perempuan Terbesar di Indonesia	19
Penulis: Adi Renaldi - <i>VICE Indonesia</i>	
2. a. Perawatan Paliatif Menyambut Kematian Anak Pejuang Kanker	31
b. Pembebas Nyeri Kanker Itu Bernama Morfin	37
Penulis: Aditya Widya Putri - <i>Tirto.id</i>	
3. a. Bencana Kesehatan di Asmat	44
b. Bencana Kesehatan di Asmat: Tangisan Terakhir untuk Theresia Bewer	48
Penulis: Fabio Maria Lopes Costa - <i>Harian Kompas</i>	
4. a. Cerita tentang Toilet di Sekolah: Siswa Ngompol hingga Tak Ganti Pembalut	52
b. Fasilitas Terpenuhi, Kenapa Masih Kotor?	56
Penulis: Ayu Prawitasari - <i>Harian Solopos</i>	
5. a. Imunisasi MR yang Gagal Capai Target Berdampak ke Anak dengan HIV	61
b. Kisah Ibu & Anak dengan HIV: Dijauhi Keluarga, Dirundung di Sekolah	65
c. Menyibak Sebab Tingginya Penularan HIV pada Ibu Rumah Tangga	69
d. Jalan Panjang & Dilematis Ungkap Status HIV Positif kepada Anak	75
Penulis: Fadiyah - <i>Tirto.id</i>	
6. a. Merehabilitasi Anak-Anak Aibon Di Merauke (1)	81
b. Merehabilitasi Anak-Anak Aibon Di Merauke (2)	85
Penulis: Frans Labi Kobun - <i>Koran Jubi</i>	

7.	Terancam Hukuman Mati, Kejanggalkan Peradilan Bagi Mispo Si Anak Papua	91
	Penulis: Erick Tanjung - <i>Suara.com</i>	
8.	a. Anak-Anak Indonesia Diperdagangkan	104
	b. Kalau Begini Terus Pasti Mati	108
	Penulis: Madina Nusrat, Ryan Rinaldy dan Satrio Wisanggeni - <i>Harian Kompas</i>	
9.	Kala Anak-anak Orang Rimba Rentan Terserang Penyakit	113
	Penulis: Elviza Diana - <i>Mongabay.co.id</i>	
10.	Anak Berhadapan Hukum, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia	122
	Penulis: Risna Halidi - <i>Suara.com</i>	
11.	Bidan Penakluk Kerinci Seblat	132
	Penulis: Alexander - <i>RMOLBengkulu.com</i>	

Pemenang terbaik:

Terancam Hukuman Mati, Kejanggalkan Peradilan Bagi Mispo Si Anak Papua

Penulis: Erick Tanjung - *Suara.com*

Special mention:

Bidan Penakluk Kerinci Seblat

Penulis: Alexander - *rmolbengkulu.com*

Kategori Foto

Juri Kategori Foto	142
Nominasi:	
1. Perjuangan Warga Kampung Wololuba Demi Air Keruh	145
Fotografer: Ignas Kunda - <i>Media Indonesia</i>	
2. Udara Bahaya Bagi Anak, Sekolah Diliburkan	147
Fotografer: Abriansyah Liberto - <i>Tribun Sumsel</i>	
3. Harapan	149
Fotografer: Masyudi Firmansyah - <i>Bisnis Sulawesi</i>	
4. Pasien Campak dan Gizi Buruk	151
Fotografer: Wisnu Widianoro - <i>Harian Kompas</i>	
5. Posyandu Bapak	153
Fotografer: Hengky Ola Sura - <i>The Jakarta Post</i>	
6. Pencemaran Pantai Muaro Lasak	155
Fotografer: Iggoy El Fitra (Fitra Yogi) - <i>Antara Foto</i>	
7. Vaksin Sehat	157
Fotografer: Chaideer Mahyuddin - <i>Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta</i>	
8. Pahlawan Super Ikut Meriahkan Pemberian Vaksin MR Perdana di Riau	159
Fotografer: Theo Rizky - <i>Tribun Pekanbaru</i>	
9. Ray of Hope	161
Fotografer: Agung Parameswara - <i>The Jakarta Post</i>	
10. Gunakan Masker Hindari Debu Sinabung	163
Fotografer: Riski Cahyadi - <i>Tribun Medan</i>	

Pemenang terbaik:

Perjuangan Warga Kampung Wololuba Demi Air Keruh

Penulis: Ignas Kunda - *Media Indonesia*

Special mention:

Vaksin Sehat

Fotografer: Chaideer Mahyuddin - *Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta*

Kategori TV

Juri Kategori Cetak/Online	165
Nominasi:	
1. Melawan Difteri, Imunisasi Wajib	170
Penulis: Nima Grafina Sirait - <i>Kompas TV</i>	
2. Berebut Sehat di Ujung Karangasem	173
Penulis: Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Sri - <i>CNN Indonesia TV</i>	
3. Langkah Sunyi Ikamah	176
Penulis: Kintan Wida Bastari - <i>DAAI TV</i>	
4. Anakku Tidak Akan Jadi Teroris	179
Penulis: Miftah Faridl dan Priyuda Anangga Dipa - <i>CNN Indonesia TV</i>	
5. Han Han Bantu Teman	182
Penulis: Fitriana Ambarwati - <i>DAAI TV</i>	
6. Pemberi Harapan Bagi ODHA - Heroes	185
Penulis: Andreas Wicaksono dan Rangga Umara - <i>CNN Indonesia TV</i>	
7. Melawan Bully dengan Ballet	188
Penulis: Latifah Zaid Nahdi dan Pandu Prakoso - <i>Narasi TV</i>	
8. Pernikahan anak di Sulawesi: 'Berikan Ijazah, Jangan Buku Nikah'	191
Penulis: Oki Budhi Priambodo - <i>BBC News Indonesia</i>	
9. Pernikahan Anak di Kamp Pengungsian Palu: 'Saya Masih Ingin Sekolah'	194
Penulis: Dwiki Marta Muharam dan Ayomi Amindoni - <i>BBC News Indonesia</i>	
10. Mimpi Anak-anak di Tanah Kering	197
Penulis: Yogi Tujuliarto - <i>CNN Indonesia TV</i>	
11. Ironi Kontroversi Imunisasi	200
Penulis: Muhammad Sridipo, Defry Novaldi, Wahyu Santiko - <i>Jawapos TV</i>	

Pemenang terbaik:

Anakku Tidak Akan Jadi Teroris

Penulis: Miftah Faridl dan Priyuda Anangga Dipa - *CNN Indonesia TV*

Special mention:

Ironi Kontroversi Imunisasi

Penulis: Muhammad Sridipo, Defry Novaldi, Wahyu Santiko
- *Jawapos TV*

Kategori Foto

Juri Kategori Foto	203
Nominasi:	
1. Rayuan Maut Lem Aibon	207
Penulis: Ardi - <i>RRI Merauke</i>	
2. Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Dengan HIV Aids	210
Penulis: Achmad Aulia - <i>Smart FM Palembang</i>	
3. Hidup Usai Teror (Episode 1-8)	214
a. Racun Radikalisme	
b. Sebatang Kara	
c. Dari Medan Perang	
d. Pulang	
e. Luka	
f. Penantian	
g. Yang Menimang Rindu	
h. Para Pendamping	
Penulis: Tim KBR - <i>KBR</i>	
4. Mengubah Tradisi Kawin Anak di Lombok	217
Penulis: Petrus Riski - <i>VOA Indonesia</i>	
5. Jangan Biarkan Aku Stunting	222
Penulis: Imam Komarudin - <i>RRI Boven Digoel</i>	
6. Penyangga Gizi Anak Pulau	228
Penulis: Nurul Mahfud - <i>RRI Batam</i>	
7. Jaga Posyandu, Tekan Stunting	231
Penulis: Ustad Mukorobin - <i>RRI Purwokerto</i>	
8. Imunisasi Measles Rubella, Upaya Melindungi Generasi Bangsa	234
Penulis: Eko Susanto - <i>1 Radio FM Jakarta</i>	
9. Derita Meilani, Lawan Gizi Buruk	237
Penulis: Anik Hasanah - <i>RRI Surabaya</i>	
10. Posyandu Untuk Masa Depan Anak Rimba	240
Penulis: Elvidayanty dan Khairil Anwar - <i>KBR</i>	

Pemenang terbaik:

Hidup Usai Teror (Episode 1-8)

a. Racun Radikalisme

b. Sebatang Kara

c. Dari Medan Perang

d. Pulang

e. Luka

f. Penantian

g. Yang Menimang Rindu

h. Para Pendamping

Penulis: Tim KBR - *KBR*

Special mention:

Imunisasi Measles Rubella,

Upaya Melindungi

Generasi Bangsa

Penulis: Eko Susanto -

1 Radio FM Jakarta

Kata pengantar AJI Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama cukup lama dengan United Nations International Children's Fund (UNICEF), badan dunia yang memiliki mandat untuk menangani isu anak. Bagi AJI, ini kerjasama penting karena tema soal anak merupakan topik yang hampir tiap hari muncul di media. Sehingga ada kebutuhan bagi AJI untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan, dan memperbaiki perspektif jurnalis dalam menulis berita soal topik ini.

Anak merupakan salah satu kelompok rentan dan karena itu Kode Etik Jurnalistik (KEJ) memberi perhatian besar soal itu. Setidaknya ada satu pasal dalam Kode Etik yang eksplisit mengatur soal anak: pasal 5. Pasal itu memuat ketentuan soal tidak boleh dibukanya identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk korban kejahatan susila. Meski soal identitas anak ini sudah diatur dalam Kode Etik, masih saja ada wartawan yang tidak menyamarkan identitasnya.

Selain soal perlindungan terhadap identitas anak yang melakukan tindak pidana, kritik juga terhadap media adalah pada kurangnya memberi perhatian terhadap topik pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar anak. Hak anak itu luas, mulai dari hak untuk dilindungi kesehatannya, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk terlindung dari kekerasan dan sebagainya.

Sejumlah kritik itulah yang mendorong AJI bekerjasama dengan

lembaga yang punya kepedulian soal anak, termasuk UNICEF. Melalui kerjasama ini, dengan berbagai bentuk kegiatan, diharapkan dapat menjawab sejumlah kritik terhadap jurnalis dan media dalam berhubungan dengan topik anak. Melalui kegiatan workshop diharapkan ada peningkatan pengetahuan, bertambahnya keterampilan, dan membaiknya sudut pandang dalam liputan tentang anak.

Selain ada kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kerjasama yang dilakukan AJI juga diharapkan bisa membuat tema anak menjadi perhatian publik dan jadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Salah satu upaya untuk itulah AJI dan UNICEF menggelar kompetisi jurnalistik. Tahun ini, yang durasi penerimaan karyanya mulai Desember 2019 - 29 Februari 2020, ada 413 karya yang masuk untuk empat kategori: cetak/online, foto, radio dan TV.

Setelah melalui proses penilaian, ada empat yang ditetapkan sebagai pemenang, yang hasilnya diumumkan 29 April 2020 lalu. Pemenangnya masing-masing: Erick Tanjung (Suara.com), melalui liputan berjudul "Terancam Hukuman Mati, Kejanggalan Peradilan Bagi Mispo Si Anak Papua untuk kategori cetak/online; Tim KBR, dengan judul karya "Hidup Usai Teror Episode 1-8" untuk kategori radio; Miftah Farid dan Priyuda Anangga D (CNN Indonesia TV), melalui judul karya "Anakku Tidak akan Jadi Teroris" untuk kategori TV; foto Ignas Kunda (Media Indonesia), dengan judul karya "Perjuangan Warga Kampung Wololuba Demi Air Keruh", untuk kategori foto.

Erick Tanjung dalam karyanya menulis kisah Mispo Gwijangge, anak Papua yang diadili di Jakarta Pusat atas tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di area proyek Jalan Trans. Ignas Kunda menang untuk foto perjuangan warga Kampung Wololuba untuk mendapatkan air. Miftah Farid dan Tim KBR mengangkat tema soal dampak terorisme terhadap anak-anak.

AJI berharap kompetisi ini bisa mendorong jurnalis untuk memiliki kepedulian lebih besar soal tema anak. Dan karya yang

menang kompetisi ini, yang dibukukan dan kini di tangan Anda ini, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi jurnalis lain untuk membuat liputan serupa atau mengangkat topik-topik menarik lain soal anak.

Selamat membaca!

Abdul Manan

Ketua Umum AJI Indonesia

Kata pengantar UNICEF Indonesia

“Ada yang berubah, ada yang bertahan. Karena zaman tak bisa dilawan. Yang pasti kepercayaan harus diperjuangkan.”

Seuntai kalimat dari Chairil Anwar yang selalu terlintas di benak saat berpikir tentang perubahan, sebuah proses yang terus terjadi sejak semesta tercipta. Terkadang, perubahan sulit dilawan, beberapa bahkan tidak mungkin. Kita bisa menyesuaikan diri agar tetap bisa bertahan dan juga berkembang seiring perubahan zaman. Media massa termasuk industri yang dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang mempengaruhi cara publik mendapatkan dan mengonsumsi informasi. Selama beberapa tahun mengelola dan menjadi anggota panel juri Media Awards AJI-UNICEF, berdasarkan karya-karya yang kami nilai, kami melihat ada peningkatan tetapi ada juga stagnasi dalam sisi kualitas dan keragaman topik pemberitaan mengenai hak-hak anak yang dipilih oleh peserta.

Dari semua kategori, kami melihat peningkatan jumlah karya yang lolos seleksi dan ada beberapa karya dari televisi, radio, cetak dan online yang mengagumkan. Ada sejumlah karya televisi yang luar biasa, dengan memadukan riset luas, peliputan lapangan, hingga eksekusi narasi dan visual yang kuat. Kerja keras tim produksi. Namun tidak sedikit juga karya yang terkesan digarap dengan terburu-buru atau tulisan panjang minim analisis. Sejatinya, mengutip Rosihan Anwar, adalah vital bagi wartawan untuk mengetahui sesuatu secara baik. Menggali ke dalam suatu masalah untuk menemukan rangkaian hubungan dengan bidang-bidang lain karena hubungan-hubungan itulah mungkin yang paling penting bagi wartawan untuk dimengerti.

Catatan kami dari kategori radio sangat menggembirakan mengetahui bahwa pemberitaan informasi dalam bentuk suara

dalam siaran radio juga sama menariknya dengan pemberitaan melalui media televisi yang memiliki kelebihan visual. Banyak karya jurnalis dalam berbagai isu sosial dan kesehatan yang dapat mengetuk hati sekaligus membuka dan menambah pemahaman pendengarnya melalui narasi yang bagus didukung dengan teknik dan latar belakang suara, *theatre of mind*, yang memukau. Karya-karya radio patut diacungi jempol dan harus tetap bisa bersaing di tengah arus perubahan dan bermunculannya berbagai platform informasi baru.

Dari kategori fotografi, foto-foto yang masuk dan sudah disortir oleh panitia memberikan gambaran interpretasi beragam tentang isu kesehatan. Keragaman ini tentunya merupakan hal yang positif, bahwa pemahaman tentang isu kesehatan tidak dilihat sebatas hal-hal rutin yang dianggap bagian dari program utama terkait kesehatan. Beberapa foto mengambil sudah pandang yang tidak biasa untuk mengangkat tema terkait kesehatan. Satu serial foto, karena ada 2 dari wartawan dan dengan tema yang sama, misalnya berfokus pada perempuan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek yang menjadi petugas pengantar makanan tambahan untuk anak yang kurang gizi, alih-alih berfokus pada memotret kondisi fisik si anak. Ini foto favorit kami sebagai karena foto ini mengambil sudut pandang cerita yang tidak biasa tentang masalah gizi dan karena yang disampaikan adalah solusi, tidak sekedar masalah. Foto lain memotret para ayah yang mengurus anak di Posyandu, seakan menyampaikan pesan bahwa urusan kesehatan anak bukan hanya jadi urusan ibu atau urusan perempuan.

Berada pada posisi sebagai juri juga membantu kami memahami kerja editor. Beberapa foto yang bagus secara visual kehilangan nilai tambah karena judul foto atau keterangan yang mendampingi, sayangnya, tidak memberi latar belakang atau bahkan tidak punya nilai berita.

Di sisi lain, observasi terhadap karya-karya peserta Media Awards 2020 ini memperkuat komitmen kami di UNICEF Indonesia untuk melanjutkan dan memantapkan kolaborasi dengan rekan-rekan jurnalis dan membantu meningkatkan kapasitas serta pengetahuan wartawan tentang berbagai aspek terkait anak serta hak-hak mereka dan komitmen etika yang mengikuti kegiatan pemberitaan tentang anak.

Jurnalisme berjalan beriringan dengan kebenaran. Kebenaran

adalah dasar untuk meraih kepercayaan. Dan kembali mengutip Chairil Anwar, kepercayaan harus diperjuangkan. Kami berharap karya-karya terpilih dari Media Awards 2020 dapat menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi penyemangat bagi rekan-rekan wartawan untuk selalu mengangkat topik-topik pemberitaan tentang anak di media dengan menjunjung prinsip dan etika jurnalistik, untuk setiap anak.

Jakarta, Juli 2020

Tim Juri

Ali Aulia Ramly - Fotografi

Kenny Peetosutan - Radio

Kinanti Pinta Karana - Cetak-Online, Televisi

Kategori Cetak/Online

Juri Kategori Cetak/Online

Kinanti Pinta Karana

UNICEF

Terima kasih untuk semua peserta yang sudah mengikutkan karya mereka di Media Awards 2020. Banyak sekali karya yang bagus, dengan pemilihan topik yang menarik dan beberapa bahkan hampir tidak pernah diangkat sebelumnya. Pilihan saya jatuh pada artikel tentang kegagalan peradilan Mispo di Papua. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa, “Jika sebuah tulisan mudah dibaca, artinya penulisnya sudah susah payah bekerja keras untuk itu.” Begitu pula dengan artikel ini. Topiknya tampak berat, sang wartawan bisa menuturkan dengan runut dan mampu memberikan warna serta menyajikan kutipan yang meyakinkan, kadang menyakitkan, tapi juga menyentuh. Untuk rekan-rekan yang belum terpilih, tetap semangat karena di luar kompetisi, kerja jurnalistik Anda membuat perbedaan, meninggikan suara anak-anak agar didengar dan bahkan bisa menyelamatkan hidup mereka.

Retno Listyarti

KPAI

Secara umum 124 tulisan yang masuk dalam seleksi awal sudah baik, terutama dalam menunjukkan keberpihakan pada anak. Tulisan juga sangat beragam dalam mendorong pemenuhan hak-hak anak, seperti hak anak atas kesehatan, pendidikan, partisipasi anak, tumbuh kembang anak dan hak hidup anak.

Sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), saya lebih menitikberatkan penilaian pada dampak dan seberapa kuat roh tulisan memiliki keberpihakan terhadap anak.

Akhirnya saya menemukan beberapa tulisan yang mendorong negara melakukan pemenuhan hak-hak anak, seperti tulisan

yang mengupas dampak putusnya hak atas pendidikan, membuat anak terpaksa menjadi pekerja anak, ternyata di eksploitasi bahkan di perdagangkan. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan terpaksa menikah diusia anak, kemudian memiliki anak yang kurang gizi dan stunting. Hak anak untuk sehat justru dihambat oleh orangtua mereka sendiri yang menolak anaknya di imunisasi. Lalu bagaimana anak-anak yang bermasalah pada pengasuhan keluarga harus kecanduan lem aibon dan akhirnya putus sekolah serta mengalami masalah kesehatan. Untungnya hak rehabilitasi mental dan kesehatannya dapat dipenuhi meskipun belum maksimal.

Namun, semua tulisan yang masuk patut di apresiasi karena menunjukkan kepedulian pada masalah anak sebagai kelompok rentan.

Arif Zulkifli

Dewan Pers

Para penulis dalam buku ini menyadari bahwa anak adalah penjaga masa depan Indonesia – mereka yang sayangnya tak selalu dijaga oleh negara dan generasi sebelum mereka. Gizi buruk, perisakan sosial, minimnya vaksin terhadap balita – seperti tampak dalam pelbagai tulisan dalam buku ini – merupakan sekadar contoh tentang para penjaga yang kita cemaskan kesulitan memelihara masa depan Republik bahkan masa depan diri mereka sendiri.

Endah Lismartini

Ketua Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marjinal Aliansi Jurnalis Independen

Tak mudah menemukan naskah yang akhirnya masuk dalam nominasi dari ratusan tulisan jurnalistik yang kami terima. Bagaimana pun, nominasi harus dipilih, dan pemenang harus ditentukan. Banyak sekali naskah dengan ide menarik. Tapi ide saja tak cukup, karena ini adalah lomba karya jurnalistik.

Kehebatan seorang jurnalis adalah ketika ia mampu meramu ide yang menarik dalam bentuk tulisan yang mudah dibaca dan dipahami. Bahkan memengaruhi pembacanya. Ide tulisan yang menarik, cara meramu naskah hingga data dan informasi lain yang disertakan tentu memberi pengaruh pada warna tulisan.

Pilihan saya jatuh pada tulisan Erick Tanjung dari Suara.com, soal kegagalan peradilan Mispo, seorang anak dari Papua. Tema yang dipilih Erick cukup berat, butuh upaya keras untuk menyajikannya hingga mudah dibaca dan dimengerti. Kasus Mispo butuh disuarakan, agar pengadilan tak semena-mena mengadilinya. Mispo masih anak-anak, dan tak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Ia juga tak mampu berbahasa Indonesia. Tapi terancam hukuman hingga tujuh tahun penjara.

Mispo, layak dibela.



Adi Renaldi

VICE Indonesia

Ia adalah jurnalis berpengalaman yang menulis untuk VICE Indonesia sejak tahun 2016 dan banyak menulis tentang isu terorisme, politik, hak asasi manusia, lingkungan dan kebudayaan. Alumni Universitas Sanata Dharma ini juga merupakan founder Jurnalisme Sabtu Sore yang banyak memberikan pelatihan/lokakarya mengenai jurnalisme kesusastraan.

Adi pernah memenangkan penghargaan jurnalistik, yang terbaru adalah Earth Journalism Network (EJN) 2020 Asia-Pacific Investigative Environmental Story.

MENYAMBANGI SUNATAN MASSAL PEREMPUAN TERBESAR DI INDONESIA

Dipublikasikan di VICE Indonesia pada 10 Januari 2020
oleh **Adi Renaldi**

Tangis Salsabila* seketika tak bisa dibendung lagi pagi itu. Farah*, ibunya, buru-buru membopong bocah satu tahun itu keluar klinik sambil sesekali mengusap wajah si anak. Di luar, seorang perempuan tua berhijab mengulurkan satu kantong besar bingkisan dan sebuah amplop kepada Farah. “Mungkin tadi dia takut atau kaget karena ramai,” kata Farah saat melangkah keluar klinik. “Pas disunat malah enggak nangis dia.”

Selain Salsabila, ada 150-an anak perempuan lain yang mengikuti sunat massal, dari bayi usia 3 bulan hingga bocah 11 tahun. Sejak pukul 4 pagi mereka berkumpul di teras sebuah gedung koperasi yang beberapa bagiannya disulap menjadi ruang khitan. Mereka datang dari berbagai daerah sekitar Bandung Raya. Tak ada persyaratan khusus buat turut serta. Para orang tua cukup mendaftar lewat WhatsApp tanpa dikenakan biaya apapun. Farah datang bersama suami dan anaknya pagi itu. Mereka berangkat dari rumahnya di pinggiran kota Bandung pukul 5 pagi dengan sepeda motor. Di depan gedung dia disambut dua perempuan yang duduk di belakang meja pendaftaran ulang. Farah kebagian antrean nomor 30.

Dia mengatakan telah merencanakan untuk menyunat putrinya jauh sebelum kelahirannya. Farah, seorang ibu rumah tangga yang juga berdagang kelontong, merasa kesulitan mencari dokter atau mantri yang mau mengkhitan anak perempuan. Terlebih, dia tak punya biaya buat itu. Maka mengikuti sunat massal itu menjadi pilihan paling logis buatnya. “Kebanyakan rumah sakit tidak mau menyunat anak perempuan,” kata Farah. “Jadi mending ikut di sini. Gratis dan dapat angpao juga,” kata Farah.

Yang paling mendasari niat Farah sebetulnya ada dua hal, selain angpao dan sunat gratis: tradisi dan agama. Semua perempuan di keluarganya disunat. “Sudah tradisi keluarga,” kata Farah yang pagi itu memakai hijab warna merah muda, sembari memangku putrinya yang perlahan mulai tenang. “Dulu saya juga disunat, dan mungkin nenek dari nenek saya juga disunat. Sudah jadi kepercayaan kalau disunat itu sesuai ajaran agama.”

Sunatan massal itu rutin diadakan Yayasan Assalaam Bandung setiap tahun saat Maulid Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriyah. Yayasan itu didirikan oleh Habib Ustman Al-Aydarus, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat yang disegani dan konon pernah mengkhhatamkan Al-Quran lebih dari 6.000 kali semasa hidupnya. Ulama 52 tahun itu, menurut cerita, adalah seorang penyayang anak yang kerap menyantuni yatim piatu. Pada 1938, Ustman mendirikan Yayasan Assalaam yang berkuat di isu sosial-keagamaan. Kini Yayasan Assalaam lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan, yang membangun pesantren dan sekolah, dari TK hingga SMA, yang semuanya terletak di Jl. Sasakgantung, Kota Bandung.

Pada 1948, yayasan itu mulai mengadakan sunatan massal yang menjadi tradisi tiap tahun. Deden Syamsul Romly, ketua bagian penelitian dan pengembangan Yayasan Assalaam dan koordinator sunatan massal, mengatakan sunat massal diadakan setiap tahun untuk menghormati wasiat Ustman. “Semua diadakan semata demi meneladani sikap-sikap Nabi Muhammad, terutama adab bersuci atau thaharah,” tuturnya.

“Ini sudah menjadi tradisi yang mendarah daging, buat kami maupun para peserta.”

Deden menjadi pria paling sibuk pagi itu. Dengan walkie talkie di tangan dia mondar-mandir memastikan jalannya acara sesuai jadwal. Dia tahu acara itu tak akan berjalan sesuai jadwal. Sebab antusiasme masyarakat selalu melebihi ekspektasinya. Dia mengantar saya berkeliling kompleks Assalaam. Sebuah jalan sempit yang cuma bisa dilalui satu mobil, dan pasti menimbulkan macet saat jam berangkat dan pulang sekolah, memisahkan gedung koperasi dengan SD Assalaam yang menjulang dengan dua lantainya. Di sampingnya, berdiri Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP). Semua bangunan didominasi warna hijau.

“Gedung koperasi ini baru saja kami beli,” katanya dengan senyum lebar. “Sebelumnya sunatan massal diadakan di belakang gedung SD. Lebih tertutup.”

Total ada 230 anak laki-laki dan perempuan yang ikut khitan massal, sedikit melebihi kuota. Dia menargetkan jumlah anak perempuan yang turut serta di angka 130, tapi yang mendaftar mencapai 220 anak perempuan bulan ini. “Selalu seperti ini sepanjang tahun,” katanya sambil tersenyum kecut.

“Kalau kuota tidak kami batasi, bisa seharian penuh acaranya.”

Ini juga perkara biaya, ujar Deden menambahkan. Setiap anak yang ikut sunat mendapat amplop berisi Rp200 ribu, ditambah bermacam bingkisan dan makanan. “Coba dikalikan dengan jumlah anak tadi, berapa dana yayasan yang sudah dikeluarkan?” dia tertawa. Deden mengatakan, tak ada batasan usia perempuan yang bisa mengikuti sunat massal. Dari mulai bayi baru lahir hingga perempuan paruh baya.

Lebih dari 200 juta perempuan telah menjalani sunat perempuan di 30 negara, masih menurut WHO. Sementara di Indonesia, angka perempuan yang pernah menjalani prosedur sunat juga tinggi, jika merujuk pada laporan beberapa lembaga dunia. Data Unicef pada 2016 menyebut Indonesia menempati posisi

ketiga negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi, setelah Gambia dan Mauritania, dengan angka 54 persen pada kelompok usia 14 tahun.

Setidaknya ada 13,4 juta perempuan Indonesia berusia atau kurang dari 11 tahun mungkin pernah menjalani khitan perempuan. Gorontalo berada di posisi teratas dengan angka 83.7 persen, Bangka Belitung 83.2 persen, lalu Banten 79.2 persen. Sementara survei lembaga riset Population Council pada 2003 menyebut 96 persen keluarga melakukan sunat terhadap anak perempuannya sebelum menginjak usia 14 tahun. Angka itu mungkin belum mewakili fakta di lapangan. Sebab kebanyakan sunat perempuan dilakukan secara mandiri oleh keluarga dalam upacara privat, dengan bantuan mantri atau bidan, tanpa prosedur medis yang resmi.

Sunat perempuan, atau female genital mutilation/cutting (FGM/C), tidak diakui dalam dunia kedokteran lantaran tak memiliki manfaat medis. Menurut WHO, sunat perempuan justru membawa risiko kesehatan serius, dari pendarahan, kista, hingga komplikasi saat proses melahirkan. Pendek kata, sunat perempuan adalah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Yang termasuk dalam kategori FGM/C, menurut WHO, adalah semua tindakan yang memotong sebagian atau keseluruhan bagian luar genitalia perempuan, termasuk mengubah, atau melukai/menggores klitoris tanpa alasan medis yang jelas.

Ada empat tipe FGM/C menurut WHO:

1. Clitoridectomy, pemotongan sebagian atau seluruh klitoris, atau selaputnya;
2. Excision, pemotongan sebagian atau seluruh klitoris dan/ atau labia minora dengan atau tanpa memotong labia majora;
3. Infibulation, mempersempit lubang vagina dengan selaput penutup, dengan memotong atau mengubah bentuk labia majora dan labia minora, tanpa melukai klitoris;
4. Tindakan lain yang melukai vagina tanpa tujuan medis, seperti menggaruk, menusuk, atau menggores area genital.

Deden jelas tak sepakat dengan kategori tersebut. Malah dengan

nada bangga Deden mengatakan sunat perempuan massal ini menjadi satu-satunya di Indonesia, terutama yang telah dilembagakan. Dia menolak jika sunat di Yayasan Assalaam disebut termasuk kategori FGM/C. Sebab, menurutnya, tidak ada pemotongan ataupun tindakan yang melukai alat kelamin. Deden mengatakan, apa yang menjadi tradisi sunat di Assalaam adalah membuang selaput yang membungkus klitoris.

“Coba anda lihat, tak ada anak yang menangis setelah disunat,” kata Deden. “Karena prosedurnya tidak seperti yang digambarkan media. Tidak ada darah.”

Praktik sunat perempuan di Yayasan Assalaam bukan tanpa penolakan. Pada 2006, sebuah tim dari WHO pernah mendatangi sunat massal tersebut untuk melihat langsung praktik khitan perempuan. Organisasi kesehatan PBB tersebut mendesak Assalaam buat menghentikan tradisi tersebut setelah mendapat laporan dari aktivis perempuan.

Pada 2007 dan 2008, Yayasan Assalaam sempat menghentikan sunat massal perempuan menyusul ramainya pemberitaan dan desakan WHO. Deden mengatakan, selama dua tahun vakum tersebut, para ulama di Yayasan Assalaam mengkaji lebih lanjut hukum sunat perempuan dalam ajaran Islam.

Banyak perdebatan soal sunat perempuan dalam mazhab Islam. Ulama dari mazhab Syafi’iyah berpendapat bahwa khitan wajib dilakukan terhadap laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanabilah dan Malikiyah punya pendapat senada. Sementara Mazhab Hambali berpendapat bahwa khitan wajib bagi laki-laki, dan keutamaan untuk perempuan. Para ulama di Yayasan Assalaam sepakat dengan Hambali. Sunat perempuan bersifat makrumah, kata Deden.

“Perempuan yang disunat itu dimuliakan sesuai telaah kami berdasarkan kajian hadis,” lanjutnya. “Dia bersinar di hadapan suaminya.”

“Selama ini perempuan kan susah mencapai orgasme, sunat bisa memberikan itu. Bukankah itu suatu bentuk keadilan?”

Deden menolak saat VICE meminta izin untuk melihat ruang tindakan saat prosesi khitan. Dia tak mau mengambil risiko untuk memicu perdebatan lagi di media, seperti 13 tahun silam, selain karena alasan etika.

Pukul 9 pagi, suasana di Yayasan Assalaam berangsur sepi. Hanya tinggal beberapa anak menunggu giliran. Dr. Yanne Cholida, bersama seorang bidan dan lima ustazah asistennya, tengah sibuk membereskan meja kerja kayu - yang disulap menjadi tempat tidur dengan sehelai kain - yang baru saja digunakan untuk mengkhitan anak-anak perempuan. Di atas meja ada lampu duduk yang masih menyala terang. Di sampingnya, tiga stoples plastik berisi kapas, jarum suntik bermacam ukuran, dan antiseptik luka, masih terbuka. Yanne memakai jas putih lengan pendek khas seragam dokter umum dan hijab krem pagi itu. Krim anti-jerawat terlihat di pipi kirinya.

Dia adalah cicit dari pendiri Yayasan Assalaam Ustman Al-Aydarus. Bahkan klinik tempat dia praktik cuma terletak beberapa meter dari gedung koperasi sunat massal itu. Sejak 2008, dia menjadi dokter utama di yayasan itu yang fokus pada praktik sunat perempuan, sambil memberi pelatihan pada para ustazah dan bidan. Dia lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi pada 2005 dan sempat menjadi relawan medis di pelosok Kabupaten Bandung. Alih-alih mengejar spesialisasi, Yanne justru mendapat sertifikasi di bidang hipnoterapi dan akupunktur. Selain membuka praktik sebagai dokter umum, Yanne juga menjalankan sebuah klinik estetika.

Dia menjelaskan proses sunat perempuan selangkah demi selangkah, dari ukuran jarum yang diperlukan (semakin besar angkanya, semakin kecil ukuran jarum), hingga bagian apa yang dikhitan. Menurut Yanne, klitoris tertutup oleh selaput yang selain menghalangi sensasi seksual, juga berisiko menjadi tempat penumpukan kotoran (smegma). Khitan yang dilakukannya, bermaksud membuang selaput klitoris itu, dengan harapan

membuatnya lebih bersih dan meningkatkan kenikmatan orgasme, sekaligus menurunkan libido.

“Jadi hanya menggosok saja kepala atau bungkus dari klitoris. Kalau dari segi medisnya, sekarang secara logika, sesuatu yang terbungkus dengan yang tidak dibungkus, lebih sensitif mana, kira-kira?” tanya Yanne.

“Maka ketika klitoris itu terbuka, otomatis sensasinya lebih terasa.”

Yanne menolak fakta bahwa apa yang dilakukannya bertentangan dengan anjuran lembaga kesehatan seperti WHO. Dia beranggapan, selama tidak ada pemotongan atau melukai, sunat perempuan yang dilakukannya aman.

“Yang jelas kami tidak masuk dalam tiga tipe yang dikategorikan WHO sebagai mutilasi,” kata Yanne.

Selain sebagai dokter utama, Yanne juga melatih beberapa ustazah untuk menjadi juru sunat atau asisten. Awalnya para perempuan itu menjadi asisten Yanne selama beberapa bulan sampai dinilai sanggup menjadi juru sunat. Aminah* mengaku telah menjadi juru sunat selama lima tahun.

Dia tak punya latar belakang kedokteran sama sekali. Keahliannya didapat dari pengamatan dan praktik langsung dari para seniorinya. “Saya menjaga amanah dari Yayasan saja,” kata Aminah tentang alasannya melakukan praktik khitan perempuan. Dia menolak menjelaskan lebih lanjut soal profesinya sebagai juru sunat, namun dia percaya profesinya tak melanggar peraturan apapun.

Pandangan pemerintah terhadap FGM/C yang tertuang dalam peraturan Kementerian Kesehatan masih abu-abu. Ia tidak sepenuhnya melarang sunat perempuan. Dalam Permenkes 2010, definisi sunat perempuan yang diperbolehkan merupakan tindakan menggosok kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris. Itu berbeda dengan FGM/C.

Permenkes tersebut telah diganti dengan peraturan 2014, yang menyebutkan bahwa sunat perempuan “pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan.” Namun karena secara tradisi sunat perempuan masih dilakukan, Kementerian Kesehatan hanya mengimbau supaya khitan perempuan “harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan.

Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertolak belakang dari Kemenkes. Sepanjang tidak melukai berlebihan dan hanya menghilangkan kulup klitoris, maka fatwa MUI menghalalkannya.

Sementara itu, dunia kedokteran di Indonesia secara resmi tetap tidak mengakui prosedur sunat perempuan. Ketika VICE berkunjung ke sebuah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pihak hubungan masyarakat mengaku tidak melayani atau menawarkan sunat perempuan.

“Jika ada orang tua yang ingin anak perempuannya disunat, tidak bisa kami layani di sini,” kata petugas humas yang menolak dikutip namanya.

Dr. Mahesa Paranadipa dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan klaim bahwa sunat perempuan dapat memberikan orgasme lebih dan menurunkan libido tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Sebaliknya, berdasarkan beberapa catatan ilmiah, sunat perempuan justru memicu disfungsi seksual dan kesulitan mencapai orgasme, kata Mahesa. “Sunat perempuan tidak pernah diajarkan di bangku kuliah kedokteran manapun,” kata Mahesa. “Tidak ada panduan ilmiah tentang sunat perempuan. Sehingga seharusnya tidak ada dokter yang melakukan praktik sunat perempuan.”

Mahesa melanjutkan, setiap dokter diikat oleh sumpah dokter dan kode etik. Di dalam kode etik diatur bahwa dalam melakukan tindakan medis harus mengacu kepada standar profesi tertinggi. Lantaran tindakan sunat perempuan tidak memiliki standar

kedokteran, maka jika ada dokter yang melakukan praktik tersebut dapat dikenakan sanksi, terutama jika menimbulkan dampak negatif bagi pasien, kata Mahesa.

“Masyarakat yang mengalami kerugian dari pelayanan dokter tersebut dapat mengadakan hal itu ke IDI,” ujarnya menambahkan.

Di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sunat perempuan adalah sebuah simpul rumit antara tradisi budaya yang ritualistik dan ajaran agama. Di Sumatera Selatan ada tradisi Bakayekan, di Gorontalo ada Mo Polihu Lo Limu atau ritual mandi lemon,

Suku Bugis punya tradisi Makatte, sementara di Jawa sunat perempuan disebut Tetasan. Sunat perempuan juga jamak ditemui dalam tradisi masyarakat Sumatera Barat, Maluku, dan Madura. Sebuah kajian dari Universitas Indonesia pada 2016 menemukan dari 700 responden, 96 persen percaya bahwa sunat perempuan merupakan anjuran agama.

Lies Marcoes, peneliti dari lembaga Rumah Kita Bersama, pada 1998 pernah melakukan studi soal sunat perempuan di beberapa daerah Indonesia, bersama peneliti Perancis Andre Feillard. Dia menemukan bahwa sunat perempuan adalah tradisi komunal, dan “praktik sunat merupakan gabungan adat dan proses inisiasi atau penanda keislaman di sejumlah daerah di Nusantara.”

“Sunat dilakukan oleh dukun sunat dalam bentuk simbolis,” tulis Lies. “Ujung klitoris bayi/anak disentuh oleh kunyit atau menggunakan alat (pisau kecil, gunting, atau jarum).”

Di sejumlah daerah seperti Sulawesi Selatan, ritual ini dirayakan keluarga dengan pesta adat. Tapi di banyak tempat, ritual itu hanya diketahui ibu dan dukun yang melaksanakan. Tak jarang seorang anak tak pernah tahu jika dia pernah disunat, bahkan ketika telah dewasa. Feillard menyebut ritual itu sebagai “rahasia kecil” antar perempuan.

Dita Savitri, seorang perempuan Muslim Jawa 23 tahun, termasuk yang percaya bahwa perempuan yang disunat termasuk dimuliakan. Dalam tradisi Jawa, sunat tak ubahnya tolak bala yang akan membawa kebahagiaan bagi perempuan kelak ia dewasa. Dalam prosesi tersebut, si anak dimandikan dengan kembang setaman sebelum dirias dan duduk di sebuah kursi lengkap dengan sesaji.

Dita disunat saat usia 8 tahun lewat sebuah upacara tradisional dengan berbagai macam ritual tersebut. Keluarganya memang termasuk religius serta memegang teguh adat Jawa. “Yang kuingat kayanya pahaku kayak dicolek gitu, dan enggak ada sakitnya. Soalnya aku enggak nangis waktu itu,” kata Dita saat dihubungi lewat pesan singkat.

Dari pengalamannya, Dita tak sependapat jika sunat berpengaruh terhadap orgasme. Kehidupan seksualnya tergolong biasa saja, tanpa libido yang menurun. “Kayanya enggak ada kaitannya deh antara orgasme sama sunat,” beber Dita. “Kalau ada klaim kayak gitu aku gak tahu juga, tapi buatku enggak [pengaruh] sih.”

Dua bulan lalu Dita baru saja melahirkan seorang anak perempuan. Dia juga berencana menyunat anaknya, dalam ritual sama yang pernah dia jalani sewaktu kecil.

Saat hari beranjak siang, beberapa petugas tengah sibuk membersihkan gedung koperasi Assalaam. Ibu-ibu petugas yang sedari tadi duduk di meja pendaftaran tampak sedang merekap jumlah peserta sunat massal. Sementara Deden sedang bersiap ke acara selanjutnya. Siang nanti bakal ada tabligh akbar yang dihadiri sejumlah ulama penting dan pejabat. Sederet pertanyaan soal sunat perempuan tadi seakan masih mengganggu pikirannya.

Dia masih tak habis pikir kenapa banyak pihak yang berupaya melarangnya. Sebab, menurutnya, perdebatan antara agama

dengan dunia kedokteran tak bakal menemukan titik terang.

“Ini soal akidah,” timpalnya. “Kepercayaan kadang tidak bisa dilogika bukan? Kami hanya menjalankan syariah. Itu saja. Kalau sampai dilarang kami jelas siap melawan.”

Terlebih, dia melihat perkara perzinaan dan seks bebas sebagai akibat dari tingginya libido perempuan yang tidak bisa dikontrol. Maka menurutnya sunat perempuan adalah jalan menuju seks yang lebih sehat dan halal.

“Kadang kalau saya melihat perempuan yang kerap berganti-ganti pasangan, atau seks bebas terutama di kota besar, saya bertanya dalam hati, ‘kamu itu dulu disunat enggak sih?’” tandas Deden.

**Beberapa nama disamarkan untuk melindungi privasi. Adelia Rahma Santoso berkontribusi dalam liputan ini.*



Aditya Widya Putri

Tirto.id

Seorang jurnalis yang memiliki pengalaman bekerja di Tirto.id sejak tahun 2016 dan memiliki spesialisasi menulis mengenai isu ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan populer, dan kesehatan.

Ia pernah mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) tahun 2019.

PERAWATAN PALIATIF: 'MENYAMBUT' KEMATIAN ANAK PEJUANG KANKER

Dipublikasikan di Tirto.id pada 15 Maret 2018

Oleh **Aditya Widya Putri**

Menyiapkan kepergian bagi anak pejuang kanker dengan bermartabat pada sisa hidupnya bisa sama-sama menguatkan, baik bagi pasien maupun keluarga.

tirto.id - Rabu siang akhir Februari lalu, saya menyusuri gang-gang sempit di kawasan Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada empat rumah berimpitan, masing-masing seluas sekitar 3x4 meter, dengan satu kamar mandi tanpa sekat.

"Halo, apa kabar?" sapa bocah laki-laki membuka pintu rumah paling pojok. Senyumnya semringah menyambut saya dan Rizki Freddy Simamora, seorang pekerja sosial di Yayasan Pita Kuning, lembaga filantropi bagi anak dengan kanker.

"Akmal," kata si bocah memperkenalkan diri.

M. Akmal Putama, 14 tahun, mengajak kami masuk. Ruangan sempit itu berisi satu tempat tidur, lemari, televisi, kulkas satu pintu, dan satu akuarium kecil dengan tiga ikan mas. Keluarga Akmal biasa memakainya sebagai kamar sekaligus ruang keluarga, ruang makan, dan ruang ragam kegiatan lain.

Kunjungan kali itu Rizki sengaja membawa laptop untuk mengajak Akmal nonton bareng. Rizki sengaja memilih film *Cahaya dari Timur: Beta Maluku* (2014) karena Akmal kangen bermain bola.

Untuk bisa melihat gambar dalam layar, Akmal harus mendekatkan matanya sejarak 10-15 sentimeter dari layar. Itu pun gambar yang ditangkap kabur, sebatas bayangan-bayangan serupa gelembung.

“Sebelum kena nasofaring, aku jago main bola. Pernah dapat juara dua mewakili sekolah, sempat ditawari masuk klub juga,” cerita Akmal.

Akmal terserang nasofaring sejak 2015. Ini adalah jenis kanker yang tumbuh di rongga belakang hidung dan belakang langit-langit rongga mulut.

Akmal sudah menjalani pengobatan selama dua tahun di RSPAD Gatot Soebroto. Tapi pengobatannya sempat berhenti setahun. Akmal trauma melihat teman sekamarnya meninggal satu demi satu.

Di sinilah Rizki mulai hadir dalam keseharian Akmal. Ia menghibur, membujuk, dan menguatkan mental Akmal untuk terus melakukan kemoterapi. Akmal akhirnya bisa dibujuk. Namun, sel kankernya telah mencapai stadium empat.

Akmal jadi sering merasa nyeri pada kepala, terganggu penglihatannya, dan sulit menelan. Untuk satu suap makanan, ia harus dibantu beberapa teguk air supaya makanannya terdorong melewati tenggorokan. Tapi Akmal punya prinsip sungkan bikin susah siapa pun.

Rizki berkata bahwa kombinasi prinsip Akmal, plus pengetahuan orangtua yang minim, bikin ia terlambat didiagnosis. Padahal Akmal sudah merasakan gejala awal nasofaring berupa nyeri kepala hebat sejak 2013.

Namun, Akmal memilih mengatasinya dengan menelan obat-obatan analgesik alias obat pereda nyeri yang biasa dijual di warung. Sang ibu mengira penyakit anaknya ringan semata. Akmal melakukan reaksi serupa saat penglihatannya kabur akibat efek samping kemoterapi kedelapan.

"Aku enggak bilang ibu sama ayah, pura-pura pusing biasa. Pura-pura bisa lihat supaya mereka enggak khawatir," kata Akmal.

Mendadak, suasana jadi sedih, mata Akmal berkaca-kaca. Melihat perubahan itu, Rizki segera menengahi. Sebagai pekerja sosial, Rizki punya kewajiban membuat anak dengan kanker seperti Akmal harus bahagia. Sesegera mungkin ia mengalihkan fokus Akmal dengan bertanya tentang alur cerita film yang ditonton.

Berhak Hidup Bahagia Pekerjaan Rizki dan tiga teman seprofesinya di Yayasan Pita Kuning memerlukan tabungan sabar luar biasa. Setiap hari ia harus memberi pendampingan. Selain menguatkan mental, kerjanya harus mengurus keperluan medis serta kebutuhan harian anak dan keluarga. Ia juga mesti mempersiapkan anak dan keluarga untuk kuat menghadapi ajal. "Harus bisa membesarkan hati anak dan orangtua. Lalu membantu beberapa kebutuhan harian seperti biaya medis, transportasi, makan, kontrakan, atau sekolah," ujar Ning Triranto Mahayu, kepala program pelayanan dan masyarakat dari Yayasan Pita Kuning saat menerangkan sebagian wilayah pekerja sosial mereka kepada saya, akhir Februari lalu.

Yayasan Pita Kuning adalah salah satu organisasi nirlaba yang membantu perawatan paliatif kepada anak pejuang kanker. Paliatif anak adalah pelayanan aktif menyeluruh, meliputi badan, pikiran, semangat, dan dukungan moral terhadap anak dan keluarga sejak diagnosis. Tujuannya untuk memberi kualitas hidup terbaik bagi mereka.

Lazimnya terapi paliatif dilakukan di rumah sakit atau rumah singgah, tetapi Pita Kuning memfasilitasinya di rumah pasien.

Bantuan finansial turut diberikan dengan tujuan meningkatkan derajat hidup keluarga.

“Kita kalau sakit juga mau dirawat dengan nyaman. Maka mereka juga harus cukup makan dan bisa dapat pelayanan medis maksimal,” ujar Mahayu.

Bagi anak pejuang kanker, pelayanan paliatif adalah kebutuhan mendesak di seluruh dunia termasuk Indonesia.

David R. DeMaso dan Richard J. Shaw dalam *Pediatric Psychosomatic Medicine* (2010) mengidentifikasi masalah anak yang menderita kanker saat menjalani pengobatan. Mereka menggambarkan bahwa 59 persen anak-anak ini mengalami kesehatan mental, 15 persen merasa cemas, 10 persen depresi, dan 15 persen mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Mereka menilai bahwa masalah-masalah ini lahir karena beberapa faktor, termasuk kondisi letih secara fisik maupun psikologis saat pengobatan, aktivitas semula sebelum sakit terhambat (seperti sekolah, belajar, dan bermain), serta tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Mereka berkata bahwa terapi paliatif bisa meminimalisir persoalan-persoalan tersebut.

“Menyambut” Kematian dengan Terapi Paliatif

Berbeda dari gambaran bangsal orang sakit yang serba putih, dingin, dan menerbitkan kesan kaku, Bangsal Anak di RS Kanker Dharmais dihiasi warna cerah. Ruang tunggu dilapisi kertas dinding bernuansa taman kota dan perosotan.

Perpustakaan menyediakan ragam buku bacaan, dan ruang bermain diisi peralatan audio visual. Semua dirancang memanjakan mata, berwarna-warni dan penuh gambar, termasuk untuk lorong-lorong kamar bagi anak pejuang kanker dengan perawatan paliatif.

Umumnya, terapi paliatif hanya tersedia di rumah sakit milik pemerintah atau disediakan oleh organisasi nirlaba seperti Pita

Kuning. Namun, RS Kanker Dharmais merupakan salah satu pusat kesehatan yang telah mengadopsi perawatan ini.

Dr. Adil S. Pasaribu, Kepala Instalasi Paliatif dari RS Kanker Dharmais, menerangkan soal kegiatan paliatif di bawah naungannya. "Paliatif tidak sepenuhnya terpisah dengan medis. Pada tahap awal bisa berjalan bersama, tapi di bagian paling ujung saat teknologi sudah tak berhasil, pasien sepenuhnya paliatif," katanya.

Perawatan paliatif di tempatnya bekerja didampingi oleh dokter, perawat, dan psikolog. Sebagai tambahan, pihak rumah sakit juga bekerja sama dengan para guru dan staf pengajar untuk membantu pasien belajar. Konsep ini disebut pihak rumah sakit sebagai "hospital schooling".

Ragam aktivitas "pengusir penat" ini bisa diikuti oleh semua pasien. Sekalipun diinfus, anak boleh turut serta berkegiatan sambil mendorong tiang infus. Intinya, selama dirawat, mereka tak melulu harus tiduran; anak tetap dapat bermain, belajar, dan bersosialisasi.

Saat mereka berkegiatan di ruang bermain atau perpustakaan, orangtua dilarang menemani. Tujuannya agar orangtua punya "waktu rehat". Mendampingi si sakit tentu bukan aktivitas menyenangkan, sehingga orangtua juga butuh penyegaran.

"Ingat, layanan paliatif juga memberikan layanan pada keluarganya. Anak sakit, keluarga pasti ikut pusing," ujar Adil.

Sayangnya, hingga saat ini paliatif masih sering disalahartikan. Satu contoh diceritakan oleh dr. Edi Setiawan Tehuteru, Koordinator Operasional Pelayanan Instalasi Paliatif dari RS Kanker Dharmais. Ada satu orangtua menjumpainya di ruang praktik meminta dokter dilarang melayani perawatan paliatif bagi sang anak.

Anak itu terkena kanker darah atau leukemia. Kesadarannya menurun lantaran penyumbatan pembuluh darah otak. Alasan

si orangtua, kondisi sang anak “tak bisa ditolong”, dan akan segera dirujuk pelayanan paliatif. Ia mendengar rumor di kalangan orangtua bahwa jika pasien dirujuk ke perawatan paliatif, tak akan lama lagi si pasien meninggal.

“Padahal sejak tahun 2011, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengubah konsep lama paliatif,” terang Edi.

Perubahan itu: paliatif tak cuma diberikan saat proses akhir perawatan kepada pasien, tetapi sejak diagnosis awal. Secara umum, paliatif diterapkan sejak gejala dan menjelang akhir kehidupan sang pasien.

Pada tahap gejala, paliatif bertujuan mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan emosi positif agar nyaman menjalani pengobatan. Sedangkan pada tahap akhir, paliatif diberikan kepada pasien yang kondisi tubuhnya sudah tak berdaya merespons pelbagai macam pengobatan.

Hal terakhir pernah dipilih oleh keluarga Arnev, pasien pejuang kanker berusia delapan tahun. Dari cerita dokter Edi, serangkaian pengobatan kalah cepat dari keganasan sel-sel kanker dalam tubuh Arnev. Dokter Edi memberi dua opsi kepada orangtua Arnev: melakukan kemoterapi atau meniadakan segala tindakan medis.

Arnev terus menggeleng saat orangtuanya menyodorkan pilihan pertama. Akhirnya, rembukan keluarga memutuskan opsi kedua. Orangtua Arnev berharap permata hatinya bisa menikmati hidup layaknya anak sehat. Mereka membawa Arnev pulang ke rumah. Ia meninggal dikelilingi keluarga yang terus berdoa.

“Mari mempersiapkan kepergian di dunia seperti orangtua menyambut kelahiran bayinya. Karena kematian juga hal yang pasti,” ujar dokter Edi.

PEMBEBAS NYERI KANKER ITU BERNAMA MORFIN

Dipublikasikan di Tirto.id pada 5 Maret 2020

Oleh **Aditya Widya Putri**

Jangan takut pakai morfin untuk kebutuhan medis. Ia terbuat dari tumbuhan dan penggunaannya untuk kanker pun sudah direkomendasikan oleh WHO.

Kepercayaan sebagian masyarakat Indonesia tentang klenik atau praktik-praktik pengobatan tradisional turut memengaruhi keputusan mereka memelihara kesehatan, termasuk untuk mengobati kanker.

Beberapa terapi tradisional mengklaim dapat menyembuhkannya. Termasuk yang paling baru adalah rompi dan helm listrik antikanker. Padahal jenis pengobatan macam ini belum pernah terbukti kesahihannya secara ilmiah.

Hanya saja terapi-terapi semacam ini selalu menarik bagi keluarga yang tengah limbung dan kalut demi mendengar penyakit kanker. Pasien mudah tergiur dengan iming-iming biaya murah dan kesembuhan instan.

Hal itu terjadi pada M. Akmal Putama, anak 14 tahun dengan kanker nasofaring, dan Andry Garcia, penyintas kanker leukemia berusia 21 tahun.

Keduanya pernah mencoba terapi pijat refleksi. Karena penanganan medis yang kurang memadai, sakit Akmal memburuk, dan didiagnosis nasofaring stadium empat. Dalam kasus Andry, gejalanya sempat mereda meski ia ragu hal itu berkat pengobatan alternatif.

“Sempat coba refleksi sama terapi ilmu perana (pengobatan spiritual jarak jauh). Tapi gejalanya hilang-timbul, awalnya malah leher dan ketiak bengkak, dan demam naik-turun,” cerita Andry.

Akhirnya mereka berdua tetap menjalani kemoterapi. Saat terdiagnosis leukemia, Andry masih menjadi pasien anak dengan kanker berusia 17 tahun. Ia sudah berjuang melawan sel kanker selama tiga tahun. Butuh waktu empat tahun lagi baginya mendapat predikat sebagai penyintas pejuang kanker.

Lazimnya anak dengan kanker mendapatkan protokol medis kemoterapi selama dua tahun setelah diagnosis. Setelahnya dokter melakukan evaluasi terhadap sel kanker secara berkala selama lima tahun.

Kanker pada Anak Tak Bisa Dicegah

Kanker pada anak umumnya dibagi dua kelompok: cair dan padat. Kanker cair biasa disebut kanker darah atau leukemia. Orangtua perlu waspada karena ciri-ciri leukemia sering menyerupai penyakit lain. Misalnya, pucat, sering demam, pendarahan (mimisan, gusi berdarah, pendarahan di kulit), pembengkakan di leher atau gusi, perut buncit, dan nyeri saat berjalan.

Ciri kanker padat pada anak lebih mudah dikenali daripada jenis kanker cair. Jamaknya, anak memiliki benjolan yang terlihat atau teraba. Namun ciri ini tak selalu muncul, misalnya saja pada kanker otak. Anak akan lebih sering mengeluh sakit kepala, lalu tiba-tiba oleng, lumpuh atau daya penglihatannya menurun.

“Jika menemukan gejala ini segera periksa ke dokter mana pun untuk mengonfirmasi. Karena kanker lebih mudah disembuhkan ketika terdiagnosis sejak dini,” ujar dr. Edi Setiawan Tehuteru, Koordinator Operasional Pelayanan Instalasi Paliatif dari Rumah Sakit Kanker Dharmais kepada saya, akhir Februari lalu.

Agaknya masyarakat sekarang mulai meleak seluk-beluk kanker pada anak. Terbukti, prevalensi pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut di Dharmais menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data terakhir dari Registrasi Kanker Anak di rumah sakit tersebut, jumlahnya mencapai 43 persen pada 2006, lalu menurun menjadi 35 persen dan 34,5 persen pada 2008 dan 2009.

Sayangnya, meski sudah tergolong lumayan dalam tahap penanganan, orangtua tetap gagal mengantisipasi kanker pada anak.

Penyebabnya: kanker pada anak belum diketahui hingga kini. Menurut The American Cancer Society, kanker pada anak tak terkait faktor risiko seperti tembakau, penggunaan alkohol, makanan tak sehat, atau kurang olahraga.

Kanker tetap bisa menyerang, sekalipun anak sudah melakukan segala upaya antisipatif. Sederhananya, kanker pada anak tak bisa dicegah.

Namun, bukan berarti orangtua tak perlu memperkenalkan pola hidup sehat kepada anak. Mereka tetap harus menjaga kesehatan anak untuk meminimalisir kanker saat dewasa.

The International Union Against Cancer, perkumpulan komunitas kanker dunia, yang berkantor di Swiss, misalnya menyarankan empat hal yang perlu dilakukan anak: hindari merokok, hindari infeksi, jauhi sinar matahari, dan makan sehat. Perilaku menghindari kebiasaan merokok berguna untuk meminimalisir kanker paru di kemudian hari, menurut organisasi tersebut. Sementara aktivitas menghindari infeksi

mencegah kanker hati dan leher rahim. Anak juga perlu mengurangi paparan sinar matahari terkait risiko kanker kulit. Terakhir, mereka perlu makan sehat untuk mencegah kanker usus besar.

Pengobatan Medis Kanker pada Anak

“Tata laksana pengobatan kanker secara medis hanya ada tiga. Kemoterapi, radioterapi, dan operasi,” demikian dr. Edi Setiawan Tehuteru, menegaskan bahwa pengobatan alternatif bukan solusi kesembuhan.

Meski begitu, mengapa hingga kini masih saja ada orangtua yang enggan melakukan terapi medis yang disarankan dokter? Dokter Edi mengatakan bahwa kekhawatiran efek samping dari kemoterapi menjadi salah satu pendorongnya. Rambut rontok, botak, muntah, kulit pecah-pecah, hingga badan yang mengurus – bayangan demikian yang menghantui keluarga dan pasien kanker.

Beragam dampak itu muncul akibat obat kemoterapi. Ia berfungsi menghambat pertumbuhan sel kanker, tetapi punya kelemahan: tidak dapat membedakan sel jahat dan sel baik.

Rambut rontok, misalnya. Meski bikin kepala plontos, toh bisa segera tumbuh lagi setelah obat kemoterapi dihentikan. Begitu pula kulit pecah-pecah. Efek lain seperti mual dan muntah lantaran obat kanker merangsang pusat mual pada otak. Untuk mengatasinya, dokter akan memberikan obat antimuntah.

Selain enggan kemoterapi, masih ada persoalan lain saat perawatan medis. Salah satunya beberapa obat kemoterapi dan morfin di Indonesia masih langka. Ini karena tak ada perusahaan dalam negeri yang memproduksinya. Akibatnya, pihak rumah sakit harus mengimpor beberapa jenis obat tersebut dari negara lain dengan masa tenggang yang agak lama.

Penggunaan morfin untuk kesehatan juga masih jadi titik antipati di Indonesia. Banyak pasien belum terbebas dari rasa

nyeri karena menolak obat dari tumbuh-tumbuhan tersebut, ujar dokter Edi.

Padahal, organisasi kesehatan dunia PBB (WHO) telah merilis pedoman mengurangi sakit terhadap anak pasien kanker. Berdasarkan tingkat rasa nyeri, pemakaian parasetamol dan ibuprofen adalah obat nyeri dalam tahap ringan. Namun, bila rasa nyerinya parah, morfin menjadi pilihan.

“Rasa nyeri pasien kanker adalah nyeri hebat. Apalagi ketika sudah dinyatakan paliatif, dosisnya tak dapat diturunkan. Paliatif tanpa morfin bukan paliatif,” terang dokter Edi.

Sayangnya, penggunaan morfin untuk meredakan nyeri untuk anak pasien kanker kurang diminati di Indonesia. Masih banyak pasien kanker menderita sakit hebat karena dokter kurang sigap mengontrol nyeri pada pasiennya. Akibatnya, kata dr. Edi, Indonesia kerap dicap sebagai salah satu negara yang menelantarkan pasien dengan nyeri kanker.

Ada ketimpangan penggunaan morfin di dunia. Secara umum, total produksi opium, bahan pembuat morfin, mencapai 566 ton setara morfin (tons of morphine equivalent) pada 2016. Jumlahnya meningkat menjadi 669 ton pada 2017. Namun, permintaan untuk medis dan ilmu pengetahuan tak meningkat, hanya 420 ton sejak 2016.

Ada ketimpangan penggunaan morfin di dunia. Secara umum, total produksi opium, bahan pembuat morfin, mencapai 566 ton setara morfin (tons of morphine equivalent) pada 2016. Jumlahnya meningkat menjadi 669 ton pada 2017. Namun, permintaan untuk medis dan ilmu pengetahuan tak meningkat, hanya 420 ton sejak 2016.

Di Indonesia, kenyataannya makin jomplang. Menurut Badan Pengawas Narkotika Internasional (INCB), negara ini masuk jajaran peringkat rendah rata-rata konsumsi analgesik opium di Asia pada 2011-2013. Tingkat konsumsinya, yang kurang dari 100 dosis harian untuk keperluan statistik (S-DDD), dianggap

“sangat tidak memadai.”

Salah satu penyebab kondisi itu, menurut dr. Edi, karena pengetahuan yang minim dari tenaga kesehatan, sehingga resep morfin dinomorduakan.

Meski semua dokter dapat meresepkan morfin untuk kebutuhan medis, faktanya ada rumah sakit yang hanya mengizinkan resep tersebut diberikan oleh dokter spesialis tertentu. Selain itu, morfin medis hanya dapat dijumpai di beberapa rumah sakit, dan menjadi barang langka di apotek karena restriksi yang ketat dalam aturan narkoba di Indonesia.

Selain itu, pasien maupun keluarga pasien kerap menolak resep morfin. Kebanyakan karena terkait pengetahuan yang minim plus anggapan terlarang menurut agama.

Dr. Edi pernah menangani pasien kanker otot polos. Ia meraung kesakitan tetapi tawaran penggunaan morfin medis ditolak oleh sang keluarga pasien. Si anak terus-menerus berteriak menahan sakit, sementara orangtuanya tampak tenang. Pemandangan macam ini bikin dr. Edi merasa pilu.

“Kita seharusnya bersyukur Tuhan memberikan morfin sebagai obat paling indah karena tak ada dosis maksimalnya,” ujar dr. Edi



Fabio Maria Lopes Costa

Harian Kompas

Ia merupakan alumni Universitas Widya Mandira Kupang dan saat ini berdomisili di Jayapura. Saat ini bekerja sebagai Wartawan Harian Kompas sejak tahun 2012.

BENCANA KESEHATAN DI ASMAT

Dipublikasikan di Harian Kompas pada Sabtu, 13 Januari 2018

Oleh Fabio Maria Lopez Costa

Sebanyak 24 anak di Asmat meninggal akibat campak dan gizi buruk. Kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat, terutama dalam hal layanan dasar, termasuk kesehatan.

AGATS, KOMPAS — Sebanyak 24 anak meninggal akibat kejadian luar biasa campak disertai gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, dalam empat bulan terakhir. Jumlah korban bisa bertambah karena Pemerintah Kabupaten Asmat masih melakukan pendataan.

Berdasarkan pemantauan Kompas di Rumah Sakit Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, Jumat (12/1), terdapat 12 anak berusia di bawah lima tahun (balita) dirawat. Tubuh mereka kurus dengan kondisi kesehatan belum stabil. Salah satu di antara mereka adalah Theresia Bewer (4), bocah asal Kampung Beritem, Distrik Agats. Berat badan Theresia cuma 10 kilogram. Ia terserang campak disertai radang paru-paru.

Pihak rumah sakit berupaya optimal merawat anak-anak itu, antara lain dengan memberikan makanan tambahan berupa biskuit khusus anak dan susu. Pasien juga mendapatkan cairan infus dan oksigen.

Kondisi dan jumlah tempat tidur memadai. Ada tiga bangsal dan dua ruangan khusus untuk merawat pasien. Di setiap bangsal terdapat dua hingga tiga pasien. Adapun ruang khusus, yakni VIP dan HCU (*high care unit*), dihuni empat anak yang kondisi kesehatannya belum stabil.

Martha Ponam (30), warga Distrik Pulau Tiga, menuturkan, dirinya telah kehilangan tiga anak akibat campak, Desember lalu. Saat ini, Martha mendampingi dua anaknya yang dirawat di RS Agats karena campak, yakni Yusuf (3) dan Balter (2).

Ibu dari tujuh anak itu mengatakan kesulitan membawa anaknya ke puskesmas di Nakai untuk imunisasi karena jaraknya jauh. Dengan kapal cepat, waktu tempuhnya dua jam.

Data 24 korban meninggal akibat kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk dihimpun dari laporan tokoh agama di Asmat dan tenaga medis RS Agats.

Pastor Hery Nahak dari Keuskupan Agats yang bertugas di sejumlah kampung Distrik Pulau Tiga mengungkapkan, dari 23 korban meninggal di distrik itu, 8 anak berasal dari Kampung Kapi dan 15 anak dari Kampung As dan Kampung Atat. Satu anak meninggal di RS Agats.

"Para korban berusia 1-3 tahun," ujarnya.

Dokter di RS Agats, Carol Jaqueline, mengatakan, satu anak yang meninggal, Minggu (7/1), di rumah sakit itu karena gizi buruk. "Ia meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis," katanya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat Steven Langi mengatakan, ke-12 anak yang dirawat di RS Agats itu menderita campak dan gizi buruk serta penyakit lain, seperti tuberkulosis, radang paru-paru, dan malaria.

"Ada tiga anak yang terkena campak dan gizi buruk telah pulang

dari rumah sakit," ujarnya.

Ada lima distrik di pedalaman yang terserang campak dan gizi buruk, yakni Swator, Fayit, Pulau Tiga, Jetsy, dan Siret. Empat tim telah dikirim Pemkab Asmat ke lima distrik itu sejak Selasa (9/1). Selain memberikan bantuan pengobatan dan makanan, tim juga mendata jumlah korban.

Kepala Bidang Pencegahan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Papua Aaron Rumainum mengatakan, KLB campak terjadi di Asmat sejak Oktober 2017. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018, tercatat 171 anak dirawat inap dan 393 anak dirawat jalan di RS Agats karena terkena campak.

Perkuat kapasitas

Kapasitas Pemerintah Kabupaten Asmat dalam menangani masalah gizi buruk dan campak perlu diperkuat. Termasuk pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan penyaluran bantuan kesehatan, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak.

Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Jumat di Jakarta, sebagaimana dimuat di Kompas.id. "Papua, kan, sudah punya otsus (otonomi khusus). Jadi, kepala daerah setempat diharapkan bergerak terlebih dahulu," katanya.

Hal serupa disampaikan Deputy II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Yanuar Nugroho. Terkait masalah gizi buruk dan campak di Papua, Kementerian Kesehatan menjadi sektor pemimpin yang bertugas mengarahkan dan menuntun proses yang harus dilakukan. Namun, sesuai dengan implikasi dari kebijakan otonomi daerah, tanggung jawab awal harus dilakukan oleh pemda.

"Desentralisasi layanan ada pada pemda. Untuk kesehatan, sudah ada anggaran di APBD, termasuk alokasi tenaga kesehatan harus dilakukan oleh daerah," katanya.

Untuk itu, ujar Yanuar, kapasitas pemerintah daerah harus diperkuat, terutama dalam hal layanan dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Dihubungi terpisah, Pembina Wilayah Provinsi Papua di Kemenkes, yang juga Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes Usman Sumantri, menyatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari tim di Papua. Jika dibutuhkan, pusat akan menyiapkan bantuan, baik secara teknis maupun peningkatan kebutuhan gizi.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes Elizabeth Jane Soepardi mengakui, cakupan imunisasi campak untuk anak di Papua masih kecil. Data Kemenkes menunjukkan, cakupan imunisasi di Papua 46,1 persen terhitung sampai November 2017. Jumlah tersebut baru terdata dengan kelengkapan pelaporan sebesar 61 persen.

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Asmat, ada 8.395 anak balita di Asmat, 4.292 laki-laki dan 4.103 perempuan.

BENCANA KESEHATAN DI ASMAT (2)

Tangisan Terakhir Untuk Theresia Bewer

Dipublikasikan di Harian Kompas pada Senin, 15 Januari 2018

Oleh **Fabio Maria Lopez Costa**

Teriakan Fransiska Buarmin memecah ketenangan di Rumah Sakit Agats, Kabupaten Asmat, Papua, tepat pukul 12.00 WIT, Minggu (14/1). Wanita berusia 25 tahun ini tak rela Theresia Bewer, anaknya, meninggal karena masalah gizi buruk dan radang paru-paru.

Tubuh Theresia tengah hari itu telah kaku ditutupi kain putih di kamar jenazah. Fransiska yang telah hidup menjanda sejak tahun lalu itu tak berhenti menangis di samping jenazah anaknya yang baru berusia 3 tahun. Suami Fransiska meninggal karena sakit.

Perjuangan Theresia yang dirawat di RS Agats sejak 7 Januari lalu harus berakhir Minggu siang itu. Bocah malang itu salah satu dari 61 anak yang meninggal karena merebaknya campak dan gizi buruk di Asmat, sejak Oktober lalu hingga kini.

Kondisi tubuh anak keempat dari enam bersaudara ini ibarat hanya kulit berbalut tulang, dengan berat badan hanya enam kilogram. Menurut keterangan tim dokter RS Agats, idealnya berat badan untuk anak usia tiga tahun adalah 15 kilogram.

Sebenarnya, Theresia yang berasal dari Kampung Beriten, Distrik Agats, sudah menderita gizi buruk sejak dua bulan lalu. Namun, tenaga medis yang bertugas di puskesmas pembantu di

kampung itu sering kali tidak berada di tempat.

Ia baru dibawa kerabatnya ke Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dengan perahu motor dalam kondisi sekarat. Waktu tempuh dari Beriten ke Agats yang melintasi Laut Arafuru yang berombak ganas memakan waktu sekitar satu jam.

Pada musim angin barat, selama Desember hingga April, tinggi gelombang laut bisa mencapai dua meter.

"Kami baru membawa dia awal bulan ini setelah mengumpulkan uang dari hasil berjualan udang. Dengan hormat, saya memohon agar Presiden Jokowi (Joko Widodo) membantu kami dengan menyediakan tenaga kesehatan di kampung kami," tutur Marcela Asi, salah satu bibi Theresia, yang sehari-hari tinggal bersama keluarga tersebut.

Meninggal di Perjalanan

Sebelumnya, kejadian serupa menimpa seorang anak di Kampung Atat, Distrik Pulau Tiga, bernama Jackson Beripit. Bocah berusia dua tahun yang sudah menderita gizi buruk selama sepekan ini meninggal di atas perahu motor dalam perjalanan menuju puskesmas di Distrik Sawa Erma, 3 November 2017. Waktu tempuh dari Atat ke Sawa Erma sekitar satu jam.

Di Atat juga tak ada layanan kesehatan. Seorang bidan yang bertugas di puskesmas pembantu di Atat telah pindah ke Puskesmas Nakai di pusat Distrik Pulau Tiga sejak Mei 2017.

"Saya hendak membawa Jackson ke Sawa Erma karena jaraknya lebih dekat. Sementara perjalanan dengan perahu motor menuju puskesmas di Kampung Nakai dapat menghabiskan waktu hingga tiga jam dan biaya sewanya sangat mahal," ucap Xaverius Sanau, ayah mendiang Jackson, saat ditemui di Atat, Sabtu (13/1).

Biaya sewa perahu motor dengan waktu tempuh 1-1,5 jam di daerah itu berkisar Rp 1 juta sampai Rp 2 juta. Sementara biaya

sewa ke kampung yang waktu tempuhnya selama tiga hingga empat jam bisa mencapai Rp 6 juta.

Biaya tersebut tak dapat dijangkau masyarakat pedalaman. Tempat tinggal warga kebanyakan terbuat dari kayu yang disebut befak. Permukiman warga berada di dalam hutan dan pinggir sungai. Jalur transportasi utama di daerah itu sungai.

Mereka tak punya penghasilan tetap karena hanya hidup sehari-hari dari hasil meramu, berburu, serta menangkap ikan gabus dan udang.

"Rata-rata penghasilan warga Atat dan kampung sekitarnya Rp 50.000 per bulan. Karena itu, warga lebih memilih berdiam diri di befak ketika sakit," kata Kepala Kampung Atat Markus Titur.

Minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat selama empat bulan terakhir.

Dari 23 distrik di Asmat, hanya wilayah Agats serta dua distrik lainnya, termasuk Sawa Erma, yang memiliki jaringan telekomunikasi yang baik. Sementara di 20 distrik lainnya, warga tak bisa berkomunikasi via jaringan telepon.

"Kondisi layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan telekomunikasi kampung-kampung di Asmat masih tertinggal. Ketertinggalan itu mencapai 40 persen dari total 224 kampung di Asmat," ujar Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito.

Aloysius menilai kasus KLB campak dan gizi buruk terjadi karena keterlambatan penanganan medis. Keterlambatan disebabkan oleh ketiadaan tenaga kesehatan dan buruknya jaringan telekomunikasi.



Ayu Prawitasari

Harian Solopos

Saat ini bekerja sebagai redaktur muda di Solopos. Selain aktif sebagai jurnalis, alumni Universitas Negeri Solo ini juga merupakan salah satu pengajar di Universitas Sahid Surakarta. Ayu pernah menerima beberapa penghargaan, yang terbaru adalah Juara Harapan Lomba Journalistik Pendidikan Keluarga Kemendikbud Kategori Opini (2020).

Selain itu, dia juga terlibat sebagai penulis untuk karya fiksi berjudul Antologi Cerpen *Riwayat Kota Mati* diterbitkan Taman Budaya Jawa Tengah (2020).

CERITA TENTANG TOILET SEKOLAH (I)

Menahan Pipis, Ngompol, hingga Tak Ganti Pembalut

Dipublikasikan di Harian Solopos pada 19 Februari 2020

Oleh **Ayu Prawitasari**

- Jumlah tenaga pembersih terbatas.
- Sekolah bukan tempat yang nyaman untuk ganti pembalut.

Delapan siswa sekolah dasar bercerita tentang toilet di sekolah mereka. Kebanyakan mengeluhkan toilet yang pesing hingga lantai dan bak mandi yang kotor. Jika tak kepepet, siswa-siswa itu memilih menghindari toilet.

Ibu seorang siswa SD, Sari Wahyu, bercerita tentang anaknya yang belum lama ini ngompol gara-gara tak mau buang air kecil di toilet sekolah yang kotor. “Anak saya bersekolah di SDN Mojosongo 6 [Solo]. Sekolahnya sekarang sedang direhab. Nah, untuk sementara, para siswa menumpang di SDN Mojosongo 3 yang toiletnya kotor sekali. Karena kotor itu akhirnya anak saya menahan pipis sampai pulang. Akibatnya ngompol di sepeda motor,” kata Sari di rumahnya, Sabtu (15/2).

Raffa, si anak, tersenyum malu. “Mau bagaimana lagi. Posing kamar mandinya,” balas dia sambil membuat gerakan menutup hidung.

Toilet di SDN Mojongo 3 memang kurang terpelihara dan tak punya fasilitas pengunci pintu. Begitu yang disampaikan dua siswa SDN Mojosongo 3 Solo, Janan Cahya dan Raisa Putri.

Keduanya adalah siswa Kelas V. “Pesing, kotor, dan kadang ada yang enggak *nyiram* habis buang air besar,” kata Janan. Kalau tak kepepet, keduanya mengaku menghindari toilet.

Namun, Jumat (14/2) pagi itu, Janan memaksakan diri ke toilet karena tak bisa menahan kencing. Apalagi dia habis sakit gara-gara urusan menahan kencing. “Belum lama ini saya dibawa ke RSUD Ngipang. Keluhannya pas pipis rasanya *senut-senut* dan sakit. Kata dokter gara-gara menahan pipis. Mama akhirnya melarang saya menahan pipis dan harus minum banyak air putih,” kata dia.

Raisa sama saja, pernah merasakan sakit gara-gara menahan kencing. “Tiga hari pipis rasanya sakit, kayak Janan. Waktu itu mama panggil tukang pijat. Badan saya dipijat biar enggak sakit. Sejak saat itu saya berjanji tak mau menahan pipis lagi. Kecuali kalau toiletnya benar-benar kotor, ada yang tidak *nyentor* pas buang air besar, misalnya,” kata Raisa.

Di SDN Mojosongo 3 ada enam kamar mandi berjajar. Tiga unit kamar mandi untuk siswa perempuan dan tiga unit lainnya untuk siswa laki-laki. Ukuran kamar mandinya sekitar 2 meter x 1,5 meter. Di tiap kamar mandi ada sebuah bak dan WC jongkok. Tiga kamar mandi perempuan lebih sering digunakan, baik oleh siswa laki-laki dan perempuan.

Meski lebih sering digunakan, namun kondisi tiga kamar mandi perempuan tak bisa dikatakan bersih. Lantai kamar mandi dan baknya berlumut tebal sementara lubang WC kecokelatan. Bau pesing menyengat.

Amar, siswa Kelas IV; Aditya Kelas III, dan Haikal Kelas IV, mengaku lebih nyaman buang air kecil di rumah, sepulang sekolah. Mereka masuk sekolah pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 13.00 WIB. “Kalau kamar mandinya bersih ya mungkin pipis di sini [sekolah]. Tapi, kamar mandinya kan kotor,” ujar Amar. Aditya dan Haikal mengangguk-angguk tanda setuju. Saat buang air kecil, ketiganya memilih kamar mandi perempuan karena lebih bersih.

Menstruasi

Lain lagi dengan cerita Dara, siswa Kelas IV SDN Sekip 2 Solo. Toilet sekolahnya tergolong bersih. “Ada enam kamar mandi di sekolah, tiga untuk laki-laki dan tiga perempuan,” jelas dia. Dengan kondisi toilet yang bersih, Dara bisa buang air kecil dengan nyaman di toilet sekolah.

Namun, untuk urusan mengganti pembalut saat menstruasi, Dara mengaku tak nyaman melakukannya di sekolah. Malu menjadi alasan utama karena banyak siswa laki-laki yang lalu-lalang di sekitar toilet. “Gantinya di rumah saja. Malu. Lagi pula tidak ada teman-teman yang mengganti pembalut di sekolah,” kata dia.

Susilaningsih, ibunda Dara, memaklumi anaknya tak nyaman mengganti pembalut di sekolah. “Saat saya sekolah juga begitu, ganti pembalut di rumah. Bagaimana ya, lebih karena tidak nyaman saja. Di sekolah kan banyak anak laki-laki. Mereka sering menggoda anak-anak perempuan. Membersihkan pembalut itu kan bingung juga. Jadi lebih baik di rumah,” jelas dia.

Bagaimana dengan risiko iritasi dan gatal? Susi mengatakan risiko itu bisa diatasi. Begitu sampai di rumah, Dara diminta langsung mengganti pembalut agar gatalnya tak semakin menjadi.

Mengutip *Roadmap Sanitasi Sekolah* yang diterbitkan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud, 1 dari 6 siswa di Indonesia tak sekolah ketika mengalami menstruasi. Sebesar 2/3 murid perempuan juga tak mau mengganti pembalut selama di sekolah. Umumnya mereka menggunakan pembalut yang sama, beberapa memakai pembalut dobel agar darah tak tembus ke pakaian.

Masih mengutip *roadmap* sanitasi, pembalut seharusnya diganti 3-4 jam sekali. Risiko tak mengganti pembalut menyebabkan bakteri berkembang biak sehingga menimbulkan infeksi pada

saluran rahim. Malas mengganti pembalut juga menyebabkan kulit iritasi dan lecet. Siswa SD di Indonesia, khususnya yang kelas VI, berada di sekolah selama kurang lebih 6 jam.

Kepala SDN Mojosongo 3, Yohanes Suparna, mengatakan upaya menjaga kebersihan kamar mandi menjadi dilema tersendiri. Di sekolah itu hanya ada satu penjaga yang bertanggung jawab atas seluruh kebersihan lingkungan, termasuk juga ruang kelas maupun ruang guru.

“Kamar mandi selalu dibersihkan, tapi kadang ya kelewatan. Masalahnya dengan jumlah siswa yang lebih dari 300 orang dan karakternya pun macam-macam, menjaga kebersihan kamar mandi menjadi tak mudah,” kata dia.

Suparna mengaku selalu berkeliling sekolah untuk memantau keadaan, kamar mandi termasuk di dalamnya. “Pernah saya temukan celana dalam dibuang di lubang WC, tidak tahu sebabnya,” jelas dia.

Saat ini, SDN Mojosongo 3 ketambahan 300 siswa lebih dari SDN Mojosongo 6 yang sekolahannya dibangun. Dengan kondisi itu, Suparna berencana memperbaiki kunci kamar mandi dan menerapkan kerja bakti untuk membersihkan toilet. Kerja bakti itu akan melibatkan siswa maupun guru. Suparna berharap semua warga sekolah punya tanggung jawab menjaga kebersihan toilet.

FASILITAS TERPENUHI, KENAPA MASIH KOTOR?

Dipublikasikan di Harian Solopos pada 19 Februari 2020

Oleh **Ayu Prawitasari**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyusun target pengembangan sanitasi sekolah hingga 2030 mendatang. Dalam *Roadmap Sanitasi Sekolah* yang programnya diselaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tersebut, sebesar 90% jamban sekolah ditargetkan dalam kondisi baik pada 2030 nanti.

Target lainnya adalah 100% sekolah telah memiliki kamar mandi terpisah antara laki-laki dan perempuan, rasio jamban murid dan guru laki-laki adalah 1:140, sementara rasio jamban murid dan guru perempuan adalah 1:25.

Target pada 2030 tersebut, menurut Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Wahyono, sudah dipenuhi Pemkot Solo. Terbukti dana sekitar Rp700 juta untuk rehab toilet pada 2019 dialihkan untuk kegiatan lain karena tidak ada pengelola SD yang mengajukan diri.

Namun, PR selanjutnya setelah fasilitas sanitasi itu terpenuhi adalah pembentukan karakter siswa untuk menjaga kebersihan kamar mandi di sekolah mereka masing-masing. Upaya itu termasuk juga membentuk sudut pandang kepala sekolah maupun guru sebagai contoh maupun pengelola sekolah.

“Tempat yang kali pertama saya dan kepala dinas lihat saat berkunjung ke sekolah adalah kamar mandinya. Belum tentu bagian depan bagus, belakangnya [kamar mandinya] juga bagus. Kalau yang belakang bagus, pasti semua bagus,” kata Wahyono saat ditemui *Espos* di ruang kerjanya, Senin (17/2).

Dari hasil pantauan itu, Wali Kota F.X Hadi Rudyatmo dan Kepala Disdik Etty Retnowati menyimpulkan banyak toilet sekolah yang sangat kurang pemeliharannya. “Pak Wali cari cara supaya pengelola sekolah punya komitmen menjaga kebersihan toilet. Salah satu strateginya adalah Lomba Toilet Bersih. Lomba ini dimulai 4-5 tahun yang lalu,” jelas Wahyono.

Dalam Lomba Toilet Bersih, sekolah yang sudah menjadi pemenang tidak boleh ikut lagi. Sistemnya bergilir sehingga semua sekolah mendapat kesempatan menjadi juara. “Ini kan strategi supaya semua toilet sekolah di Solo menjadi bersih. Siswa berhak untuk sehat dengan mendapatkan toilet yang bersih. Jadi yang di sini [Solo], masalahnya bukan sarana lo. Ada kok sekolah yang baru dibangun, bangunannya masih bagus, tapi toiletnya kotor. Itu hasil pengecekan saya. Menurut saya, kepala sekolah memegang peranan penting dalam menjaga kebersihan toilet sekolah,” kata dia.

Ketua K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kecamatan Pasar Kliwon, Asmuni, menilai kondisi kebanyakan toilet SD negeri tidak begitu bersih. Selain karakter siswa yang bermacam-macam, keterbatasan petugas kebersihan sekolah juga menjadi persoalan. “Sekolah swasta favorit biasanya mengandalkan pihak ketiga untuk membersihkan sekolah. Jadi sekolahan benar-benar bersih. Cara itu sangat benar karena sekolah kan memang tempat siswa belajar kebersihan,” kata dia.

SD negeri, di sisi lain, kesulitan meniru cara sekolah swasta karena dana bantuan operasional (BOS) terbatas. Namun, Asmuni mengusulkan Kemendikbud bersinergi dengan Kemen PUPR untuk mengatasi persoalan tersebut. “Kemen PUPR kan punya program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh, seperti

pendirian MCK komunal hingga pemberdayaan warga. Nah, kenapa yang seperti itu tidak diterapkan di dunia pendidikan agar kepala sekolah, guru, komite, dan anak punya kesadaran,” kata dia.

Usulan lain adalah keterlibatan CSR BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta dalam pemeliharaan toilet sekolah. “Seperti sekolah saya itu kan dapat CSR dari Bank Indonesia untuk rehab toilet. Program yang seperti itu bisa dikembangkan ke sekolah lain.”

Kebersihan Sekolah Tercermin dari Toiletnya

Persoalan Toilet Sekolah dari Kacamata Perguruan Tinggi

1. Akses air dan pencahayaan kurang
2. Toilet kotor dan jumlahnya terbatas
3. Minimnya disiplin siswa dalam menjaga kebersihan toilet
4. Pengelola sekolah belum menganggap manajemen kebersihan toilet sebagai isu penting
5. Toilet laki-laki dan perempuan belum terpisah. Atau jika sudah terpisah pembagiannya tidak dipatuhi
6. Penyakit yang ditimbulkan, seperti cacingan.
7. Perlengkapan toilet belum lengkap seperti bak sampah dan sabun untuk cuci tangan

Solusi untuk Toilet Kotor

(menyesuaikan dengan persoalan di Solo)

Keterlibatan perguruan tinggi (dosen dan mahasiswa) dalam pengabdian masyarakat. Bentuknya sosialisasi, lomba kebersihan, lomba poster, dana hibah untuk melengkapi fasilitas kamar mandi, sampai pemasangan kamera CCTV

Disarikan dari Jurnal:

1. Implementasi Nilai-Nilai Kedisiplinan Siswa Kelas IV SD Unggulan Aisyiyah Bantul, Yoga Dwi Anggara
2. Faktor Risiko Infeksi *Ascaris Lumbricoides* pada Anak Sekolah Dasar di Kota Palu, Made Agus Nurjana
3. Tinjauan Sanitasi Toilet Siswa di Sekolah Dasar Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota

Cimahi, 2016, Sharfina Nisa Hanifah

4. Peningkatan Mutu Physical Evidence di Sekolah Dasar Melalui Gerakan Toilet Ramah Anak, Indah Purnama Sari (*aps*)

Jumlah SD tahun ajaran 2017/2018: 148.981 sekolah

Jumlah siswa SD: 25.486.506 orang SETARA DENGAN 10% total penduduk Indonesia

12,9% atau 19.123 SDN belum punya jamban

31,40% atau 46.458 sekolah punya jamban terpisah dan kondisinya baik.

1 DARI 6 anak tidak masuk 1 hari per bulan karena menstruasi

Roadmap Sanitasi Sekolah Kemendikbud

	Jamban baik (%)	Jamban terpisah (%)	Rasio jamban murid dan guru laki-laki	Rasio jamban murid dan guru perempuan
2016	22	65	1:93	1:86
2019	50	70	1:80	1:40
2024	75	85	1:60	1:40
2030	90	100	1:40	1:25

Sumber: Roadmap Sanitasi Sekolah Kemendikbud (*aps*)



Fadiyah

Tirto.id

Fadiyah saat ini bekerja di Traction Energy Asia, lembaga non-profit yang memiliki fokus pada isu minyak sawit dan biodiesel di Indonesia.

Gadis yang di waktu senggangnya gemar menulis cerita pendek ini, juga merupakan jurnalis lepas yang berbasis di Jakarta yang banyak menulis tentang isu hak asasi manusia, lingkungan dan gender. Beberapa karya liputannya sudah dipublikasikan di Tirto.id, Tempo.co, Tempo Magazine, Pikiran Rakyat, Whiteboard Journal, New Naratif, dan The Initium (media berbasis digital yang berbasis di Hong Kong).

Selain itu, Fadiyah merupakan anggota divisi gender Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta sejak tahun 2019.

IMUNISASI MR YANG GAGAL CAPAI TARGET BERDAMPAK KE ANAK DENGAN HIV

Dipublikasikan di Tirto.id pada 7 Desember 2019

Oleh **Fadiyah**

Magda, 9 tahun, bukan nama sebenarnya, awalnya memiliki kekebalan tubuh yang rendah akibat positif mengidap HIV (Human Immunodeficiency virus). Saat jumlah virusnya meningkat, tubuh Magda mudah berdarah dan kakinya lumpuh.

Namun ibu kandung Magda, Mira (40 tahun), meyakinkan anaknya untuk terus mengonsumsi obat yang dapat memperlambat perkembangan virus yakni antiretroviral (ARV). Mira menyampaikan kepada anak perempuannya itu untuk mengonsumsi ARV setiap hari demi menjaga kesehatan.

Secara perlahan, angka virus HIV dalam tubuh Magda turun serta kekebalan tubuhnya meningkat. Magda kini dapat berjalan, bahkan bermain berlari bersama teman-teman sebayanya. Seiring dengan naiknya kekebalan tubuhnya, Magda diperbolehkan oleh dokter untuk menerima imunisasi campak atau measles dan rubella (MR).

“Imunisasi sudah diberikan, sudah lengkap. Imunisasi yang terakhir cacar dan polio, terus satu lagi rubella,” ungkap Mira kepada reporter Tirto saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/11/2019) lalu.

Meski begitu, tak semua anak pengidap HIV bisa diberikan imunisasi MR. Ketua Panlu HIV AIDS PIMS Samsuridjal Djauzi

mengatakan anak-anak dengan kadar virus HIV yang tinggi tak bisa diimunisasi. Pasalnya, imunisasi MR bekerja dengan cara menginjeksi virus yang telah dilemahkan dalam tubuh anak.

Samsuridjal menjelaskan saat disuntikan pada tubuh anak dengan sistem imun yang baik, maka tubuh akan kebal terhadap virus MR. Namun, saat virus tersebut disuntikan pada anak dengan imun yang lemah, maka virus tersebut malah membuat anak sakit.

“Untuk anak-anak yang HIV, terutama karena kekebalannya turun, itu vaksin yang hidup, perlu konsultasi dulu dengan dokter anaknya. Karena harus dilihat manfaat dan risikonya,” jelas Samsuridjal kepada reporter Tirto saat ditemui di Gedung Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, pada Rabu (27/11/2019).

Samsuridjal menuturkan kekebalan tubuh anak dengan HIV bisa ditingkatkan dengan meminum obat ARV secara teratur. Atas dasar itu, dia menekankan pentingnya penyediaan ARV untuk menurunkan angka virus pada anak-anak pengidap HIV, sehingga mereka bisa menerima imunisasi MR.

“Kami menginginkan anak-anak ini bisa kekebalan tubuhnya naik dengan meminum ARV, sehingga nanti bisa dipertimbangkan untuk imunisasi,” tutur Samsuridjal.

Masalahnya, akses ARV dengan dosis anak masih sulit dan sangat terbatas. Hal itu membuat Manajer Advokasi Lentera Anak Pelangi (LAP), lembaga yang berfokus pada anak dengan HIV, Natasya Sitorus kecewa. Perempuan yang akrab disapa Tasya itu pun mengecam sikap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono yang tak mempermasalahkan sulitnya akses obat ARV yang dikhususkan untuk anak-anak.

“Kecewa ketika negara menggampangkan penyediaan ARV untuk anak. Anak itu bukan manusia dewasa versi mini. Mereka juga manusia yang punya hak atas kesehatan,” ujar Tasya kepada Tirto saat ditemui di kantor LAP, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019) lalu.

Menurut Tasya, saat ini kebanyakan anak dengan HIV

di Indonesia mengonsumsi ARV untuk dewasa. Tasya menunjukkan bentuk tablet ARV untuk dewasa yang biasa diberikan untuk anak. Tablet tersebut tak memiliki garis potong, sebagaimana tablet obat pada umumnya.

“Saat enggak ada garis potong, itu enggak boleh dipotong, karena belum tentu setiap sisinya mengandung dosis yang sama. Nah, obat-obat yang didatangkan dari India, bahkan yang diproduksi Kimia Farma, itu enggak ada garis potongnya,” jelas Tasya.

“Coba bayangkan anak usia 3 tahun, berat badan cuma 20 kg, tapi dosis obat dia sepertiga. Bagaimana caranya seorang nenek yang matanya sulit melihat, motong sepertiga?” tanya Tasya.

Saat dikonfirmasi reporter Tirto, Kamis (5/12/2019), Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono mengakui pemerintah kesulitan menyediakan ARV khusus untuk anak.

Anung berdalih angka anak dengan HIV di Indonesia masih kecil. Berdasarkan catatan terakhir Kemenkes, terdapat sekitar 10.642 anak berusia 0-14 tahun yang hidup dengan HIV di Indonesia.

“3000 untuk seluruh Indonesia. Kalau kamu punya pabrik martabak gitu, mau menyediakannya 3000 untuk seluruh Indonesia? Mau bangun pabrik hanya untuk 3000 orang di Indonesia?” kata Anung.

Saat ditanya soal perlindungan dari virus campak dan rubella terhadap anak dengan HIV, selain dengan pemberian ARV, Anung hanya mengatakan perlu ada dorongan atau motivasi yang lebih tinggi. “Memotivasi untuk diimunisasi semaksimal mungkin,” ujarnya secara singkat.

Pemerintah Abai terhadap Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan menargetkan setidaknya 95 persen dari anak berusia 9 bulan sampai dengan 14 tahun mendapatkan imunisasi campak atau measles, dan rubella (MR) pada Agustus hingga September 2018 lalu.

Namun, sekalipun waktunya telah diperpanjang hingga Oktober 2018, realisasi dari vaksinasi tersebut bahkan tak mencapai 70 persen. Bahkan, di sejumlah daerah, angkanya sangat kecil. Aceh hanya mencapai sekitar 11 persen.

Menurut Spesialis Komunikasi untuk Pengembangan UNICEF Indonesia Rizky Ika Syafitri, anak-anak pengidap HIV merupakan kelompok rentan yang terdampak gagalnya target imunisasi MR. Rizky beralasan tujuan dari imunisasi MR bukanlah kekebalan perorangan, melainkan kekebalan kelompok.

“Imunisasi adalah intervensi public health, makanya yang dikejar adalah kekebalan kelompok. Kalau gak 95 persen, kekebalan kelompoknya nggak tercapai. Jadi untuk individu yang diimunisasi itu mendapatkan keuntungannya, tapi tidak untuk public health,” kata Rizky saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu (22/11/2019).

Rizky menegaskan imunisasi merupakan bentuk implementasi dari hak anak yang diatur dalam Konvensi Anak Tahun 1989, serta telah diratifikasi dalam Turunannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Hak anak untuk hidup atau survive. Nah, imunisasi salah satu pemenuhan hak kesehatan untuk hak hidup,” kata dia.

Dengan begitu, anak-anak yang hidup dengan HIV pun memiliki hak untuk menerima perlindungan dari campak dan rubella. Salah satu cara untuk melindunginya adalah dengan membentuk kekebalan kelompok tersebut.

“Sehingga anak-anak yang rentan, yang angkanya di bawah 5 persen, tetap dapat terlindungi dari campak dan rubella,” imbuhnya.

KISAH IBU & ANAK DENGAN HIV: DIJAUHI KELUARGA, DIRUNDUNG DI SEKOLAH

Dipublikasikan di Tirto.id pada 18 Desember 2019

Oleh **Fadiyah**

Tidak mudah bagi Ratna, bukan nama sebenarnya, untuk menerima keadaan bahwa dirinya positif mengidap HIV (Human Immunodeficiency Virus). Makin berat lagi bagi Ratna lantaran anak perempuannya juga positif HIV. Perempuan 40 tahun itu enggan mengungkapkan status tersebut secara terbuka. Ia hanya menceritakannya kepada keluarga dan teman-teman dekat saja.

Keraguan Ratna memuncak saat mengetahui temannya bernama Lani (42) bersama bayinya yang sama-sama mengidap HIV hampir meregang nyawa lantaran mendapat stigma dan diskriminasi. Ratna mengatakan Lani sempat tinggal tak jauh dari rumahnya.

“Dulu saya yang nawarin buat tinggal dekat sini. Cuma ternyata dianya cerita ke salah satu tetangganya kalau dia dan bayinya HIV,” kata Ratna kepada reporter Tirto saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/11/2019) lalu.

Kabar terkait Lani dan bayinya positif HIV tersebar ke tetangga-tetangga lainnya. Sebagian warga pun menganggap keberadaan

Lani beserta bayinya dapat menyebarkan virus HIV di lingkungan tersebut.

“Akhirnya, pada berencana buat bakar rumahnya malam-malam. Untung ada salah satu tetangganya yang ngasih tahu, jadi dia keburu kabur duluan sama bayinya,” kisah Ratna.

Selepas mengakui positif HIV kepada keluarga, Ratna mengaku dijauhi kakak-kakaknya. Bahkan anak-anak mereka tidak diperbolehkan mendekati anaknya Ratna lantaran dianggap berbahaya.

“Mereka soalnya enggak paham kalau enggak segampang itu juga buat nularin ke orang. Tapi ya sudahlah, yang penting orangtua saya masih menerima,” ungkapnya.

Ratna mengatakan hingga saat ini tak satu pun tetangganya yang mengetahui ia dan anaknya mengidap HIV. Ia mengaku amat berhati-hati dalam menyampaikan statusnya kepada orang lain.

Anaknya Ratna, Milea (9 tahun), bukan nama sebenarnya, juga mengalami diskriminasi saat mengakses pendidikan di sekolah. Ratna bercerita, awalnya Milea disekolahkan di sekolah umum. Namun Milea kerap dirundung teman-teman dan gurunya karena sulit berjalan. Atas dasar itu, Ratna memindahkan Milea ke sekolah berkebutuhan khusus.

“Di sekolah baru, Alhamdulillah, dia lebih betah. Fokus juga sama pelajaran yang diajarin, terutama dalam prakarya. Maju ke panggung, dia juga menang juara empat, tapi dari ratusan murid,” kata Ratna sembari tersenyum.

Ibu dan anak-anak dengan HIV hidup dalam bayang-bayang stigma, mengalami diskriminasi, serta kerap kesulitan mengakses layanan kesehatan. Menurut Manajer Psikososial Lentera Anak Pelangi (LAP) Riama Siringo, ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Pertama, ada anggapan bahwa ibu yang terkena HIV bukan perempuan baik-baik.

Kedua, HIV dianggap mudah untuk ditularkan. Stigma itu bahkan melekat ke sebagian petugas pelayanan medis. Hal itu membuat ibu dan anak enggan mengakses layanan kesehatan.

“Masih terdapat orang pelayanan yang mempertanyakan: kamu pasti bukan perempuan baik-baik sampai anak kamu positif,” kata Riama saat dihubungi reporter Tirto, Minggu (9/12/2019) lalu.

Tak hanya itu, Riama juga menemukan sejumlah kasus di mana sang ibu belum menerima dirinya positif HIV. Hal itu membuat sang ibu memilih untuk tidak berobat, tetapi mendahulukan anaknya.

“Akhirnya, anaknya sembuh, si ibu kondisinya drop, baru menyadari bahwa dia juga butuh pengobatan,” ujar Riama. “Walaupun sebenarnya juga sudah terlambat, karena ia sudah mengalami kondisi infeksi oportunistik. Kalau misalnya lebih awal, si ibu tak perlu mengalami itu,” imbuhnya.

Kekhawatiran akan stigma yang masih kuat di masyarakat juga kerap kali membuat orangtua enggan untuk menyampaikan status HIV kepada anak-anak. Menurut Riama, hal itu justru menghalangi hak anak untuk mengetahui status kesehatannya.

“Dalam beberapa kasus kan mereka memang dikeluarkan dari sekolah, atau mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari guru, atau teman sekolah. Nah, itu akhirnya membuat anak tidak nyaman dan tidak mau bersekolah ketika dia mendapatkan bully,” ungkap Riama.

Riama menilai sejumlah langkah perlu diambil pemerintah untuk meruntuhkan stigma masyarakat seputar HIV. Langkah yang paling penting adalah penyebaran informasi yang tepat mengenai HIV itu sendiri. Edukasi yang minim soal penyebaran HIV menjadi faktor tingginya stigma serta diskriminasi kepada ibu dan anak dengan HIV.

“Edukasi ke masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, itu masih

harus terus dilakukan secara massif. Saat melihat isu kesehatan lain, misalnya stunting, banyak kampanye dan sosialisasi yang besar, akhirnya stunting bisa menurun,” jelas Riama.

“Dalam isu apapun, itu bisa sebetulnya. Nah, kini bagaimana membawa isu HIV menjadi isu yang mendapatkan perhatian bagi masyarakat luas karena kasihan kan malah anak-anak lagi yang terkena HIV,” tambahnya.

Riama melihat bahwa pemerintah sudah memiliki program untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. Namun, program tersebut seolah berjalan dengan “sembunyi-sembunyi” karena belum dikampanyekan atau diiklankan secara massif. Hal itu membuat orang-orang yang mengetahui informasi soal HIV hanya kelompok tertentu saja.

“Tapi bagi orang-orang awam yang belum terpapar informasi soal HIV, mereka belum tentu mau mencari informasi atau terpikirkan apa saja yang berisiko menularkan HIV,” kata Riama.

Saat ditanya mengenai langkah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangkis stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anung Sugihantono mengatakan hal itu bukan hanya tanggung jawab kementerianya.

“Ya jangan nanya Kemenkes, yang bikin statement [terkait stigma terhadap HIV] kan bukan Kemenkes,” ujar Anung kepada reporter Tirto saat dihubungi, Kamis (5/12/2019) lalu.

“Teman-teman daerah [pemerintah daerah] kan juga harus bertanggung jawab memberitahukan ke masyarakat,” imbuhnya.

MENYIBAK SEBAB TINGGINYA PENULARAN HIV PADA IBU RUMAH TANGGA

Dipublikasikan di Tirto.id pada 6 Januari 2020

Oleh **Fadiyah**

Suksma Ratri (44) tertular HIV dari mantan suaminya pada 2006, ketika mereka telah berpisah. Waktu itu Ratri mendapat kabar kalau pada tubuh mantan suaminya itu ditemukan virus HIV.

“Gue langsung disuruh cek, anak gue yang saat itu baru umur sekitar dua tahun pun disuruh cek. Hasilnya gue positif, anak gue negatif,” kata Ratri saat ditemui di salah satu kafe di Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019) malam. “Gue emang tahu banget, mantan suami gue dulu suka nyuntik dan ganti-gantian pakai jarum suntiknya.”

Kisah lain datang dari Mira (40), bukan nama sebenarnya. Ia tahu sedang hidup dengan virus HIV saat tengah hamil. Saat itu, usia kandungannya empat bulan.

“Waktu itu ketahuan karena [suami] divisum saat lagi sakit. Dari situ, baru ketahuan kalau dia punya HIV. Baru saya periksa darah, ternyata tertular. Tapi waktu itu saya belum mengalami dampaknya, jadi harus cepat-cepat pakai obat supaya menekan si virus,” ujarnya kepada reporter di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/11/2019).

Tahun 2009 menjadi tahun yang berat bagi Mira. Suaminya meninggal akibat HIV, serta berbagai penyakit yang menyusul kemudian, tanpa penanganan yang tepat. Ia merasa sedih sekaligus marah karena tak tahu suaminya itu HIV. "Saya juga, kan, dijodohin sama dia. Malah nambah beban saya aja," katanya.

Kondisi Mira semakin berat karena bayinya ternyata juga tertular. Bayinya terus sakit-sakitan sejak berumur satu bulan dan sempat dirawat di ICU.

"Dokter menyarankan untuk kontrol beberapa kali dalam waktu satu bulan karena kakinya mengalami kelainan. Jadi kami kaget selaku orangtua. Mana waktu itu, suami saya sudah meninggal," katanya.

Mira baru dapat merawat sang bayi dengan tenang selepas mendapatkan informasi terkait HIV. Mira merasa tak pernah mendapatkannya secara utuh dari petugas medis yang menangani dia serta anaknya.

Ia bahkan punya pengalaman buruk dengan petugas medis. Saat itu seorang dokter menyarankan si bayi menghentikan antiretroviral (ARV) secara rutin. ARV adalah obat yang dapat menekan--bukan menghilangkan--virus HIV dalam tubuh seseorang.

Mira mengikuti anjuran sang dokter. "[Saat itu] tidak tahu kalau obat itu tak boleh diberhentikan." Akibatnya fatal. Setelah enam hari tak mengonsumsi ARV, si bayi "kulitnya hancur, keluar darah, kukunya copot."

"Saya akhirnya kembali ke dokter itu. Eh, dokter itu cuma minta maaf," lanjutnya.

Ia sempat mau menuntut dokter tersebut. Namun orangtua Mira menyarankan untuk tak melakukannya karena khawatir tak ada dokter lagi yang mau menangani sang bayi.

Selepas itu, dosis obat ARV untuk bayi Mira dinaikkan. “Jadi dosisnya dewasa, karena virusnya itu enggak mempan dikasih yang dosis anak-anak.”

Ratri dan Mira hanya dua dari belasan ribu ibu rumah tangga (IRT) pengidap HIV positif di Indonesia. Menurut UNAIDS dan Kemenkes, di semester awal 2019, ada 16.844 IRT yang positif AIDS di Indonesia. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan profesi lainnya. Ia bahkan lebih tinggi ketimbang pekerja seks yang ‘akrab’ dengan stigma pengidap HIV, yakni 3.499 orang.

Kemudian, jumlah anak berusia 0 hingga 14 tahun yang positif HIV, berdasarkan data Kemenkes, adalah 10.642. Sementara menurut UNAIDS, ada 3.000 kasus HIV baru pada anak setiap tahunnya. Menurut laporan UNAIDS, penularan HIV dari ibu ke anak umumnya terjadi pada tiga tahapan: ketika masih dalam janin, saat melahirkan, atau ketika menyusui.

Sebagai catatan, angka-angka tersebut diperoleh dari jumlah orang yang telah mengakses layanan kesehatan. Dengan demikian, mungkin saja jumlah ibu dan anak yang positif HIV lebih banyak dari itu.

Berdasarkan data Kemenkes (1987-2019), faktor penyebaran HIV terbanyak di Indonesia adalah hubungan seksual berisiko kelompok heteroseksual, yakni sebesar 70,2 persen.

Menurut Ratri, sekarang masyarakat lebih dapat menerima orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dibanding belasan tahun lalu, saat dia pertama kali tahu mengidap HIV. Hal ini karena upaya para pegiatnya untuk memberikan pemahaman terus-menerus kepada masyarakat. Namun itu belum cukup, katanya.

Saat ini yang jadi permasalahan adalah masih kentalnya pandangan mengotak-ngotakkan para pengidap HIV berdasarkan jenis pekerjaan atau perilaku tertentu.

“Sekarang, masyarakat masih menciptakan stigma HIV terhadap kelompok tertentu saja, kayak LGBT dan PSK (pekerja seks

komersial). Lha, gue apa?" ujarnya sembari tertawa kepada saya.

Pengelompokkan tersebut tidak masalah sepanjang hanya untuk kebutuhan data/statistik. Masalah baru muncul ketika hanya kelompok tertentu saja yang diprioritaskan mengikuti program-program terkait HIV. "HIV bisa mengintai siapa saja," kata Ratri.

"Makanya, pengetahuan soal HIV perlu untuk terus disebarluaskan, supaya enggak semakin tinggi. Jangan dibatasi-batasi hanya untuk kelompok tertentu."

Lebih dalam dari itu, menurut Manajer Advokasi Lentera Anak Pelangi (LAP), nama untuk program pendampingan anak yang terdampak HIV dan AIDS di DKI Jakarta, Natasya Sitorus, pengkotak-kotakan tersebut turut berkontribusi terhadap penularan HIV ke ibu rumah tangga.

Ibu rumah tangga yang tak diprioritaskan dalam program pencegahan/penanggulangan HIV membuat mereka tak punya pengetahuan soal penyakit ini.

"Pelanggan pekerja seks dan ibu rumah tangga tidak menjadi target. Pemerintah luput. Programnya masih fokus ke pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan LGBT," kata Natasya kepada reporter Tirto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).

Angka penularan HIV pada pekerja seks lebih kecil, Natasya menegaskan, lantaran kelompok tersebut sudah terinformasi dengan baik. Mereka, misalnya, sudah tahu betul bahwa untuk mencegah HIV, perlu kondom saat berhubungan seks.

"Pekerja seks sudah mencegah agar ia tidak tertular dan tidak menularkan, tapi laki-laki yang bermain dengan pekerja seks tidak," kata Natasya.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Studi Infeksi Menular Seksual Indonesia (KSIMSI) Hanny Nilasari menyampaikan salah satu hambatan mencegah penularan HIV ke ibu rumah tangga ada pada pasangan mereka. Menurutnya saat ini pasangan si

ibu rumah tangga kerap dengan sengaja tidak memberitahu kalau dia terkena HIV--atau menurut Hanny, memberi mereka 'notifikasi'.

"Kami menemukan kasus infeksi menular seksual, tentunya kami menyampaikan bapak atau ibu harus menyampaikan kepada pasangan, kemudian pasangannya diajak berobat. Nah, itu yang sulit terjadi," jelas Hanny, Rabu (27/11/2019).

Memang bisa saja si perempuan yang menularkan virus itu ke laki-laki dan tak memberitahu pasangannya, dalam konteks rumah tangga. Tapi menurut Hanny lebih banyak laki-laki yang melakukan itu.

"Itulah mengapa angka ibu-ibu (terinfeksi HIV) menjadi tinggi. Pasangannya tak mau menyampaikan bahwa dirinya berisiko secara seksual, belum lagi jika ia tak memakai kondom, jadi infeksiya masuk," lanjutnya.

Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan instansinya biasanya melakukan tes HIV ke ibu hamil.

"Begitu ditemukan ibu hamil atau partner seksualnya [mengidap HIV] positif, ya diobati," kata Anung kepada reporter Tirto saat dihubungi pada Kamis (5/12/2019).

Hal lain adalah penyediaan fasilitas tes HIV bagi mereka yang mau menikah. Tapi ini bukan kewajiban. "Kalau pemeriksaan enggak bisa dipaksa. Kalau konseling sebelum nikah, kan, sudah program," ujar Anung.

Menurut Koordinator Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jakarta, Nining Ivana, pendekatan tersebut sama sekali tidak cukup.

"Harusnya ada kolaborasi antara Kemenkes dengan pemerintah daerah, bagaimana informasi HIV itu bisa sampai ke ranah yang paling domestik, yakni ibu rumah tangga," ujar Nining kepada

reporter Tirto saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019) malam.

Menurutnya, ada banyak hal dapat dilakukan pemerintah untuk menangani masalah HIV di ibu rumah tangga. Hal-hal ini dapat dilakukan “kalau saja dana-dana itu digunakan dengan benar.” Salah satu yang dapat dimanfaatkan adalah juru pemantau jentik (Jumantik) yang tersebar di posyandu.

“Seharusnya, pemerintah bisa meng-upgrade ini, sehingga tak hanya bicara soal demam berdarah atau stunting terhadap bayi saja,” kata Nining.

Kemudian, pemerintah juga perlu membantu mengurangi stigma bahwa HIV hanya menyasar kelompok tertentu.

“Kalau pemerintah memang serius dan melihat ini sebagai masalah bersama, bukan hanya masalah teman-teman minoritas, kita akan berhasil menanggulangi ini,” kata Nining, optimis.

JALAN PANJANG & DILEMATIS UNGKAP STATUS HIV POSITIF KEPADA ANAK

Dipublikasikan di Tirta.id pada tanggal 7 Januari 2020

Oleh **Fadiyah**

“Bu, kenapa sih, aku harus makan obat ini melulu?” Tanti, bukan nama sebenarnya, suatu hari bertanya pada ibunya.

“Ini obat biar bikin cantik.” Melanie (40), juga bukan nama sebenarnya, membalas pertanyaan anaknya dengan sabar.

“Tapi kok aku gak jadi cantik-cantik sih, Bu?”

“Ya, kan nanti. Sabar. Ini obat juga yang bikin kamu jadi sehat. Kamu jadi bisa jalan karena makan obat ini. Enggak enak kan, dulu harus selalu pakai penyangga kaki buat jalan?” kata Melanie lagi.

Dengan berat hati dan wajah cemberut, Tanti pun menelan obat tersebut berikut jawaban dari ibunya. Jawaban yang menurut jalan pikir bocah 9 tahun seperti dirinya masih jauh dari memuaskan.

Bukan sekali dua, pertanyaan itu diajukan Tanti, melainkan sudah berulang kali setidaknya sejak usianya masih 7 tahun. Dan hingga kini, Melanie masih belum memberikan jawaban yang sebenarnya.

Tak hanya merepet dengan pertanyaan yang sama bertahun-tahun, Tanti pun terus mengeluhkan obatnya yang pahit bukan main. Bahkan, ia sempat muntah selepas menelan obat tersebut

karena rasa pahit yang menempel di lidahnya.

Obat yang diminum Tanti setiap pukul 7 malam, dan setengah 7 pagi, sebelum berangkat sekolah adalah Antiretroviral (ARV). ARV merupakan jenis obat untuk menjaga imun agar tak terserang virus HIV dan harus dikonsumsi tanpa putus seumur hidup.

Tanti terlahir dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV dalam tubuhnya. Saat itu, sekitar tahun 2009, Melanie tengah hamil empat bulan. Selepas melahirkan, ia baru mengetahui bahwa bayinya terinfeksi HIV. Lantaran virus di tubuhnya itu, Tanti sempat tak bisa berjalan untuk beberapa lama. Ia perlu menggunakan alat bantu.

Namun, setelah rutin mengonsumsi ARV, kini Tanti sudah bisa berjalan dan bermain kejar-kejaran bersama kawan-kawannya. Bocah itu belum mengetahui status HIV positif yang dimilikinya. Melanie masih menutupinya dari Tanti, sehingga ia perlu menggunakan sejumlah cara dan argumen agar Tanti tetap meminum ARV.

“Belum (dikasih tahu status HIV) soalnya masih labil. Anak segitu penasaran, tapi kalau dikasih tahu yang jujurnya, suka enggak terima,” ungkap Melanie saat ditemui reporter Tirto di kawasan Jakarta Utara pada Sabtu (30/11/2019).

“Apalagi takutnya nanti malah balik menghujat atau memaki kami, ‘kenapa aku seperti ini?’” lanjutnya.

Kekhawatiran Melanie pun bertambah saat Tanti sempat mengeluhkan bahwa ia secara fisik tidak terlahir seperti artis Korea. Melanie khawatir jika Tanti mengetahui status HIV-nya, kemarahannya justru semakin memuncak.

“Apalagi kalau menerangkan mengapa setiap hari dia harus minum obat. Saya coba berbohong terus,” kisah Melanie.

Kegamangan Melanie dalam memberitahu Tanti soal status HIV positif anaknya itu cukup beralasan. Di satu sisi, ia masih berproses untuk menerima dirinya yang juga positif HIV. Belum lagi, ia harus belajar banyak untuk mengenali diri dan memahami soal virus yang menyerang sistem imun itu.

Di sisi lain, ia juga sedang mengikuti konseling demi berjuang melawan stres yang dimilikinya. Melanie bercerita kepada saya, ia mendapatkan virus itu dari sang suami.

“Waktu itu ketahuannya karena (suami saya) divisum saat lagi sakit. Dari situ, baru ketahuan kalau dia punya HIV. Kemudian baru saya periksa darah, ternyata tertular,” kisah Melanie.

Manajer Advokasi Lentera Anak Pelangi (LAP) Natasya Sitorus menyampaikan bahwa proses penyampaian status HIV anak memang menjadi salah satu tantangan dan hal yang berat untuk dilakukan pengasuh anak tersebut, baik itu orang tua, nenek, atau pihak keluarga yang mengurusnya.

“Anak mau secerdas apapun, tapi kalau ibunya kurang, atau ibunya belum selesai dengan dirinya dalam isu penerimaan diri dengan status HIV, mungkin saja ia belum siap untuk bercerita karena khawatir anaknya mempertanyakan banyak hal yang belum siap untuk ia jawab,” jelas Natasya kepada reporter Tirto pada Jumat (6/12/2019).

“Itu pun tergantung dari caregiver-nya, entah orang tua, atau kakek, atau nenek, yang merawatnya. Ada pula yang sulit untuk mengungkapkan, sehingga butuh penengah, entah dokter, atau pendamping, seperti kami di LAP. Kami membantu menjelaskan HIV itu apa, virusnya seperti apa,” lanjutnya.

Natasya menyampaikan bahwa pengungkapan status HIV idealnya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan usia anak tersebut. Natasya menyebutnya sebagai proses partial disclosure.

“Kalau untuk pengungkapan status itu tidak kaku harus dilakukannya pada usia tertentu. Proses disclosure (pengungkapan) juga bukan peristiwa sekali seumur hidup, tapi adalah proses yang berkelanjutan,” kata Natasya.

“Dari kecil, diajak ngobrol, itu perlu dikasih tahu, tapi tidak langsung dikasih tahu kalau dia terkena HIV. Ya kalau usianya 5 tahun, dia juga tidak bakal mengerti,” lanjutnya.

Natasya menyampaikan contohnya bisa dimulai dari penyampaian informasi bahwa anak tersebut perlu untuk

mengonsumsi obat, yakni ARV, agar tetap sehat. Informasi dapat bertambah dengan penjelasan bahwa dalam tubuh anak tersebut terdapat virus yang bisa membuatnya mudah sakit.

“Makanya, harus minum obat ini supaya virusnya tetap tidur dan tidak merusak kekebalan tubuhmu,” contoh Natasya.

Saat usianya kembali bertambah, bisa ditambahkan dengan informasi bahwa virus tersebut dapat membuat tubuh anak menjadi sakit. Jika tidak diminum obatnya, maka virusnya bisa menjadi kebal, sehingga perlu ditambahkan lagi obatnya.

“Jadi seiring dengan bertambah usia anak, informasi yang diberikan pun harus semakin lengkap. Sampai saat dia masuk ke usia remaja, sudah masuk pubertas. Seperti pada saat remaja perempuan mulai menstruasi, perlu diperkenalkan alat reproduksi dia, bagaimana harus membuang pembalut dia,” jelas Natasya.

“Jadi diperkenalkan bagaimana menjaga agar dia tetap aman, dan bagaimana agar tak menginfeksi orang lain,” lanjutnya.

Pada fase tertentu, saat baik pengasuh ataupun anak, sudah siap, barulah dapat disampaikan informasinya secara utuh. Informasi yang disampaikan berupa bahwa dalam tubuhnya ada HIV, bagaimana ia bisa menularkan ke orang lain dengan perilaku berisiko tertentu, hingga bagaimana ia perlu memilih orang dalam pengungkapan status HIV karena stigma di masyarakat masih besar.

“Kalau remaja, memang sebaiknya informasi-informasi itu sudah masuk. Jangan malah terus menunggu sampai usia dewasa. Jadi memang sebaiknya bertahap dibuka statusnya,” pungkasnya.

Komisioner KPAI Sitti Hikmawati menilai proses pengungkapan status HIV kepada anak memang hal yang penting. Namun, bentuknya bisa fleksibel, serta memang perlu dilakukan secara bertahap.

“Anak memiliki hak untuk mengetahui status kesehatannya. Ia juga kan pasti akan bertanya, mengapa ia diperlakukan seperti itu, harus disuntik, harus menjaga kesehatannya, harus makan obat secara ketat,” kata Sitti kepada reporter Tirto pada Senin (16/12/2019).

“Itu kan, perlu ada pemberian penjelasan. Saya kira, itu perlu diberikan penjelasan yang logis, dengan disesuaikan pada derajat usianya, daripada kita bicara dengan membohongi,” lanjutnya.

Namun, Sitti menilai pengasuh anak juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak dalam proses penerimaan informasinya, baik secara pengetahuan, hingga secara psikologis.

“Perlu dikasih penjelasan yang baik, serta perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Perspektifnya tidak demikian, tetapi perspektifnya, dengan ada tantangan seperti ini, maka ada sedikit perubahan dalam garis kehidupan si anak, termasuk perlu untuk makan obat,” ujar Sitti.

Sitti menilai penguatan anak secara psikologis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Anak perlu mengetahui bahwa ada cara untuk tetap hidup secara sehat dengan virus HIV dalam tubuhnya.

“Seseorang yang sakit bisa menjadi sembuh secara total, ada juga yang tidak. Contohnya, seseorang yang matanya rabun, ia sulit untuk kembali ke semula, tetapi ia bisa menggunakan kacamata untuk tetap bisa melihat,” ujar Sitti.

“Lalu, bagaimana anak-anak ini yang memiliki perbedaan dalam sistem daya tahan tubuhnya. Nah, mari kita carikan ‘kacamata’ yang tepat, yang trendy, justru dengan kacamata lebih baik. Jadi ini bukan hal yang perlu disesali atau apa, tapi ini hal yang bisa dilalui,” lanjutnya.

Lebih jauh lagi, Sitti menilai masalah HIV menjadi hal yang masih terus perlu disosialisasikan. Pasalnya, stigma buruk dan informasi keliru mengenai HIV masih banyak di masyarakat.

“Walaupun anak sudah memahami kondisinya, tapi hal yang terberat tetap stigma masyarakat umum. Jadi yang terdampak adalah anak-anak ini. Jadi ke depannya, bagaimana stigma ini bisa ditekan agar tidak terdampak pada anak-anak dengan HIV ini,” tegasnya.



Frans Labi Kobun

Jubi

Ia merupakan jurnalis Koran Jubi. Pria yang akrab disapa Frans ini, saat ini berdomisili di Merauke.

MEREHABILITASI “ANAK-ANAK AIBON” DI MERAUKE (I)

Diterbitkan di Koran Jubi pada Senin, 17 Februari 2020

Reporter: **Frans L Kobun**

Editor: **Syofiardi**

Anak-anak yang kecanduan mengisap aroma lem kulit atau dikenal dengan ‘lem aibon’ menjadi problem serius di Tanah Papua. Di Kabupaten Merauke misalnya, diperkirakan sedikitnya ada 90 anak yang kecanduan. Pihak yang peduli dan pemerintah kabupaten berusaha menangani mereka.

Jubi menurunkan liputan khusus mengenai upaya merehabilitasi anak-anak tersebut agar tidak semakin kecanduan. Sebab ‘kecanduan aibon’ tidak hanya bisa berdampak kepada kesehatan, tetapi juga masa depan mereka.

Bagian awal tulisan akan dimuat edisi Senin ini dan sambungannya edisi berikutnya, Rabu. Selamat menikmati.

Jubi berkunjung ke rumah kontrakan Polikarpus Boli di Merauke. Dia adalah pendamping puluhan anak usia Sekolah Dasar yang menyalahgunakan aroma lem kulit berwarna kuning yang dikenal sebagai “lem aibon” untuk dihirup.

Di rumah kontrakan tersebut terlihat lima anak duduk di ruang tamu. Dari pandangan sesaat mereka seperti tidak terurus dengan baik. Selain kurang mandi, pakaian yang mereka kenakan juga terlihat kumal.

Ada yang berambut gondrong tak terurus. Juga kondisi fisik mereka yang kurus. Setelah ditanyakan satu-persatu dengan polos mereka mengaku sering mengisap “lem aibon”.

“Lem aibon” diberikan sebagai nama untuk semua merek lem kulit, mengacu kepada nama salah satu merek lem jenis tersebut. Tapi mereka mengaku sering menggunakan lem merek “Fox” dan “Castol”.

Tidak ada di antara mereka yang mau menyebutkan berapa lama telah kecanduan kedua merek lem tersebut, meski Jubi telah berkali-kali menanyakan.

Dari lima anak hanya tiga orang yang mau melayani pertanyaan, seorang berusia 12 tahun dan dua lainnya 10 tahun. Sedangkan dua anak lainnya memilih diam.

Kelima anak ternyata pernah menjadi murid di salah satu SD negeri di Merauke, namun mereka telah berhenti tanpa mau menyebutkan penyebabnya.

Mereka mengatakan lebih memilih mencari kaleng-kaleng bekas dan besi tua untuk dijual kepada penadah. Uang hasil penjualan di antaranya digunakan untuk membeli lem di kios atau toko terdekat.

“Biasanya kami bertiga atau berempat kumpul uang baru beli karena harganya mahal, lalu dibagi dengan mengisi ke kemasan botol Vit yang dipotong pendek,” kata anak yang berusia 12 tahun.

Harga lem Castol Rp13 ribu, sedangkan lem Fox kecil Rp10 ribu hingga yang besar Rp50 ribu. Lem yang telah dimasukkan ke botol Vit disembunyikan ke balik baju, lalu dihirup sembunyi-sembunyi.

“Kadang kami duduk berkelompok dan isap, tetapi kadang juga sendiri-sendiri,” ujarnya.

Menurutnya, sehari mereka bisa membeli lem sampai dua kali. Karena dihirup berulang kali menyebabkan lem cepat habis.

“Kalau beli pagi dan dihirup, siangya sudah habis, kami kumpul uang lagi dan beli untuk dihirup hingga malam sebelum pulang ke rumah,” katanya.

Anak lainnya yang berusia 10 tahun juga mengatakan hal yang sama.

“Kami punya orang tua ada di sini (Merauke-red), mereka tidak tahu kalau kami sering menghirup lem aibon, hanya mendengar dari orang lain, begitu kami pulang ke rumah langsung dipukul dengan batang kayu,” katanya.

Mereka mengaku dengan menghirup lem mereka sering pusing. Bahkan kalau lemnya habis, ulu hati mereka terasa sakit sekali. Namun hanya sesaat, setelah itu mereka kembali membeli dan menghirupnya.

Mereka juga mengaku tidak tahu kapan akan berhenti menghirup lem aibon. Alasannya sudah lama sebagai pengguna sehingga menjadi ketagihan.

“Tidak tahu sampai kapan kami bisa berhenti Om, karena kalau jalan bersama teman-teman lain dan memegang uang, pasti larinya ke kios atau toko membeli lem,” kata anak 12 tahun kepada Jubi.

Polikarpus Boli sudah lebih lima tahun mendampingi anak-anak ketagihan lem aibon di Merauke. Kegiatan pendampingan merupakan program dari SMP/SMA Satu Atap Terintegrasi Wasur yang digagas Sergius Womsiwor.

Menurut Boli pada 2019 terdata 90 anak di Merauke yang ketagihan menghirup lem aibon. Data tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat ke sekolahnya.

“Sedangkan 2020 ini belum dilakukan pendataan, belum diketahui apakah ada penurunan atau penambahan,” ujarnya.

Boli menduga jumlah anak pengguna lem aibon jauh lebih banyak dari yang terdata, bahkan kemungkinan ratusan.

“Kami kesulitan mendata sekaligus mengetahui angka pasti

berapa banyak pengguna lem aibon, data 90 orang itu didapatkan setelah saya menanyakan kepada mereka, juga melihat langsung di beberapa titik yang menjadi tempat mereka berkumpul untuk menghirup,” ujarnya.

Menurut Boli butuh waktu lama untuk memutus mata rantai kebiasaan buruk anak-anak tersebut.

“Saya selalu menyampaikan saat kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang dilakukan setiap sore,” ujarnya.

Selain memberikan penyadaran di sekolah, Boli juga mendatangi rumah anak-anak tersebut di sekitar Pintu Air, Kelurahan Maro untuk menyosialisasikan kepada orang tua mereka bahaya kebiasaan anak-anak mereka.

“Intinya saya menyampaikan dampak dari penggunaan lem akan merusak kesehatan, karena kedua merek lem itu tidak untuk dihirup manusia,” katanya.

Maraknya anak-anak di Merauke menghirup lem aibon membuat sejumlah warga yang peduli mendirikan Forum Peduli Penyalahgunaan Lem (FP2L) Merauke.

Wakil Ketua FP2L Merauke Ana Mahuze kepada Jubi mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki forumnya terdapat kurang-lebih 47 anak pengguna lem aibon di Merauke.

MEREHABILITASI “ANAK-ANAK AIBON” DI MERAUKE (2)

Diterbitkan di Koran Jubi pada Senin, 19 Februari 2020

Reporter: **Frans L Kobun**

Editor: **Syofiardi**

“Melihat banyaknya anak Papua yang menyalahgunakan lem aibon, kami pernah membuat dapur umum, tiga bulan kami memberikan makan gratis kepada mereka,” kata Ana Mahuze.

Program dapur umum tersebut merupakan kerja sama Forum Peduli Penyalahgunaan Lem (FP2L) Merauke dengan Pemerintah Kabupaten Merauke.

“Dengan memberikan makanan rutin tiap hari selama tiga bulan serta penyuluhan pada 2019 agar bisa mengalihkan perhatian anak-anak untuk tidak menggunakan lem aibon lagi,” katanya.

Selain itu, kata Mahuze, forum juga melakukan penyuluhan secara kontinu tentang bahaya mengisap lem.

“Hanya saja usaha yang dilakukan belum terwujud karena ternyata anak-anak masih menghisap lem aibon secara sembunyi-sembunyi, tentu ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagaimana mencari jalan terbaik ke depan,” ujarnya.

Norbertha Sakat, 45 tahun, perempuan warga Merauke mengaku

pernah menampung di rumahnya 25 anak yang sering mengisap lem aibon. Ia mengaku mencoba memberikan pemahaman bahaya penggunaan lem tersebut, namun setelah dua minggu satu-persatu mereka pergi tanpa alasan yang jelas.

“Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin agar mereka menghentikan kebiasaan itu, namun mereka pergi secara diam-diam,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Merauke Yohanes Samkakai mengatakan dinasnya belum memiliki data terbaru anak-anak pengguna lem aibon karena ia baru menjabat. Namun ia mengaku sudah meminta kepada Bidang Rehabilitasi agar secepatnya melakukan pendataan.

Secara umum, katanya, anak-anak pengguna lem aibon berusia Sekolah Dasar. Mereka juga anak Papua yang datang bersama orang tua mereka dari Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi.

Untuk penanganan lebih lanjut, katanya, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Merauke, tetapi sejumlah instansi terkait.

“Nanti setelah data real kami dapatkan akan dipresentasikan kepada Bupati Merauke untuk dicari jalan keluar penanganannya,” ujarnya.

Menurut Yohanes anak-anak pengguna lem aibon menjadi masalah yang tak pernah habis. Salah satu cara agar kebiasaan menghirup lem aibon dihentikan adalah dengan program rehabilitasi.

“Anak-anak itu bukan hanya putus sekolah, tetapi ada juga yang tidak sekolah dan sudah terjerumus pada penggunaan lem aibon,” katanya.

Penyebabnya, kata Yohanes, karena keterbatasan hidup keluarga mereka. Orang tua anak-anak tersebut tidak memiliki pendapatan tetap atau dari keluarga kurang mampu, sehingga

anak mereka tidak bisa diurus dengan baik.

“Dengan demikian mereka pergi ke mana saja tanpa dikontrol, mereka melakukan apa saja di luar untuk mendapatkan uang, setelah itu dimanfaatkan untuk membeli lem sekaligus dihirup,” ujarnya.

Yohanes mengatakan Pemkab Merauke berencana membangun rumah singgah sekaligus tempat rehabilitasi bagi anak-anak aibon. Namun sebelum dibangun perlu kajian akademis yang rencananya akan dilakukan bekerja sama dengan salah satu universitas di Merauke.

Menurutnya rumah singgah penting agar anak-anak yang sudah lama ketagihan bisa ditampung di satu tempat untuk memudahkan pengontrolan sekaligus penyuluhan.

Lalu, bagaimana dampak kesehatan terhadap anak-anak yang biasa menghirup lem tersebut?

Dokter spesialis kejiwaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke, dr. Sukmawati Machmud, M. Kes, Sp.KJ menceritakan pengalamannya menangani seorang pasien anak Papua berusia 10 tahun yang kecanduan menghirup lem aibon.

Dokter Sukma menceritakan awalnya anak tersebut dibawa orang tuanya untuk berkonsultasi ke dokter saraf, karena dia sering emosi dan berhalusinasi mendengar suara.

“Orang tuanya tak bisa atasi lalu dibawa ke rumah sakit, dokter saraf menyarankan langsung ke saya, saat orang tua bersama anaknya datang saya menyampaikan kalau anak tersebut telah menggunakan lem aibon sehingga cepat emosi dan berhalusinasi,” katanya kepada Jubi, Selasa, 18 Februari 2020.

Menurut Dokter Sukma anak tersebut tidak mengaku menggunakan lem, namun ia mengetahui dari orang-orang yang melihatnya sering menghirup lem bersama teman-temannya.

“Anak itu mengalami gangguan jiwa, tapi belum setahun menghirup lem aibon sehingga kerusakan sarafnya belum permanen, jadi masih bisa diobati,” ujarnya.

Setelah ditangani kondisi anak tersebut sudah sehat kembali dan tidak lagi menghirup lem. Selain memberikan obat, Dokter Sukma juga menyampaikan edukasi kepada pasien jika menghirup lem aibon terus maka saraf akan rusak dan bisa menjadi gila.

“Dari situ perlahan dia mulai sadar,” katanya.

Ia juga meminta orang tuanya untuk mengawasi anaknya dengan ketat.

Dokter Sukma mengatakan dampak dari menghirup lem aibon adalah membuat orang teler. Hal itu lebih banyak terjadi kepada anak-anak karena mereka bisa membeli lem ‘Castol’ atau ‘Fox’ di kios maupun toko lantaran harganya sangat murah.

Dengan menghirup lem aibon dampaknya akan merusak paru-paru dan sel-sel otak. Lalu kalau ketagihan maka saraf menjadi rusak dan terjadi gangguan pada hormon otak yang akhirnya menimbulkan gangguan jiwa.

“Pengalaman saya saat menangani orang di Makassar sampai terjadi gangguan permanen, kalau di Papua belum seberapa, tetapi di kota besar lain sudah sampai gangguan jiwa dan menjadi gila akibat kecanduan menghirup lem aibon,” katanya.

Ketika orang sudah teler menggunakan lem tersebut ia akan kehilangan kesadaran.

“Memang kalau orang sudah setahun menggunakan lem aibon dianggap sebagai penyalahgunaan zat dan sulit diobati, kalau di bawah satu tahun masih bisa ditangani,” ujarnya.

Dokter Sukma menambahkan, ketika orang sudah menggunakan lem aibon maka pasti badannya kurus. Sebab nafsu makannya

berkurang, lalu mereka cenderung melakukan tindakan kejahatan karena efek halusinasi.

Ia mendukung rencana Pemkab Merauke membangun rumah singgah.

“Saya kira itu langkah tepat dan harus segera direalisasikan sehingga edukasi dari efek sampingan penggunaan lem aibon dapat disampaikan terus-menerus kepada anak-anak,” katanya.

Selain itu, tambahnya, peran dari orang tua, guru, dan lingkungan sekitar juga perlu.

“Intervensi pemerintah kabupaten juga perlu untuk membatasi anak-anak membeli lem,” katanya.



Erick Tanjung

Suara.com

Saat ini, bekerja sebagai jurnalis di Suara.com sejak 2018. Memiliki pengalaman 4 tahun sebagai jurnalis yang meliput laporan investigatif mendalam tentang isu politik dan hukum, ekonomi, pendidikan dan isu hak asasi manusia.

Pada tahun 2017, Erick mendapatkan sertifikasi jurnalis tingkat madya dari Dewan Pers.

TERANCAH HUKUMAN MATI, KEJANGGALAN PERADILAN BAGI MISPO SI ANAK PAPUA

Diterbitkan di Suara.com pada Sabtu, 29 Februari 2020

Oleh Erick Tanjung

Saya tidak pernah sekolah, tidak bisa baca dan tulis. Saya bukan OPM dan menyerang di Nduga. Saya hanya ingin kembali ke Papua, bertemu mama..."

Suara.com - *Dia terpaksa meninggalkan Nduga, Papua, mengungsi karena perang. Tapi di pengungsian, justru ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Dituduh membantai 17 pekerja PT Istaka Karya, terancam hukuman mati. Mispo sebenarnya masih anak-anak.*

MISPO Gwijangge yang mengenakan rompi merah berlogo tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hanya duduk terdiam di bangku barisan belakang Ruang Sarwata, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 27 Februari 2020.

Sudah hampir empat jam Mispo berada di gedung peradilan yang jauh dari kampung halamannya. Sejak tiba pukul 12.00 WIB bersama sejumlah tahanan lainnya dari Rumah Tahanan Salemba, Mispo tak kunjung dipanggil masuk ke depan meja hijau.

Sore itu, Mispo bersama penerjemah dan kuasa hukum dari Tim Advokasi Papua terus menunggu kedatangan majelis hakim

yang tak juga tampak batang hidungnya.

Mispo terus menunggu sembari duduk. Raut mukanya datar. Tak juga ia banyak berbicara, pun kepada kuasa hukum.

Sekitar pukul 16.00 WIB, barulah petugas memberikan perintah agar Mispo, penerjemah, serta kuasa hukum untuk masuk ke ruang persidangan.

Tak lama Mispo duduk di kursi pesakitan. Panitera melalui pelantang suara memberitahukan, persidangan dibatalkan.

“Persidangan dibatalkan, majelis hakim sudah pulang,” pernyataan pendek panitera yang membuat Mispo terbengong-bengong.

Mispo kecewa, karena sudah lama menunggu persidangan yang bakal menentukan nasibnya: terpenjara seumur hidup di Indonesia, hukuman mati, atau kembali sebagai orang bebas ke kampung halaman.

Sudah lama dia meninggalkan tanah Papua. Lebih dari setahun tidak bersua sang bunda. Selama itu pula mereka sama-sama tidak mengetahui nasib masing-masing. Ibu tak tahu Mispo dibawa ke Jakarta sebagai tahanan.

“Sidang akan dijadwalkan ulang Selasa (3/3) pekan depan,” begitu keterangan panitera.

Sidang yang ditunggu-tunggu Mispo itu beragendakan menjelaskan hasil uji forensik gigi untuk mengetahui usianya.

Warga Distrik Yugi, Kabupaten Nduga, Papua ini ditangkap atas tuduhan terlibat saat peristiwa pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di area proyek Jalan Trans Papua, 2 Desember 2018. Mispo dituduh anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat—sayap militer Organisasi Papua Merdeka, yang melakukan penyerangan di area tersebut karena diduga para pekerja adalah anggota zenii militer.

Belakangan, tim kuasa hukum menemukan bukti Mispo saat peristiwa itu baru berusia 14 tahun, sehingga seharusnya tak bisa diadili. Lagi pula, bukti lain menunjukkan Mispo tak ada di lokasi saat kejadian.

Mispo tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia buta huruf, karena tak pernah bersekolah. Adalah Diaz Gwijangge, yang setelah kasus itu diserahkan polisi ke kejaksaan, menjadi penerjemah bagi Mispo.

“Saya tidak pernah terlibat seperti yang dituduhkan. Saya tidak tahu apa-apa,” kata Mispo memakai bahasa Nduga Papua dan diterjemahkan Diaz kepada *Suara.com*.

Penganiayaan

MISPO berteriak kesakitan ketika kapak yang diayunkannya untuk membelah kayu bakar justru mengena kaki, pekan terakhir November 2018.

Darah mengucur pada kakinya. Lukanya cukup dalam. Tertatih-tatih ia kembali dari hutan ke honai atau rumah di kampung Yigi, Nduga.

Sejak menderita luka, Mispo dilarang ibunya untuk bekerja. Dia sendiri memang tak bisa berjalan karena luka pada telapak kakinya cukup dalam.

Mispo sehari-hari menjadi petani kebun dan mencari kayu bakar untuk kebutuhan keluarga. Dia tinggal bersama ibu dan ketiga saudaranya.

Dia sebenarnya memunyai keinginan bersekolah. Tapi, Mispo terpaksa dalam-dalam mengubur keinginannya untuk bersekolah, agar bisa membaca dan menulis, serta mengubah nasibnya dan keluarga.

Tak ada pilihan bagi Mispo, selain membantu ibu bekerja demi kehidupan sehari-hari. Sebab sang ayah sudah meninggal dunia

ketika Mispo masih kecil.

Mispo hanya bisa berharap, ketika perayaan Natal 2018, kakinya sudah sembuh. Tapi lagi-lagi, harapannya itu buyar.

Sepekan setelah kakinya luka terkena kapak dan tak bisa jalan, persisnya 2 Desember 2018, warga kampung Mispo geger.

Terjadi kontak senjata antara TPNPB dengan militer Indonesia di Gunung Kabo, wilayah perbatasan antara Distrik Dal dan Distrik Yigi.

Daerah itu adalah area proyek infrastruktur Jalan Trans Papua. TPNPB menilai, pekerja proyek itu adalah anggota TNI dari zenitempur.

Proyek itu pun dinilai TPNPB hanya untuk memudahkan mobilitas militer guna melakukan penyisiran terhadap pejuang kemerdekaan Papua, sekaligus distribusi hasil-hasil kekayaan bumi mereka.

Selang sehari, 3 Desember, TPNPB kembali melakukan penyerangan di Pos Batalion 756 Wimanesili, di Distrik Mbua. Sebagai balasan, TNI dan Polri menggelar operasi penyisiran ke hampir semua kampung Nduga, 4 Desember.

Alhasil, hampir semua masyarakat Nduga memilih mengungsi. Ada yang menerobos lebatnya hutan dan lereng. Pun ada warga yang mengungsi ke luar Distrik Yigi. Mereka takut menjadi sasaran militer Indonesia yang melakukan penyisiran.

Mispo kebingungan. Warga kampungnya sudah banyak yang lari menyelematkan diri di tengah situasi peperangan. Keluarganya pun sudah mengungsi.

Dia sendiri belum mengungsi, karena luka pada telapak kakinya masih menganga sehingga tak bisa berjalan.

Namun, Mispo tak mau mati konyol. Dia akhirnya memilih

mengorbankan satu bajunya. Dia merobek baju itu, agar bisa menjadi pembelat bagi luka telapak kaki.

Setelah yakin kain pembelat luka itu bisa bertahan, Mispo akhirnya ikut mengungsi, mengejar keluarga yang ikut rombongan warga ke Distrik Kwijawagi, Kabupaten Lani Jaya.

Mispo mengungsi di Kwijawagi hingga bulan Maret 2019. Setelahnya, dia berangkat ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Di Wamena, ada saudara perempuan Mispo yang tinggal di kampung Mengapura, Distrik Hebuba. Dia berharap bisa tinggal di Wamena, bekerja demi menghidupi sang ibu.

Lagi-lagi, impian Mispo untuk mengubah nasib ambyar. Hanya sebulan Mispo hidup tenang, berusaha menata hidup di Wamena, hingga datang sejumlah orang menangkapnya.

SORE belum usai, malam belum lagi temaram, ketika Mispo berjalan pergi dari rumah kakak perempuannya untuk ke pasar, tanggal 10 Mei 2019 pukul 17.00 Waktu Papua.

Sebelum berangkat, teman Mispo yang sama-sama tinggal di rumah kakak perempuannya mendapat telepon dari orang tak dikenal.

Orang itu meminta Mispo dan temannya mengambil uang di Pasar Sinakma. Karena penasaran, Mispo, temannya, dan kakak lelakinya mendatangi pasar itu.

Pada pasar itu, Mispo, teman, dan kakaknya memakan pinang di pinggir jalan. Tapi tiba-tiba, datang mobil berlogo Polres Jayawijaya menghampiri mereka.

Lima orang polisi menyeruak dari dalam mobil dan langsung menodongkan senjata laras panjang kepada Mispo.

“Ayo ikut kami,” kata seorang polisi kepada Mispo setengah

berteriak, memaksa Mispo masuk ke dalam mobil. Tak ada surat-surat yang ditunjukkan polisi saat penangkapan.

Ingatan Mispo tentang penyeragaman itu hanya sebatas sejumlah polisi memukul dan menendang dirinya. Selebihnya semua serba gelap, dia pingsan.

“Saya baru sadar ketika berada di sebuah ruangan. Belakangan saya tahu, itu ruangan di kantor Polres Jajawijaya,” kata Mispo, mengenang penangkapannya.

Setelah siuman, Mispo langsung diinterogasi polisi tanpa didampingi kuasa hukum, keluarga, maupun penerjemah bahasa Indonesia.

“Kamu ikut membunuh pekerja di Trans Papua,” begitu informasi yang coba dipahami Mispo saat diperiksa.

Dalam interogasi itu, Mispo mengakui kembali mendapat pemukulan dan penendangan. “Saya cuma disuruh jawab ‘iya, iya’ begitu saja.”

Keesokan hari, penyidik baru menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Mispo. Saat ditangkap, Mispo hanya membawa barang berupa dompet. Itu pun dompetnya kosong, sama sekali tidak ada isi, uang maupun kartu identitas.

Belakangan, Kuasa Hukum Tim Advokasi Papua, Tigor Gemdita Hutapea kepada Suara.com mengungkapkan, pengacara, keluarga, maupun penerjemah belum ada untuk Mispo saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) awal polisi.

“Padahal, tuduhan membunuh pekerja Trans Papua itu bisa terancam hukuman lebih dari 7 tahun penjara, seumur hidup, bahkan mati. Sewaktu rekonstruksi peristiwa, Mispo juga belum didampingi pengacara maupun penerjemah. Dia hanya menjawab dengan mengangguk-anggukkan kepala mengikuti perintah polisi,” kata Tigor.

Tigor juga memprotes prosedur polisi yang tak menverifikasi kepada keluarga soal umur Mispo saat ditangkap.

“Menurut keluarga, saudara laki-laki yang lebih tua dari Mispo, usianya 16 tahun atau 14 tahun. Jadi, tidak mungkin umur Mispo melebihi 16 tahun saat itu. Dia masih anak-anak, harusnya tak diproses hukum,” kata Tigor.

Mispo sendiri mengakui pernah bekerja untuk PT Istaka Karya, badan usaha milik negara yang memegang proyek pengerjaan jalan Trans Papua.

Itu pun tak lama dilakoninya, hanya satu bulan. Saat bekerja, Mispo bertugas mengumpulkan pasir dan menapisnya. Setelah sebulan, dia berhenti dan memilih berkebun membantu ibu.

“Saya tidak pernah sekolah, tidak bisa baca dan tulis. Saya juga tidak pernah ke luar kota seperti ke Wamena selama di kampung. Sejak kecil, papa sudah meninggal, jadi saya bantu mama ke ladang dan mencari kayu setiap hari,” kata Mispo setelah diterjemahkan Diaz kepada Suara.com.

Mispo juga tidak mengenal TPNPB/OPM, termasuk Egianus Kogoya yang memimpin penyerangan di area proyek Trans Papua.

Lagi pula, Mispo masih tidak bisa berjalan karena telapak kakinya terluka akibat sabetan kapak, sepekan sebelum terjadinya penyerangan terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kekinian, Mispo hanya berharap bisa dibebaskan dan pulang ke kampung halamannya.

“Saya tidak tahu soal TPNPB dan OPM. Saya hanya ingin pulang, saya tidak ada urusan dengan ini. Saya ingin bertemu mama.”

Bukan anggota kami

EGIANUS Kogoya, pemuda berusia awal 20-an sudah

menyandang pangkat brigadir jenderal dalam tubuh TPNPB-OPM.

Dia merupakan pemimpin tertinggi TPNPB Wilayah III Ndugama, yang bertanggungjawab atas penyerangan pos-pos militer maupun polisi di area proyek Trans Papua.

Egianus mengakui, mendapat laporan salah satu anggota TPNPB Komando Daerah Pertahanan III Ndugama ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk disidang.

“Kami, pemimpin dan pasukan khusus TPNPB sudah memeriksa dan menyimpulkan, informasi itu tidak benar,” kata Egianus melalui keterangan tertulis.

“Jadi, kami katakan kepada publik, seseorang bernama Mispo yang ditangkap dan dibawa ke Jakarta itu bukan anggota TPNPB Ndugama. Dia hanya masyarakat sipil,” kata Egianus, menegaskan.

Egianus mengatakan hal itu bukan klaim. TPNPB Kodap III Ndugama memunyai manajemen kontrol militer, sehingga setiap batalyon dan komandan bergerak dalam satu garis.

“Setiap aksi ofensif terhadap tentara kolonial Indonesia selalu diketahui atasan. Kami sendiri, sebagai pemimpin tahu segalanya tentang pasukan. Jadi saya pastikan, Mispo bukan anggota kami. Dia harus dibebaskan dari segala tuduhan.”

Kejaksaan Negeri Kabupaten Jayawijaya mendakwa Mispo melanggar lima pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat 3 KUHP, Pasal 328 KUHP dan Pasal 333 KUHP.

Ancamannya, Mispo dihukum mati. Sebab, dia dituduh terlibat grup tempur TPNPB yang dipimpin Egianus Kogoya. Mispo dituduh ikut menyerbu dan membunuh 17 pekerja PT Istaka Karya di jalur proyek Trans Papua.

Sebby Sambom, Juru Bicara Markas Besar TPNPB juga menegaskan, Mispo bukanlah anggota mereka. Dia juga menilai, penangkapan serta proses hukum terhadap Mispo adalah rekayasa.

“Penangkapan Mispo di Wamena itu rekayasa TNI dan Polri di Wamena. Indonesia tidak boleh menghukum orang dengan cara curang, untuk merekayasa kekalahan mereka,” kata Sebby.

Dia juga mendesak pemerintah Indonesia membebaskan Mispo dari segala tuduhan dan mengembalikannya ke Papua.

“Kami tegaskan, TPNPB tidak memakai tentara anak. Sebab, anak-anak kami adalah masa depan Papua yang gilang gemilang dalam alam kemerdekaan. Mispo masih anak-anak. Bebaskan dia dan kembalikan Mispo ke tanah Papua.”

Kejanggalan soal umur

Kuasa Hukum Tim Advokasi Papua, Tigor Gemdita Hutapea, mengatakan terdapat beberapa kejanggalan dalam dokumen persidangan yang disusun penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Salah satunya usia terdakwa yang tidak jelas dan dicurigai sudah dimanipulasi.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, Mispo masih anak di bawah umur saat peristiwa penyerangan di lokasi proyek Trans Papua.

“Dalam verifikasi kami, saat kejadian itu, Mispo masih berusia 14 tahun. Dia tidak mempunyai KTP atau akta kelahiran. Sepekan sebelum peristiwa Ndugama, Mispo juga tidak bisa berjalan karena luka pada telapak kaki. Apa bisa dia pergi menyerang dengan kaki luka?” kata Tigor.

Tigor mengungkapkan, penyidik kepolisian dan jaksa memanipulasi usia Mispo dengan meminta surat keterangan domisili dari Kelurahan di Wamena. Dalam surat, Mispo ditulis lahir di Suwenem tahun 1999 atau berusia 20 tahun.

“Kalau dia dewasa, silakan proses hukumnya dilanjutkan. Kalau ternyata dia masih anak, gunakan sistem peradilan anak. Ketika menggunakan sistem peradilan anak, maka dia tidak boleh dikenakan hukuman mati atau hukuman berat lainnya,” kata Tigor.

Tim Advokasi Papua telah menghadirkan ahli atas nama dr Fahmi Oscandar SpOF, yang menerangkan agar dilakukan pemeriksaan secara medis untuk memastikan umur seseorang. Tigor mengatakan, dokter Fahmi sudah menegaskan, tidak tertutup kemungkinan usia seorang yang ditulis di dalam surat atau akta berbeda dengan usia aslinya.

“Tapi jaksa hanya mendasarkan umur Mispo dari BAP penyidikan, yang mana ketika itu terdakwa tidak didampingi pengacara dan penerjemah,” kata Tigor.

Dalam tingkat penyidikan Mispo diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. Menurutnya, hal itu sangat merugikan terdakwa.

Ketika pemeriksaan lanjutan, Mispo mengaku tidak ada satu pun penasihat hukum yang mendampingi. Namun, dalam BAP polisi tertera tanda tangan kuasa hukum.

“Tim Advokasi menemukan fakta terjadi pemalsuan tanda tangan kuasa hukum didalam berita acara rekontruksi, hal ini telah dilaporkan ke Polda Papua.”

Selain itu, Tigor menilai pemindahan persidangan Mispo dari PN Wamena ke PN Jakarta Pusat atas dasar alasan keamanan, tidak berdasar.

Sebab, berbagai persidangan di PN Wamena tetap berjalan baik. Bahkan perkara kasus atas nama Aibun Kogoya dan Daud Matuan yang dituduh terlibat kerusuhan Wamena, juga berjalan lancar.

Apalagi, kata dia, pemindahan persidangan tidak diberitahukan

kepada keluarga dan meminta pendapat dari terdakwa maupun penasihat hukum.

Akibat pemindahan itu, Mispo dan penasihat hukum menjadi kesulitan menghadirkan alat-alat bukti yang meringankan.

“Karena perjalanan dari Nduga - Wamena - Jakarta bisa menghabiskan Rp 10 juta. Sementara Jaksa lebih mudah karena menggunakan biaya dari negara, hal ini telah melanggar prinsip persidangan yang efektif dan efisien.”

Tigor menduga, pemindahan persidangan ini disengaja, supaya tidak ada yang mendampingi Mispo, karena sejak awal proses hukumnya banyak bermasalah.

“Kami merasa Mispo ini dijadikan tumbal dalam proses penegakan hukum yang terjadi di PT Istaka Karya, karena aparat tidak mendapat pelaku sebenarnya,” kata Tigor, menambahkan. Sementara jaksa penuntut umum kasus Mispo, yakni Ricarda Arsenius, mengklaim usia terdakwa secara formil telah terbutikan dewasa.

“Secara formil membuktikan terdakwa sudah dewasa melalui dokumen keterangan domisili dari kelurahan. Selain itu, dalam penyidikan dan persidangan, terdakwa juga mengaku sudah berumur 20 tahun,” kata Ricarda.

Ia mengklaim, Mispo saat diperiksa polisi tidak mempunyai KTP, akta kelahiran, maupun mengetahui tanggal kelahirannya sendiri.

“Jadi, secara legal formil, hanya ada surat keterangan pejabat setempat yang itu menyatakan terdakwa berusia 20 tahun,” kata dia.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Sutanto, dalam surat nomor 86/KPAI/Pgdn-ABH/1/2020 menegaskan sudah menerima pengaduan perihal kasus Mispo.

Dalam surat itu, Sutanto mengatakan kasus Mispo diadukan melalui surat No.STTP.24/KPAI/Pgdn/1/2020 pada 16 Januari 2020 dari Tim Advokat Papua. Hal yang dipersoalkan adalah, terdakwa diperkirakan masih anak-anak.

“Dan apabila secara medis terdakwa masih berusia anak, KPAI meminta Pengadilan Negeri Jakarta wajib menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak,” tulis Sutanto dalam surat tersebut.

Tigor Gemdita Hutapea mengakui, masih memunyai harapan agar Mispo bisa dibebaskan karena selain memang tidak pernah terlibat penyerangan terhadap pekerja Istaka Karya, juga disebabkan usianya masih kanak-kanak.

“Untuk pembuktian, kami sedang berupaya menghadirkan bukti berupa surat baptis dari gereja tempat Mispo beribadah. Sebab, surat baptis itu bisa membuktikan kapan Mispo lahir, dan berapa usia yang sebenarnya.”



Madina Nusrat

Harian Kompas

Sejak 2004 telah bergabung dengan Harian Kompas sebagai jurnalis, dan hingga kini ia bertugas sebagai koordinator liputan khusus. Lulusan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini, pernah meliput di kawasan bencana Gunung Merapi, kawasan bencana tsunami di pesisir selatan Jawa Tengah, kekerasan pada anak di perkotaan di DKI Jakarta.

ANAK-ANAK INDONESIA DIPERDAGANGKAN

Dipublikasikan di Harian Kompas pada Senin, 29 Juli 2019
Oleh **Madina Nusrat, Ryan Rinaldy dan Satrio Wisanggeni**

Anak-anak Indonesia diperdagangkan dengan modus perekrutan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Nasib mereka berakhir memilukan.

KUPANG, KOMPAS – Liputan investigasi harian Kompas di sejumlah daerah mengungkap tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak-anak. Selama 3-27 Juli, tim liputan menelusuri beberapa kawasan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat, hingga ke Kuala Lumpur, Malaysia, menemui korban dan keluarganya.

Sejumlah anak yang hilang, diduga karena direkrut secara ilegal untuk kemudian dipekerjakan di lokasi prostitusi, juga berusaha dilacak. Dari penelusuran ditemukan fakta, para pelaku perdagangan anak melibatkan warga lokal tempat korban berasal.

Di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, ditemukan seorang remaja putri yang baru setahun berkumpul kembali dengan keluarganya setelah berhasil kabur dari tempatnya "bekerja" di Malaysia.

AM (18) mengaku, pada 2018 dirinya diajak temannya, RT (16), bekerja di Surabaya dengan bantuan laki-laki berinisial AH (25). Namun, dalam perjalanan, AM dan RT diselundupkan ke Malaysia, bermodal dokumen imigrasi palsu. Di negara tujuan, keduanya dipekerjakan di tempat prostitusi.

Menurut AM, selain AH, ada lima orang yang terlibat menyelundupkan dirinya dan RT ke Malaysia. Mereka masing-masing berperan sebagai pendamping sekaligus penyedia tempat penampungan sementara. Kelimanya berada di setiap titik transit di tiap-tiap bandara di Kupang, Surabaya, Batam, hingga pelabuhan tikus di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Takut

AM tak berani mengungkapkan kasus ini ke polisi karena AH yang merekrutnya sebagai calon TKI adalah warga satu desa. Salah satu pendamping, JA, juga masih berada di Kupang. "Saya takut bos di Kupang (JA) perintahkan anak buahnya ambil saya lagi," ucap AM.

Sampai sekarang RT tak diketahui nasib dan keberadaannya. AM pernah menyebutkan, setelah kabur dari tempatnya bekerja, dia ditahan bersama RT di penjara besar di Kajang, Malaysia. Dia ditahan dengan nomor badan 192, sedangkan RT dengan nomor badan 013.

Namun, dengan bantuan informasi nomor badan, RT tetap tak ditemukan. Sekretaris Pertama Konsuler Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Yulisdiyah Nuswapadi, mengatakan, KBRI sudah menghubungi sejumlah penjara dan depo imigrasi, melacak posisi RT, tetapi tetap tidak ditemukan. "Tidak ada ini yang namanya RT," ucapnya.

Dari penelusuran di Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, juga ditemukan remaja putri berinisial DP yang menjadi korban perdagangan orang, dan kini tak diketahui keberadaannya. DP diberangkatkan sebagai

TKI ilegal ke Malaysia setahun lalu. Melianus Payon, ayah DP, mengaku, anaknya baru berusia 16 tahun saat pergi ke Malaysia.

Kasus berbeda muncul di Indramayu, Jabar. Anak korban perdagangan orang diduga kuat dipekerjakan sebagai wanita penghibur di daerah lain.

IN (13), salah satu korban, mengaku semula dirinya ditawarkan bekerja sebagai pelayan kafe di Bekasi dengan gaji yang, menurut dia, cukup untuk mencicil sepeda motor. Setelah dipekerjakan, IN baru tahu bahwa tugasnya adalah menemani tamu yang datang ke kafe. Tepat dua hari setelah bekerja, IN kabur. Berkat IN, kasus di kafe itu terungkap. Pada Juni 2019 Polres Indramayu menyelamatkan 18 anak perempuan di bawah 18 tahun, yang dipekerjakan sebagai wanita penghibur.

Modus iming-iming gaji besar juga membuat dua anak asal Jakarta jadi korban perdagangan orang di Ruteng, Manggarai, NTT. SR (13) dan S (16), dua anak asal Kemayoran, Jakarta, awalnya ditawarkan pekerjaan pelayan restoran dengan gaji besar. Nyatanya mereka dipaksa melayani laki-laki dewasa.

SR kabur dan ditampung di Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak St Theresia, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Koordinator Justice, Peace, and Integration of Creation SSPS Flores Barat Suster Maria Yosephina menceritakan, awalnya SR dan S berkenalan dengan YG melalui media sosial. YG menawari keduanya pekerjaan sebagai pelayan restoran dengan gaji Rp 8 juta.

Dibantu Suster Maria, SR melaporkan kasusnya ke polisi, termasuk menginformasikan keberadaan S yang masih tertahan di kafe. Polisi pun berhasil menyelamatkan S.

Ketua Unit Tanggap Bencana Alam dan Kemanusiaan, Gereja Masehi Injili di Timor, Pendeta Ina Barapa mengungkapkan, banyak anak korban perdagangan orang di NTT baru diketahui saat kembali dalam kondisi meninggal. Empat tahun terakhir,

jenazah TKI asal NTT bertambah. Mayoritas dari mereka TKI ilegal. Pada 2015 ada 28 jenazah TKI dipulangkan, 2016 bertambah menjadi 46, 2017 menjadi 62, dan 2018 mencapai 105. Selama Januari-Juli 2019 ada 61 jenazah TKI.

Di antara jenazah itu, menurut Ina, ada saja yang berangkat ke luar negeri saat masih di bawah 18 tahun atau masih anak, seperti Adelina Jemirah Sau yang tewas dianiaya majikan pada 2018.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengatakan, Pemprov NTT tengah merancang program perlindungan anak-anak di perdesaan. "Kami terus berkoordinasi dengan kabupaten/kota sampai tingkat desa agar kalau ada (calo TKI) yang datang, mereka harus mengajak bicara RT, RW, bahkan kepala desa," ujarnya.

KALAU BEGINI TERUS PASTI MATI

Dipublikasikan di Harian Kompas pada Senin, 29 Juli 2019

Oleh **Madina Nusrat, Ryan Rinaldy dan Satrio Wisanggeni**

Perjalanan mengadu nasib ke Malaysia pada 2018 ia ceritakan begitu mengalir. Saat harus menuturkan sisi terpahit perjalanan itu, giliran air matanya yang mengalir. AM (18) menyebut dengan kalimat "pekerjaan tidak bagus" saat ia dipaksa melayani tamu di lokasi prostitusi.

"Ketika saya diperkosa, saya menangis teriak-teriak, tidak ada yang tolong. Tapi saya dengar saya punya kawan di kamar sebelah juga ada menangis," tutur AM dengan nada marah saat ditemui di kampung halamannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.

Teman di kamar sebelah yang dimaksud AM tak lain adalah RT (17), teman satu desanya. Kedua remaja putri itu diselundupkan ke Malaysia dan dipaksa bekerja di tempat prostitusi saat AM masih berusia 17 tahun dan RT baru 16 tahun.

Sebelum pengalaman pahit itu terjadi, pikiran AM memang lebih dipenuhi cita-cita untuk segera bekerja, dibandingkan menyelesaikan sekolahnya yang saat itu masih di kelas II SMA. Sejak kedua orangtuanya meninggal pada 2014, AM tinggal bersama nenek dan keluarga besarnya. Anak ketiga dari empat bersaudara itu mengaku merasa tak enak menjadi beban keluarga besar, sementara nenek, kakak, ataupun om dan tantenya hanya petani kecil.

Keinginannya seakan memperoleh jawaban saat ia bertemu RT pada perayaan Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2018, di lapangan desa. Di tengah perayaan, AM mendapati RT bersama pacarnya, pemuda berinisial AH (25).

Dalam pertemuan itu RT mengajaknya bekerja di luar NTT dengan bantuan AH. Pilihannya adalah bekerja di Surabaya, Jawa Timur, sebagai pelayan toko.

Tak Pernah Pulang

Karena tekad sudah bulat, dua remaja itu meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada keluarganya. Ayub Tanesib (50), ayah RT, mengungkapkan, anaknya tak pernah bercerita sedikit pun mengenai rencananya bekerja di luar NTT. Saat meninggalkan rumah, menurut dia, RT hanya izin pergi ke gereja. "Tapi sejak itu dia tidak pernah pulang lagi. Dia pergi bersama AM," ucapnya.

Selama perjalanan dari desa menuju Kupang, AM dan RT didampingi AH. Setibanya di Kupang, keduanya diinapkan AH di sebuah rumah dan dilarang ke luar. Di rumah itu mereka bertemu JA, pria berusia sekitar 40 tahun.

Baik JA maupun AH sama-sama calo sekaligus kurir calon TKI di NTT. Jika AH bertugas merekrut calon TKI di desa dan mengantarkannya ke Kupang, JA bertugas menyiapkan dokumen identitas dan perjalanan calon TKI.

Oleh JA, AM dan RT dibuatkan KTP palsu agar bisa naik pesawat menuju Surabaya. Pada KTP palsu itu namanya diubah dari AM menjadi AN.

Menurut AM, di Bandara El-Tari, Kupang, sudah ada orang yang menyiapkan tiket ke Surabaya. Tiket kemudian diserahkan kepada JA.

JA meninggalkan AM dan RT dan berpesan, di Surabaya,

mereka akan dijemput seseorang yang akan menghubungi AM lewat telepon.

Dilarang Bicara

Di Surabaya, keduanya kemudian dibawa ke sebuah warung untuk makan siang. Setelah menyantap makanan, AM dan RT diminta langsung mengenakan kerudung dan kembali dibawa ke bandara untuk diberangkatkan ke Batam.

Sejak berangkat dari Kupang, menurut AM, mereka dilarang JA untuk berbicara dengan siapa pun. Sampai di Batam, AM dan RT dijemput sopir taksi yang mengantarnya ke laki-laki lain. Di tempat laki-laki inilah selama dua hari AM dan RT menginap hingga keduanya diangkut ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan diinapkan selama tiga hari.

Dari Tanjung Pinang, AM dan RT diangkut dengan kapal penangkap ikan menuju Johor Bahru, Malaysia. Tiba di Johor, keduanya harus berjalan kaki melalui perkebunan sawit menuju sebuah pondok. Dari sana mereka dijemput mobil dan diantar ke sebuah hotel tak jauh dari Kuala Lumpur.

AM dan RT dimasukkan ke kamar hotel terpisah, tetapi di satu lantai yang sama, lantai 10. Di kamar itulah mereka berdua dipaksa melayani tamu.

Tepat dua hari AM dijual di hotel itu, dia memutuskan kabur bersama RT. "Saya harus buat cara keluar untuk kabur dari sini. Kalau kami begini terus, pasti mati," ujar AM.

Mereka sempat melapor ke polisi setempat. Namun, karena tak punya dokumen imigrasi resmi, keduanya ditahan di Penjara Kajang, Malaysia. AM berhasil keluar penjara, bahkan keluar dari Malaysia setelah mengaku dirinya adalah TKI ilegal. Malangnya, RT masih ditahan.

Setelah keluar dari Malaysia, butuh waktu dua bulan bagi AM

hingga akhirnya dia bisa pulang ke desanya. Sejak bisa kembali bersama keluarganya, AM lebih memilih tinggal di rumah. Dia masih khawatir JA akan mencari keberadaannya.

Dokumen Palsu

Atase Imigrasi Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Mulkan Lekat, menyampaikan, tak ditemukan dokumen imigrasi yang pernah diterbitkan KBRI KL atas nama AM.

Hanya, menurut Mulkan, memang banyak sekali TKI bermasalah di Malaysia. Kerap kali mereka menggunakan dokumen imigrasi, seperti paspor dan surat perjalanan laksana paspor (SPLP), juga palsu.

Sekretaris Pertama Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Yulisdiyah Nuswapadi, mengatakan, KBRI tak berhasil menemukan RT.

Yulisdiyah mengakui, dari beberapa praktik perdagangan orang yang pernah ditangani KBRI, biasanya ada kurir yang mendampingi orang yang akan diselundupkan. Korban juga tak terlacak di data imigrasi karena menggunakan dokumen palsu. "Biasanya (saat diselundupkan) mereka sudah ada kontak-kontaknya. Siapa yang bawa ke Surabaya, Johor, itu sudah ada orangnya," ujarnya.



Elviza Diana

Mongabay Indonesia

Ia sudah bergabung di Mongabay Indonesia sejak November 2014 - sekarang.

Alumni Politeknik Negeri Sriwijaya dan Universitas Negeri Padang ini juga beberapa kali mendapatkan penghargaan jurnalistik, salah satunya penerima Fellowship Asia-Pacific Story Grants dari the Earth Journalism Network (EJN) pada tahun 2019.

KALA ANAK-ANAK ORANG RIMBA RENTAN TERSERANG PENYAKIT

Dipublikasikan di Mongabay.co.id pada 28 Februari 2020

Oleh Elviza Diana

- *Dalam kurun dua bulan, Januari-Februari 2020, Puskesmas Sungai Bulian mencatat lebih 100 kunjungan Orang Rimba rawat jalan. Saendran, Kepala Puskesmas Desa Sungai Bulian mengatakan, 80% pasien anak-anak dengan gangguan pernapasan, ISPA, pneumonia, demam, batuk dan sesak napas.*
- *Pada 17 Februari 2020, saya mengunjungi kelompok Orang Rimba Makekal Hulu, yang melangun ke kebun sawit masyarakat di Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur Merangin. Sebanyak 23 keluarga Orang Rimba tinggal sementara di kebun sawit milik warga di Desa Sungai Bulian itu. Tinggal di sekitar kebun sawit, banyak Orang Rimba sakit, terutama anak-anak.*
- *Ranpiandi Damanik, Kepala Puskesmas Muaro Delang menceritakan, banyak anak Orang Rimba sakit membuat mereka dan tim Dinas Kesehatan Merangin kunjungan ke kelompok Orang Rimba di Makekal Hulu, timur Taman Nasional Bukit Duabelas.*
- *Data KKI Warsi, bekerjasama dengan BPS Jambi pada 2018 menyebutkan, Orang Rimba terdata 4.500 jiwa tersebar di enam kabupaten. Kematian Orang Rimba beruntun pernah terjadi pada 2015 sebanyak 11 orang. Gejalanya hampir sama, diawali gejala, demam, batuk, sakit perut dan sesak napas.*

Kemiri menangis dalam gendongan ibunya. Selembur kain panjang berselimpang di dada Begaya, sang ibu. Bayi usia 1,5 bulan ini tak mengenakan pakaian. Dia demam. Badan panas. Begaya terus bersenandung agar anaknya tak menangis.

“Sudah lima hari badannya panas.” Beberapa anak rimba berkumpul mengitari saya dan Kemiri. Nengkudu, balita empat tahun ini juga berkali-kali batuk keras dan merengek. Mata menatap sayu. Tak ada air mata saat dia menangis. Beberapa perempuan berjalan hilir mudik menenangkan anak mereka. Pada 17 Februari 2020, saya mengunjungi kelompok Orang Rimba Makekal Hulu, yang melangun ke kebun sawit masyarakat di Desa Sungai Bulian, Kecamatan Tabir Timur Merangin.

Sebanyak 23 keluarga Orang Rimba tinggal sementara di kebun sawit milik warga di Desa Sungai Bulian itu. Melangun adalah istilah Orang Rimba, berpindah ke luar hutan karena beberapa sebab, antara lain, salah satu keluarga atau anggota kelompok meninggal, musim paceklik, dan wabah penyakit. Kelompok ini, baru saja kehilangan bayi berusia delapan hari, anak Besiap.

Peristiwa itu yang membuat kelompok Orang Rimba ini menambah proses melangun. “Kemarin kami kehilangan seorang sepupu saya, begitu mau masuk ke hutan lagi, ada yang meninggal lagi,” kata Ngandun, Ketua Adat Orang Rimba Makekal Hulu. “Setahun sudah kami melangun.”

“Di sawitan ini tidak enak dibandingkan di hutan.” Dia bilang, tinggal di sekitar kebun sawit, banyak Orang Rimba sakit. “Banyak yang sakit di sini, makin bertambah, anak-anak paling banyak. Sebelum sehat, saya dan anggota kelompok lain akan memilih bertahan. Kalau di dalam bagaimana mau bawa mereka berobat,” kata Ngandun.

Ada 15 sesudungan, rumah Orang Rimba berupa beberapa tonggak kayu menyangga atap terpal plastik. Lantai terbuat dari kayu tersusun memanjang ke kanan dan kiri. Sesudungan ini menyebar di kebun sawit seluas dua hektar. Tak banyak aktivitas di sini, hanya beberapa induk-panggilan bagi ibu di Orang

Rimba yang mengendong anaknya. Beberapa laki-laki dewasa sedang tidur-tiduran di sesudungan. Mereka beristirahat karena semalam baru pulang berburu babi.

“Saya memegang dahi Nengkudu. Panas. Bayo, neneknya mengatakan, delapan hari lalu mereka sudah dikunjungi Puskesmas Sungai Bulian dan Dinas Kesehatan Merangin serta aparat desa, maupun kecamatan. Nengkudu belum sakit saat itu. Mereka berdiskusi menentukan apakah harus ke Puskesmas atau tidak.

“Kami tidak ada motor,” kata Bayo.

Beruntung mobil yang saya bawa bisa membawa tiga perempuan bersama lima anak mereka. Jalan berbatu dan tanah membuat perjalanan Ke Puskesmas Desa Sungai Bulian memakan waktu hampir 30 menit. Perempuan dan anak Orang Rimba, duduk di antrian depan ruang tunggu Puskesmas.

Seorang petugas kesehatan menanyakan identitas satu per satu rombongan Orang Rimba ini.

“Nengkudu.” Panggil Meri, seorang petugas kesehatan.

“Apa keluhannya, bu?”

“Batuk, demam,” kata Nengkudu.

Satu per satu anak diperiksa, keluhan hampir sama, panas, batuk dan sesak napas. Dalam kurun dua bulan, Januari-Februari 2020, Puskesmas Sungai Bulian mencatat lebih 100 kunjungan Orang Rimba rawat jalan. Saendran, Kepala Puskesmas Desa Sungai Bulian mengatakan, 80% pasien anak-anak.

“Rata-rata kena gangguan pernapasan, ISPA, pneumonia, demam, batuk dan sesak,” katanya.

Tak berbeda dengan Puskesmas Muaro Delang, ada 23 pasien kunjungan Orang Rimba dalam Januari-Februari 2020, 13 anak-anak. Keluhannya juga sama, batuk, demam, ada juga diare pada anak. Ranpiandi Damanik, Kepala Puskesmas Muaro Delang menceritakan, banyak anak Orang Rimba sakit membuat mereka dan tim Dinas Kesehatan Merangin kunjungan ke kelompok Orang Rimba di Makekal Hulu, timur Taman Nasional Bukit Duabelas. "Ada 70 orang diperiksa, 26 sakit orang dewasa, ibu hamil, 34 anak-anak balita, satu anak pneumonia berat dan meninggal di RSUD Bangko," katanya.

Dua puskesmas terdekat di tempat hidup Orang Rimba di Makekal Hulu menyatakan, memberikan layanan pengobatan gratis bagi Orang Rimba yang berobat. "Sejak 2009, sudah gratis ada peraturan bupati kalau ga salah," kata Saendran.

Selain itu, mereka sudah kunjungan tiga kali dalam setahun. "Akses ke sana juga sulit, jadi tidak bisa sering ke dalam. Kendaraan kita tidak ada." Perlu waktu satu setengah jam menjangkau Orang Rimba di Makekal Hulu dengan akses jalan tanah dan mendaki.

Perempuan Rimba dan anaknya sedang periksa ke Puskesmas. Kematian anak tinggi Beshiap baru saja kehilangan bayi

Kematian Anak Tinggi

Beshiap baru saja kehilangan bayi perempuannya yang meninggal karena sesak napas. Usia baru delapan hari, saat menderita sesak napas dan dibawa ke rumah sakit. Selama tiga hari dirawat, Beshiap terpaksa membawa pulang bayinya. "Di rumah sakit tidak nyaman, kami bawa pulang, meninggal di jalan,"katanya.

Kematian bayi Beshiap bukanlah kali pertama bagi Orang Rimba. Begaya dan Siondan, dua ibu Orang Rimba ini bilang

pernah kehilangan bayi mereka. “Anak aku meninggal waktu umur kandungan delapan bulan, langsung meninggal,” kata Begaya.

Begaya melahirkan dibantu kakak iparnya di hutan. Dia tak pernah memeriksakan kehamilan ke bidan maupun puskesmas. Usia baru 13 tahun saat melahirkan anak pertama. Sekarang, Begaya sudah punya dua anak lagi.

Siondan juga kehilangan anaknya saat berusia 10 bulan. Bayi itu demam dan batuk hingga meninggal dunia. “Kami melahirkan semua sama dukun, tidak ke rumah sakit. Hopi ado bawa anak ke Posyandu,” katanya.

Seingatnya, dalam tiga tahun ini ada 20 anak usia 0-5 tahun meninggal di kelompok Makekal Hulu. Mereka hanya tahu sakit sesak, demam dan batuk sebagai penyebab kematian. Data KKI Warsi, bekerjasama dengan BPS Jambi pada 2018 menyebutkan, Orang Rimba terdata 4.500 jiwa tersebar di enam kabupaten. Kematian Orang Rimba beruntun pernah terjadi pada 2015 sebanyak 11 orang. Gejalanya hampir sama, diawali gejala, demam, batuk, sakit perut dan sesak napas. Rendahnya kesadaran posyandu dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta balita juga jadi salah satu pemicu. Orang Rimba memiliki tradisi sendiri saat melahirkan. Ketika perempuan rimba yang mau melahirkan akan dibawa ke Tanah Peranaon, wilayah khusus untuk proses bersalin Orang Rimba. Di Tanah Peranaon ini, juga didampingi satu orang dukun.

Nandun mengatakan, bayi baru lahir biasa bibir berpoles madu hutan untuk kekebalan tubuhnya. Mereka memang tidak mengenal posyandu. “Di Tanah Peranaon ini ada berbagai macam ramuan untuk melahirkan dan merawat bayi nanti. Dekat dengan sungai juga biasanya,” kata Ngandun.

Hidup berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, juga

membuat Orang Rimba rentan sakit karena beradaptasi dengan lokasi baru. Lingkungan berubah dan hutan yang menyempit berpengaruh pada kondisi kestabilan pangan dan kesehatan Orang Rimba ,saat melangun.

Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman juga melakukan studi pada Orang Rimba terkait penyakit malaria. Selama 10 hari, mereka test pada beberapa kelompok Orang Rimba. Musim hujan jadi patokan angka malaria tinggi pada Orang Rimba. Setelah Dinas Kesehatan Merangin juga pengecekan malaria ke beberapa Orang Rimba, dan memang menderita malaria, tiga anak-anak.

Balara, nama anak Rimba posistif terjangkit malaria. Joko Purnomo , guru relawan Orang Rimba yang ikut dalam pengecekan mendapatkan titipan obat bagi Balara. Dia bertanya pada beberapa Orang Rimba dalam kelompok Ngandun. “Di rombongan Sungai Bedaro,makekal hulu itu ado namo anak Belara. Budak kecil, toga tahun umurnya” kata Ngandun ke Purnomo.

Malaria masih menjadi momok bagi Orang Rimba. Data sementara diperoleh dari Eijkman dari 400 Orang Rimba yang menjalani pemeriksaan sekita 37 orang posistif malaria.

“Kita belum mengumpulkan semua *sample*, ini baru yang sudah diidentifikasi saja segitu,” Kata Din Syafruddin, peneliti senior malaria Eijkman

Syafruddin mengatakan, setelah mendapat hasil analisa, mereka akan intervensi pencegahan dengan gunakan alat pengusir nyamuk berbentuk lampion.

“Alat ini sudah diuji cobakan di Sumba dan keberhasilan mencegah gigitan nyamuk sebanyak 60%.”

Alat ini, katanya, didesain juga sesuai karakter dan fleksibilitas Orang Rimba yang hidup berpindah. “Kalau kelambu, mereka

tidak gunakan panas. Alat ini terbuat dari kertas, dan praktis dibawa saat mereka berpindah. Efektif dan disesuaikan dengan mereka.”

Alat pengusir nyamuk memiliki jangkauan minimal 3×3 meter persegi bahkan bisa dua kali lipat berdasarkan luasan kertas.

Kalau dibandingkan 2015, Din menilai partisipasi dan kesadaran Orang Rimba untuk pemeriksaan meningkat, “[Pada] 2015, kita hanya memeriksa sebanyak 200 jiwa *sample* saja. Tahun ini lebih banyak,” katanya.

Kerentanan Pangan dan Kesehatan

Tradisi melangun adalah identitas bagi Orang Rimba. Namun, bagi beberapa kelompok, tradisi ini sudah mulai dimodifikasi oleh mereka sendiri sebagai bentuk adaptasi.

Adi Prasetijo, antropolog, sekaligus Direktur Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD) mengatakan, di beberapa tempat melangun sudah banyak dimodifikasi sendiri oleh Orang Rimba.

“*Melangun* tidak lama lagi sampai bertahun-tahun, lokasi jadi lebih dekat, bahkan dulu ada yang meninggal harus *melangun* sekarang, jika ada yang sakit dipindahkan jauh-jauh agar kelompoknya tidak melangun. Sebagian, yang sudah beragama memilih tidak lagi melangun,” katanya.

Orang Rimba dinilai berubah melihat perubahan lingkungan dan kondisi sosial sekitar.

“Mereka berubah karena pilihannya sendiri,” ujarnya.

Ada beberapa pertimbangan modifikasi budaya melangun dilakukan oleh Orang Rimba, diantaranya, akses kepemilikan lahan, agama, dan akses.

“Budaya melangun, budaya nomaden yang membutuhkan

efektivitas dan energi mobilitas yang tinggi.”

Berubah atau tidak merupakan pilihan Orang Rimba sepenuhnya. Tidak ada pendekatan yang baku bagi pemerintah untuk “melayakkan “ kehidupan Orang Rimba selain memfasilitasi keinginan sebagai masyarakat dengan identitas budaya mereka. “Hutan saja yang sekarang terbagi-bagi, itu saja yang membuat mereka rentan bukan *melangun*.”

Melangun juga bisa dari sarana Orang Rimba untuk memecahkan diri dengan kelompoknya juga klaim kewilayahan bagi mereka. “Modifikasi melangun ini tidak tunggal ya, ada banyak. Bahkan *melangun* ini juga bisa kalau ada kelompok yang tidak sepemahaman lagi dengan kelompok besarnya. Mereka memilih *melangun* sebagai alasan keluar dan membentuk kelompok lain,” kata Prasetijo.

Seharusnya, pemerintah bisa memberikan hutan sebagai ruang hidup sekaligus identitas budaya Orang Rimba. Kalaupun ada kelompok yang berubah dari sistem dan keunikan budaya, mereka juga perlu dukungan penuh hingga cepat beradaptasi dan diterima masyarakat.

“Bagi kelompok Orang Rimba yang mempertahankan identitas mereka ini juga seharusnya dipikirkan negara bagaimana solusi tepat. Dengan hutan sebagai sumber penghiduan dan identitasnya,” ujar Prasetijo menambahkan.

Masyarakat adat yang mengandalkan hidup dari berburu dan meramu, katanya, rentan hilang secara kebudayaan karena tutupan hutan terus menipis.

“Ditambah lagi konflik, ini tidak akan mampu bertahan. negara harus hadir untuk mereka.”



Risna Halidi

Suara.com

Ia sudah bekerja sebagai reporter di Suara.com sejak Februari 2017 - sekarang. Risna merupakan lulusan Universitas Nasional tahun 2014.

ANAK BERHADAPAN HUKUM TERTINGGI, POTRET BURAM PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Dipublikasikan di Suara.com pada 23 Juli 2019

Oleh **Risna Halidi**

Suara.com - Kasus Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak di Indonesia

Anak-anak dan remaja merupakan masa depan Indonesia yang harus dijaga dan dilindungi. Hal inilah yang mendasari diperingatinya Hari Anak Nasional setiap 23 Juli.

Sayangnya, momen peringatan Hari Anak Nasional tidak melulu diisi dengan perayaan dan kembang api. Kasus kekerasan, pencabulan dan pelecehan seksual, perundungan, hingga prostitusi dan perdagangan anak masih marak menjadi tajuk pemberitaan di media.

Masih segar dalam ingatan kita, kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku anak siswa SD dan SMP yang memperkosa hingga hamil seorang siswi SMA di Probolinggo, Jawa Timur pada April 2019.

Pun dengan kekerasan fisik dan bullying, yang menewaskan dua orang siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan.

Pemerhati anak Seto Mulyadi menyebut kasus perundungan kini amat lazim terjadi di sekolah.

Ia mengutip sebuah penelitian yang mengatakan 60 sampai 70 persen anak SD di Jawa Barat mengalami perundungan. Seto menilai, tingginya kasus kekerasan dan perilaku melawan hukum pada anak karena adanya pembiaran oleh orang-orang yang sudah tua.

“Saya pernah melakukan diskusi dengan para orangtua dan orangtua malah meremehkan (perilaku agresif anak) dengan mengatakan, namanya juga anak-anak. Padahal kalau dibiarkan akan terus berkembang,” ujarnya kepada Suara.com.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan hukum atau ABH, menjadi kasus yang paling sering dilaporkan ke KPAI.

Sejak 2011 sampai 2019, jumlah kasus ABH yang dilaporkan ke KPAI mencapai angka 11.492 kasus, jauh lebih tinggi daripada laporan kasus anak terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan cyber crime (3.323 kasus), serta trafficking dan eksploitasi (2.156 kasus).

Jika ditelaah, angka ABH karena menjadi pelaku kekerasan seksual cenderung melonjak tajam. Pada 2011, pelaku kejahatan seksual anak ada pada angka 123 kasus. Angka tersebut naik menjadi 561 kasus pada 2014, kemudian turun menjadi 157 kasus pada 2016, dan pada medio Januari sampai Mei 2019, angka kasus ABH sebagai pelaku kekerasan seksual mencapai 102 kasus.

Selain kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak, kasus perundungan seperti fisik dan psikis yang dilakukan anak juga cukup menyita banyak perhatian. Menurut data KPAI, laporan ABH karena menjadi pelaku kekerasan fisik dan psikis mencapai 140 kasus pada tahun 2018.

Faktor yang Membuat Anak Jadi Pelaku Kekerasan dan Pencabulan

Pemerhati anak Seto Mulyadi menyebut, banyak faktor yang bisa membuat anak menjadi pelaku kekerasan hingga pencabulan. Tentu saja, peran orangtua sangat dominan, bahkan bisa dibilang menjadi penentu.

Misalnya, faktor sosio-ekonomi mungkin tidak akan menjadi penyebab langsung anak melakukan kekerasan atau pencabulan. Namun anak dari keluarga kurang mampu mungkin tidak mendapat perhatian sebesar anak dari keluarga berkecukupan.

“Tidak sepenuhnya karena sosio-ekonomi tapi artinya bisa saja. Tapi yang sering kali terjadi adalah ketidaktahuan dan ketidakpedulian orangtua. Ketidakpedulian bisa karena faktor ekonomi, orangtua sibuk mencari uang tapi juga bisa karena paradigma yang keliru mengenai anak,” kata lelaki yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini.

Senada dengan Seto, psikolog anak dan remaja Kantiana Taslim, M.Psi dari klinik Personal Growth mengatakan, kondisi sosial ekonomi tak serta merta menjadi pengaruh tunggal mengapa anak bisa berurusan dengan hukum. Meski demikian, ia mengatakan ada hubungan antara perilaku kekerasan dan status sosial ekonomi.

“Ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau ada hubungan kondisi sosial ekonomi dengan perilaku tindak kekerasan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak,” ujarnya, saat ditemui baru-baru ini.

Senada dengan Seto, psikolog anak dan remaja Kantiana Taslim, M.Psi dari klinik Personal Growth mengatakan, kondisi sosial ekonomi tak serta merta menjadi pengaruh tunggal mengapa anak bisa berurusan dengan hukum. Meski demikian, ia mengatakan ada hubungan antara perilaku kekerasan dan status sosial ekonomi.

“Ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau ada hubungan kondisi sosial ekonomi dengan perilaku tindak kekerasan atau kriminalitas yang dilakukan oleh anak,” ujarnya, saat ditemui Suara.com baru-baru ini.

Pertama, adanya desakan ekonomi yang menjadi salah satu faktor pencetus seorang anak berperilaku melanggar hukum. Misal, kata Kantiana, anak mencuri barang milik tetangga.

Menurutnya, anak biasanya mendapat arahan saat melakukan hal tersebut. Sehingga lebih sering terjadi anak mencuri karena tekanan atau suruhan dari orang lain, bukan karena keinginan pribadi.

Kedua adalah upaya konformitas atau rasa ingin diakui dalam satu komunitas. Rasa ingin diakui dalam pergaulan bisa membuat anak berhadapan dengan hukum, meskipun ia sebenarnya tak ingin. Ia menerangkan bahwa anak di bawah usia 18 tahun cenderung belajar dari apa yang mereka lihat.

Ketidakmampuan anak dalam mengembangkan pemikiran, memilah apa yang baik dan yang buruk, serta kebiasaan menelan sesuatu secara mentah, menjadi beberapa penyebab mengapa anak dapat menjadi pelaku kekerasan dan berurusan dengan hukum.

“Anak tidak mau melakukan itu tapi di lingkungan pergaulannya teman-teman banyak melakukan itu. Lalu anak memiliki tekanan, kemudian untuk bisa dianggap menjadi bagian dari kelompok, dia ikut-ikutan,” ungkapnya lagi.

Penerapan Undang-Undang Peradilan dan Pidana Anak, Apa Dampaknya?

Indonesia memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pidana Anak. Lewat undang-undang ini, identitas ABH baik pelaku maupun korban akan ditutup dan tidak diperbolehkan untuk disebar.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan, undang-undang SPPA bahkan mengatur busana hakim, yang tidak diperkenankan bertugas mengenakan pakaian laiknya hakim pada umumnya.

“Pengadilan anak juga berlangsung cepat, tidak boleh lebih dari tiga bulan. Secepat-cepatnya satu bulan. Maka pengadilan anak setiap hari dilakukan,” kata dia kepada Suara.com.

Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, Ade Kusmanto mengatakan, UU SPPA menjamin anak pelaku kekerasan atau pencabulan tetap mendapatkan haknya sebagai anak-anak.

Salah satu contohnya, penggantian nama penjara anak atau lapas anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ade mengatakan penggantian tidak sebatas nomenklatur atau nama lembaga saja, namun juga pedoman perlakuan dan program pembinaan yang ramah anak.

“Dalam program pembinaan selain diberikan pendidikan wajib 9 tahun, anak juga dibekali keterampilan sesuai minat dan bakatnya masing-masing untuk dilanjutkan setelah bebas nanti. Dikembalikan pada keluarga dan orangtuanya serta masyarakat yang diawali dengan persiapan proses terintegrasi dan asimilasi, serta melibatkan pihak-pihak lain yang konsen untuk pendidikan anak setelah mereka bebas,” urai Ade.

Ia melanjutkan, mengingat rata-rata usia ABH masih masuk dalam kategori usia wajib belajar, maka fokus dari tugas LPKA adalah melakukan pembinaan anak pada pendidikan formal maupun non-formal.

“Namun belum semua LPKA bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar karena beberapa hal. Terkendala koordinasi dengan pihak Diknas (Dinas Pendidikan) setempat dan sampai saat ini sedang diupayakan mencari solusi dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak di LPKA seluruh Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Sistem Database Pemasarakatan, jumlah penghuni LPKA berkisar di angka 2.900-3.000 anak dari 33 LPKA yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Angka tersebut turun dari sebelumnya 6.000-7.000 anak sebelum diberlakukannya UU SPPA.

Retno mengatakan, penurunan jumlah anak yang dibina di LPKA bisa turun karena UU SPPA mengenal sistem diversifikasi atau penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan. Tentu saja tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan diversifikasi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kasus tidak sampai ke pengadilan.

Pertama, diversifikasi hanya bisa dilakukan satu kali. Kedua, diversifikasi juga lebih diprioritaskan pada anak usia 14 tahun ke bawah. Ketiga dan yang paling penting, mendapat persetujuan keluarga korban.

“Jadi diversifikasi pun tidak bisa dilakukan jika keluarga korban tidak bersedia,” tegasnya.

UU SPPA boleh jadi berperan dalam perlindungan anak saat menjalani peradilan dan pidana. Namun, bagaimana dengan hak anak yang terampas setelah menjalani pembinaan?

Retno tak memungkiri adanya stigma pada anak pelaku kekerasan atau pencabulan. Stigma bisa datang dari mana saja, termasuk keluarga, kerabat, tetangga, hingga sekolah.

Oleh karena itu, Retno menyayangkan jika ada ABH yang mendapat hukuman hingga 10 tahun, karena bisa kehilangan hak atas pendidikan.

“Anak juga tidak boleh dihukum 10 tahun meski (kasus) pembunuhan. Maksimal 10 tahun. Tapi kalau dihukum tujuh sampai 10 tahun bagaimana sekolahnya?” tandas Retno.

Di lapangan, kata Retno, banyak sekolah yang malah merampas hak pendidikan ABH dengan mengeluarkan mereka ketika terjerat kasus hukum.

“Yang paling sering adalah kena hukuman beberapa bulan saja dikeluarkan dari sekolah. Kalau anak tidak sekolah, lalu bagaimana? Akan menjadi problem sosial ke depannya. Makanya akses pendidikan harus dipenuhi apalagi hak pendidikan adalah hak dasar,” urainya lagi.

Solusinya adalah dengan memberikan pendidikan saat anak berada di LPKA. Namun seperti dijelaskan Ade sebelumnya, belum semua LPKA mampu memberikan pendidikan.

Retno pun menekankan pentingnya kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan LPKA. Sebabnya, masih ada dinas pendidikan daerah yang enggan memberikan pendidikan di LPKA, dengan alasan ABH bukan berasal dari kota/kabupaten setempat.

Ia menilai tidak boleh ada lagi alasan ABH bukan merupakan penduduk kota/kabupaten setempat. Semua anak Indonesia memiliki hak atas pendidikan yang sama.

“Padahal mereka semua anak Indonesia yang tidak dipenuhi hak pendidikannya,” tegas Retno.

Selain pendidikan, ABH juga perlu memiliki hak atas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa. Pendampingan oleh psikolog atau psikiater penting bagi anak, baik pelaku maupun korban.

Pendampingan juga harus dilakukan sangat panjang baik saat proses sampai paska putusan hukuman dan saat anak kembali beraktivitas biasa di masyarakat.

Anak yang didakwa sebagai pelaku tindak kriminal harus dicari solusi dan inti permasalahannya. Selain itu anak juga harus dibekali pendidikan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Kantiana, hal tersebut penting karena anak cenderung tidak tahu secara jelas batasan norma dan hukum di masyarakat. “Anak harus bertemu konselor atau psikolog dan mencari tahu penyebab atau apa yang mempengaruhinya. Kalau sudah

diketahui secara lebih spesifik, akan berbeda penanganannya,” ungkap Kantiana.

Cegah Sebelum Terlambat, Ini Peran Orangtua dan Masyarakat
Tentu saja tidak ada orangtua yang ingin anaknya menjadi pelaku kekerasan atau pencabulan. Pun bagi yang pernah menjadi pelaku, tentu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari kelompok terdekat, yakni keluarga.

Kantiana menekankan pentingnya support system yang mumpuni. Maka dari itu, penting bagi masyarakat untuk tahu cara bersikap dan menghadapi ABH dengan cara merangkul dan menghilangkan stigma.

“Perlu juga dievaluasi apakah saat anak kembali ke masyarakat, lingkungannya adalah lingkungan memadai atau tidak? Apakah anak bisa dikembalikan ke lingkungannya?” tandasnya.

Hal itu, kata Kantiana, dapat merupakan cara untuk menghilangkan sumber ancaman anak sekaligus mencegah potensi anak mengalami masalah yang sama.

“Hal yang penting, sumber ancaman harus sudah tidak ada di lingkungan anak,” ungkap Kantiana lagi.

Di sisi lain, Seto menyebut pentingnya peranan makan malam bersama dan rapat keluarga bagi anak. Dua kegiatan tersebut bisa jadi sarana bertukar pikiran antara anak dan orangtua, sehingga anak tidak mengalami perilaku yang mengundang kekerasan seperti membentak dan memukul anak.

Seto menilai hasrat orangtua untuk memiliki anak penurut dan mudah diperintah layaknya robot yang bisa dikendalikan tidak akan mendukung anak meraih potensi maksimalnya. Sebab, anak memiliki keinginan, hasrat, minat, dan bakat sendiri yang mungkin berbeda dengan keinginan orangtua.

“Hal tersebut malah tidak mendidik anak menjadi mandiri dan memiliki kemampuan bekerjasama,” tegasnya.

Retno menilai langkah-langkah tersebut cukup baik dilakukan untuk mencegah anak menjadi pelaku kekerasan atau pencabulan. Yang terpenting, keluarga tidak boleh kehilangan kehangatan saat mendidik anak.

“Andai keluarga hangat dan saling mendukung, anak dimotivasi berkarya, anak potensinya dikembangkan, tidak akan terjadi,” tutup Retno.



Alexander

RMOLBengkulu.com

Ia bekerja sebagai jurnalis di RMOLBengkulu.com. Pria asal Lebong, Bengkulu ini merupakan alumni Universitas Bengkulu tahun 2015.

BIDAN PENAKLUK KERINCI SEBLAT

Dipublikasikan di RMOLBengkulu.com pada 25 Desember 2019

Oleh **Alexander**

RMOLBengkulu. Siang itu, Rabu (4/12) pukul 10.15 WIB, sesosok perempuan duduk di ruang tunggu di Kantor Puskesmas Ketenong. Wajahnya begitu ramah. Dia sesekali melemparkan senyum sambil menunduk.

Bidan Buthet Harkita yang sudah 8,5 tahun mengabdikan diri memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di Kecamatan Pinang Belapis.

Posisi kantornya terletak di Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Ketenong Jaya berjarak sekitar 15 kilometer atau 1,5 jam menggunakan kendaraan roda dua dari Pasar Muara Aman.

Pasar Muara Aman merupakan salah satu pusat pasar masyarakat di wilayah Kabupaten Lebong. Setengah perjalanan menuju ke Puskesmas itu kondisi jalan hancur. Permukaan jalan yang beraspal telah mengelupas, hanya menyisakan bebatuan terjal.

Selama merantau, Buthet tinggal seorang diri di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Sebelat Ulu. Untuk menuju kesana butuh waktu satu jam menggunakan kendaraan roda dua, dari posisi kantornya.

Dari tahun 2017 ia berstatus bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), setelah akhirnya dua tahun terakhir diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tepatnya pada tanggal 4 April 2017 lalu.

Namanya tidak asing lagi bagi Warga Desa Sungai Lisai. Dia terkenal sebagai bidan desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi warga setempat.

Desa Sungai Lisai merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pinang Belapis. Di desa itu ada dua dusun dengan jarak tempuh satu jam perjalanan kaki.

Askes jalan ke Sungai Lisai itu dimulai dari Desa Sungai Sebelat Ulu yang merupakan desa terdekat. Sekitar 60 kilometer dari perkotaan Kabupaten Lebong. Sedangkan, jarak untuk menuju dari Desa Sebelat Ulu ke Sungai Lisai mencapai 15 kilometer.

Akses lain bisa melalui Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan berjalan kaki selama dua hari melalui hutan TNKS.

Diketahui, desa ini pada tahun 2009 lalu bagian Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin, Jambi setelah kemudian ditetapkan sebagai salah satu desa di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

Desa itu berada di jantung Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang langsung berbatasan dengan Provinsi Jambi, yang juga merupakan warisan dunia milik UNESCO.

Bidan lajang ini, menceritakan kisah perjuangan yang masih lekat di ingatannya saat memberikan Imunisasi Maesles Rubella (MR) di desa tersebut, yang dimulai pada bulan September 2018 lalu.

Sebulan sekali perempuan asal Medan Sumatera Utara itu rutin mendatangi Posyandu yang ada di desa tersebut untuk memberikan vaksin.

Bersama empat rekan sejawatnya, ia yang juga ketua rombongan harus rela menyusuri hutan, naik gunung sampai menyeberang sungai demi memberikan layanan imunisasi MR kepada 69 anak di desa pelosok tersebut.

“Total anak yang kami berikan imunisasi waktu itu 69 anak, di mana 44 anak kami berikan di sekolah, dan 25 anak di posyandu,” kata dia sembari menunduk, Rabu (4/12).

Buthet dikenal sebagai bidan yang ramah, ulet dan sigap dalam melayani warga di Kecamatan Pinang Belapis. Berkat Buthet kegiatan Puskesmas desa juga berjalan dengan baik walaupun lokasinya berada di daerah pinggiran.

Basah kuyup setelah keluar masuk hutan dan menyeberangi dua sungai adalah hal biasa baginya. Karena jauhnya perjalanan, baju yang ia kenakan bahkan sampai mengering sekembali ke Puskesmas.

Jalan yang biasa ia lalui hanyalah jalan setapak becek di tengah rimba. Butuh waktu enam jam untuk melaluinya.

Itu dia lalui dengan sabar, dan sadar bahwa tugas yang mereka emban merupakan adalah sebuah bentuk pengabdian.

Namun, semua itu tak menyurutkan semangat bidan desa ini untuk mengabdikan. Mereka tak patah arang, meskipun banyak rintangan.

Desa Sungai Lisai tergolong masih ‘perawan’. Kawasan ini belum tersentuh sama sekali jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun jaringan telekomunikasi.

Warga Sungai Lisai hanya memanfaatkan air sungai yang mengalir deras di daerah tersebut sebagai penggerak kincir untuk menghasilkan energi listrik yang multi manfaat, murah, dan ramah lingkungan bagi desa.

Sementara untuk transportasi mereka mengandalkan tenaga laki-laki yang sering disebut capung. Capung adalah kuli angkut

yang diupah untuk mengirim barang maupun menyampaikan pesan keluar atau masuk desa.

Untuk menopang kebutuhan ekonomi, sebanyak 97 Kepala Keluarga dan 329 jiwa penduduk Sungai Lisai mayoritas berstatus petani kopi dan padi sekalipun petani kulit kayu manis.

Menurut Buthet, mengabdikan di Sungai Lisai membutuhkan kekuatan dan ketabahan. Begitu sampai ke desa tujuan, rasa lelahnya langsung terobati dengan senyuman warga desa yang menyambut kedatangannya.

Meskipun desa itu terisolasi dari jaringan komunikasi, listrik, dan keramaian. Akan tetapi, pemandangan hutan alam yang indah, hawa segar yang kaya oksigen, diiringi alunan musik hewan-hewan hutan menjadi hiburan yang mengasyikkan bagi para petugas kesehatan seperti Buthet.

Ya, tak banyak tenaga medis yang mau dan mampu memilih jalan seperti bidan desa ini. Rata-rata kebanyakan tenaga kesehatan lebih memilih daerah perkotaan untuk memberikan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, Imunisasi MR diberikan kepada anak-anak usia 9 bulan sampai 15 tahun untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Selama perjalanan mereka, vaksin disimpan di kotak es untuk menjaga ketahanan vaksin.

Perjuangan untuk menempuh jalur hutan dengan jarak yang jauh membuat mereka harus menginap di lokasi. Pada kesempatan inilah ia dan rombongan menyosialisasikan para orang tua terkait pentingnya imunisasi MR.

“Tidak ada penolakan. Sungai Lisai sudah 100 persen diberikan imunisasi MR,” lanjutnya.

Tatapan Buthet Harkita penuh harap. Selama perjalanan acap kali ia mengaku tidak tenang karena takut jika sewaktu-waktu muncul serangan Harimau Sumatera di hutan.

Apalagi mistis kehadiran Harimau Sumatera bagi warga setempat cukup kental. Warga setempat menghormati satwa tersebut layaknya nenek moyang

Bahkan, satwa-satwa liar itu konon akan menampakkan diri bila masyarakat menyalahi norma adat setempat. Mereka juga akan menyerang dan memakannya sebagai peringatan kepada warga. Karena jarak tempuh yang jauhnya dan sulitnya medan, banyak petugas tak berani jalan kaki melewati jalan berlumpur di lokasi tersebut. Mereka takut terpeleset hingga jatuh dari ketinggian.

Jarak antara Desa Sebelat ke Sungai Lisai mencapai 15 kilometer jika ditempuh dengan berjalan kaki. Jika rute itu ditempuh Pergi-Pulang (PP), itu berarti Buthet sudah biasa berjalan kaki sejauh 30 kilometer atau selama 12 jam dalam sehari.

Namun jadwal kedatangan Buthet ke desa binaannya itu tak menentu tergantung situasi. Apabila dua kali setiap bulan, berarti Buthet sudah biasa berjalan kaki sejauh 60 kilometer atau selama 24 jam dalam dua hari.

Ia menuturkan hanya digaji Rp 2,7 juta sebulan. Walaupun bekerja di pelosok, namun pemberlakuan gaji tetap sama dengan petugas kesehatan lainnya di daerah itu.

“Namanya harapan, keinginan untuk mendapatkan akses, internet dan jaringan listrik di tengah hutan pun pasti ada,” tutupnya.

Bidan Luar Biasa

Warga Sungai Lisai, Arbiah (33) mengatakan, Buthet Harkita adalah bidan yang luar biasa di desanya. Warga setempat merasa nyaman dengan kehadiran bidan desa tersebut.

Puluhan anak Sungai Lisai sangat menginginkan bantuan kesehatan dari tangan Buthet. Sebab, fasilitas kesehatan yang ada di pelosok itu serba minim.

“Warga benar-benar mendukung, jelas itu adalah pilihan kami,” katanya.

Atas penjelasan Buthet, seluruh orang tua mau mengimunisasi anaknya dengan vaksin MR yang dikampanyekan pemerintah tahun 2018 lalu di daerah itu.

“Iya pak, kalau bisa dicegah, kata bu bidan (Buthet, red) MR itu baik untuk kekebalan tubuh anak,” sambungnya.

Ia juga berpesan agar para orang tua lainnya khususnya ibu, untuk rutin mengecek kesehatan dan berupaya mencegah penyakit dengan imunisasi anak.

Sebab, menurutnya perlu waktu, tenaga, dan biaya yang besar apabila anaknya mengidap penyakit. Bahkan, bisa menyebabkan kematian.

“Vaksin campak itu untuk melindungi anak dari penyakit campak dan agar tidak menularkan pada anak lain. Kami pikir itu penting pak,” ucapnya.

Angin Segar Bagi Warga Sungai Lisai

Kepala Desa Sungai Lisai, Hajron Hadi mengaku, kehadiran para petugas kesehatan di desanya merupakan angin segar bagi masyarakat yang tinggal di daerah itu.

Sebab, ia menjadi saksi bertahun-tahun bagaimana banyak bocah harus meninggal dunia di perjalanan lantaran ingin berobat ke Puskesmas yang berada di Desa Ketenong Jaya yang jaraknya lebih kurang enam jam berjalan kaki.

Dia tidak menampik desanya jarang tersedia fasilitas kesehatan seperti daerah lain. Tak jarang anak di daerah itu tidak mendapatkan hak untuk sehat.

“Tidak ada kendaraan untuk menjemput warga yang sakit. Kalaupun ada kendaraan, mesti menggunakan kendaraan dengan motor yang sudah dimodifikasi, makanya banyak yang

memilih ditandu dengan alat sederhana yang menggunakan sebatang bambu dan kain sarung,” kata Hajron.

Dia menyatakan, pemerintah desa selalu mendukung kegiatan imunisasi MR secara massal untuk anak usia 9 - 15 bulan yang digelar di posyandu desa tiap bulan ketimbang harus ditandu lantaran akses ke desa itu sulit dilalui kendaraan.

Menurut Hajron, panas dan demam sering terjadi pada anak-anak. Tak sedikit orangtua merasa bingung saat anaknya mengalami hal tersebut. Bahkan, dalam kondisi panik dan tidak tahu harus melakukan apa.

Kampung ini memang hanya bisa diakses dengan berjalan kaki atau dengan motor khusus. Selama ini warga hanya berobat seadanya menggunakan ramuan tradisional sebelum petugas kesehatan datang.

“Biasanya mengandalkan tenaga dukun. Makanya, apabila ada petugas kesehatan datang, warga di desa pasti senang,” sambungnya.

Tahun ini, sebagian jalan Desa Sudah mendapatkan izin dari Balai Besar TNKS untuk diperkuat strukturnya dari jalan Desa Sebelat Ulu menuju Sungai Lisai.

Kondisi infrastruktur jalan yang diperbolehkan berupa membangun konstruksi rabat beton dengan panjang jalan 15 kilometer dan lebar jalan 2 Meter.

Namun demikian, ada jalan sekitar 3 kilometer yang berbahaya dan licin jika dilalui kendaraan karena belum dibangun. Makanya, banyak warga tetap memilih menandu pasien menggunakan sarung.

Apalagi Sungai Lisai ditetapkan sebagai kawasan konservasi maka kawasan yang mereka huni adalah situs warisan dunia. “Unesco meminta TNKS menjaga daerah ini, makanya tahun ini jalan hanya bisa dibuka paling lebar 2 meter,” ungkapny.

Imunisasi Tetap Berlanjut

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong memastikan di Lebong belum ada wabah. Namun, sebagai antisipasi pihaknya sudah memberikan delapan jenis imunisasi alias kekebalan tubuh kepada masyarakat yang diberikan sejak tahun 2017 hingga 2019.

Khusus pemberian vaksin MR, sebanyak 24.102 anak atau 95 persen berhasil divaksin MR. Target sebelumnya pemberian vaksin MR menjangkit 25.512 anak yang harus disuntik.

Meski keberhasilannya telah melampaui target, program vaksin MR ini masih terus berjalan hingga akhir bulan Desember 2019 mendatang.

“Tetap berjalan. Karena kami punya tanggung jawab dengan capaian 95 persen dari pemerintah pusat,” kata Kadis Kesehatan Lebong, Rachman, Kamis (5/12).

Menurut Rachman, pada prinsipnya Imunisasi Program adalah Imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.

Sedianya Imunisasi Program terdiri atas Imunisasi Rutin, Imunisasi Tambahan, dan Imunisasi Khusus. Ada delapan imunisasi yang diberikan dalam tiga tahun di daerah itu, di antaranya Hepatitis B 0 (HB 0) yang capaian pada tahun 2017 mencapai 82,0 persen, 2018 mencapai 80,2 persen, dan 2019 mencapai 72,3 persen.

Kemudian, BCG/Polio 1 pada tahun 2017 mencapai 93,1 persen, 2018 mencapai 81,8 persen, dan 2019 mencapai 65,2 persen. Lalu, DPT-HB-HIB 1/Polio 2 pada tahun 2017 mencapai 91,7 persen, 2018 mencapai 88,6 persen, serta 2019 mencapai 78,4 persen.

Selanjutnya, DPT-HB-HIB 2/Polio 3 pada tahun 2017 mencapai 89,5 persen, 2018 mencapai 87,2 persen, dan 2019 mencapai 74,1

persen. DPT-HB-HIB 3/Polio 4 pada tahun 2017 sebesar 84,8 persen, 2018 sebesar 84,5 persen, dan 2019 sebesar 70,5 persen.

Capaian untuk imunisasi inactivated polio vaccine (IPV) pada tahun 2017 sebesar 94,6 persen, 2018 sebesar 94,0 persen, dan 2019 sebesar 72,4 persen. Kemudian, imunisasi MR pada tahun 2017 sebesar 94,6 persen, 2018 sebesar 94,0 persen, dan 2019 sebesar 72,4 persen.

Sementara itu, Imunisasi dasar lengkap pada tahun 2017 mencapai 94,6 persen, pada tahun 2018 sebesar 94,0 persen, dan pada tahun 2019 sebesar 72,1 persen.

“Dengan Imunisasi, penyakit cacar telah berhasil dibasmi, dan Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar pada tahun 1974. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” demikian Rachman.

MUI Daerah Dukung Lanjutan Program Imunisasi

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebong, Amin Amir memastikan mendukung Dinkes Lebong melanjutkan program Imunisasi MR guna meningkatkan kekebalan tubuh.

Sebelumnya, MUI Pusat melalui Fatwa MUI Nomor 33 tahun 2018 akhirnya membolehkan pemberian vaksinasi MR dilanjutkan.

“Pada prinsipnya, imunisasi memiliki manfaat yang sangat besar dan bisa menyelamatkan jiwa. Tentunya, kita juga memiliki kewajiban untuk membantu semua program yang memiliki tujuan mulia, apalagi imunisasi adalah salah satu kunci kesehatan masyarakat,” ucap Amir.

Menurutnya, MUI daerah selalu mengacu pada keputusan MUI pusat. Apalagi dalam fatwa tersebut, imunisasi MR dinyatakan mubah karena kedaruratan dan tidak adanya alternatif lain.

“Karena tidak ada obat lain. Jadi, untuk imunisasi MR diperbolehkan,” tutur Amir. [tmc]

Kategori Foto

Juri Kategori Foto

Ng Swan Ti

Pannafoto Institute

Pewartanya mengemban tugas sebagai pembawa pesan. Mereka berada di garis depan; melaporkan berbagai peristiwa bagi publik melalui foto-foto yang mereka hasilkan. Selain menguasai teknik fotografi dan kode etik jurnalisisme, seorang wartawan foto perlu memikirkan gagasan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca.

Gagasan mengangkat isu anak, dengan didukung pengetahuan tentang hak anak menjadi syarat utama bagi wartawan foto untuk mengikuti “Penghargaan Karya Terbaik Jurnalistik Tentang Anak 2020” kategori foto. Foto-foto terpilih tidak sekedar membingkai anak-anak dalam karya foto, tetapi mengusung isu pemenuhan hak anak khususnya kesehatan.

Arbain Rambey

AJI Indonesia

Lomba foto dengan tema sangat mengerucut seperti lomba foto yang diadakan Unicef/AJI ini di satu sisi sangat menantang, di sisi lain membuka peluang kemajemukan penafsiran peserta yang akan memperpanjang proses penjurian. Tapi kenyataannya pada pelaksanaan tahun 2020 ini, hasil-hasil foto yang masuk sungguh mengagumkan karena terbukti bisa menjangkau segenap pemikiran umum lomba, juga menampilkan realita-realita yang selama ini “belum beredar”.

Pembatasan bahwa hanya jurnalis resmi yang boleh ikut mengirimkan karya, juga karya harus pernah dipublikasikan, adalah sebuah “hambatan” untuk tergalinya karya-karya lain yang mungkin bahkan lebih “mengejutkan”. Alangkah baiknya

di masa mendatang. lomba foto yang luar biasa ini bisa diperluas untuk kalangan umum, juga untuk karya jurnalis yang tidak sempat terpublikasikan.

Ali Aulia Ramly
UNICEF Indonesia

Foto berjudul “Harapan” adalah favorit saya. Alih-alih menekankan pada kemalangan, foto ini menunjukkan harapan, semangat, martabat melalui senyum si anak. Dari sisi visual, fotografernya dengan cerdas mengambil sudut pandang dua sisi yang berlawanan dari anak yang sama, yang botak dan ‘yang berambut.’

Adek Berry
Agence France-Presse (AFP)

Tahun ini kami para juri telah memilih fotografi jurnalistik terbaik anak Indonesia yang menggambarkan hak dan potensinya. Lomba foto jurnalistik UNICEF AJI ini memberikan kesempatan yang besar untuk jurnalis foto menampilkan anak Indonesia dengan latar belakang budaya, geografis, ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Saya berharap ke depan, jurnalis foto Indonesia mau lebih menggali dan menampilkan lewat gambar keunikan potensi anak Indonesia.



Ignas Kunda

Media Indonesia

Alumni Universitas Nusa Cendana, Kupang ini mengawali karir sebagai jurnalis video sejak 2009 di TVRI NTT. Saat ini, ia bekerja sebagai jurnalis video di Metro TV sejak 2011 dan jurnalis foto lepas sejak 2015.

PERJUANGAN WARGA KAMPUNG WOLOLUBA DEMI AIR KERUH



Dipublikasikan di Media Indonesia pada tanggal 26 Juli 2019
Oleh **Ignas Kunda**

Krisis air bersih kembali melanda warga Kampung Wololuba, Desa Rendu Wawo, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat warga harus berjalan sejauh satu kilometer untuk mengambil air keruh di embung.

Pada pagi dan sore hari, sejumlah ibu dan anak-anak perempuan dan laki-laki keluar kampung dengan menjinjing jeriken berukuran 5 liter untuk menimba air di embung dekat kampung. Beberapa ibu ada yang menggunakan bere (tempat penampung dari anyaman daun lontar dengan tali gantungan) untuk mengisi dua buah jeriken agar bisa memikul lebih banyak.



Abriansyah Liberto

Tribun Sumsel

Ia mengawali karir sebagai jurnalis foto sejak 2009 dan pernah bekerja di Sumsel Post dan Media Monica, salah satu media dalam Grup Jawa Pos. Sejak tahun 2012, Abriansyah bekerja sebagai jurnalis foto di Tribun Sumsel hingga saat ini.

Abriansyah juga menjabat sebagai Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palembang sejak 2016 - sekarang.

UDARA BAHAYA BAGI ANAK, SEKOLAH DILIBURKAN



Dipublikasikan di Tribun Sumsel pada tanggal 14 Oktober 2019
Oleh **Abriansyah Liberto**

Siswa sekolah dasar berjalan di kawasan Jakabaring yang diselimuti kabut asap, Palembang, Senin (14/10/2019). Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang tersebut berasal dari asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Pada pagi hari kualitas udara (PM10) di Palembang telah mencapai pada level berbahaya.



Masyudi Firmansyah

Bisnis Sulawesi

Pria asal Makassar yang memiliki kegemaran di bidang fotografi, komputer dan olahraga ini, bekerja sebagai jurnalis foto di media mingguan Bisnis Sulawesi.

HARAPAN



Dipublikasikan di Bisnis Sulawesi pada 24 Februari 2020
Oleh **Masyudi Firmansyah**

Margareth anak berusia 7 tahun penderita Tumor syaraf asal Flores, selalu mempunyai harapan untuk bisa sembuh dari kankernya dan berpenampilan normal seperti anak-anak perempuan lainnya. Kepalanya yang gundul diberikan rambut dengan bantuan Spidol dicermin Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Makassar, Rabu, (31/10/2018). Margareth menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Juli 2019, dan belum sempat mengabdikan harapannya mempunyai rambut lagi.



Wisnu Widiartoro

Harian Kompas

Ia bekerja sebagai jurnalis foto di *Harian Kompas* sejak 2003 hingga sekarang. Sejak 2007, Wisnu ditugaskan di *Harian Kompas* Jakarta setelah sebelumnya ditugaskan di *Harian Kompas* Biro Jawa Timur dan Jawa Barat.

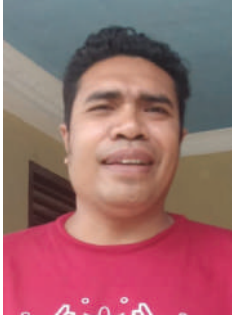
Tugas peliputan yang pernah dijalaninya, antara lain: meliput saat bencana tsunami di Pangandaran (2006), bencana gempa bumi Bengkulu (2007), sejumlah KTT seperti KTT Asia Afrika dan KTT IORA, bencana gempa bumi di Nepal (2015), bencana kelaparan dan gizi buruk di Kabupaten Asmat (2018), penugasan di Istana Kepresidenan (2014-2018).

PASIEN CAMPAK DAN GIZI BURUK



Dipublikasikan di Harian Kompas pada 13 Januari 2018
Oleh **Wisnu Widiyanto**

Seorang anak dirawat di RSUD Agats, Papua, karena menderita campak, Jumat (12/1). Sepanjang Januari ini RSUD Agats melayani 34 pasien rawat jalan dan 29 pasien rawat inap penderita campak. Kemarin, tiga dari lima belas pasien campak di RS tersebut diperbolehkan pulang ke rumah.



Hengky Ola Sura

The Jakarta Post

Lulusan Universitas Flores yang bekerja sebagai jurnalis foto di The Jakarta Post untuk area Flores-NTT. Hengky juga adalah staf redaksi Media Lokal Ekora NTT.

POSYANDU BAPAK



Dipublikasikan di The Jakarta Post pada 13 Januari 2018
Oleh Hengky Ola Sura

Father Posyandu Program from Boru Kedang Village, in Wulanggitang Sub-district, East Flores Regency, East Nusa Tenggara. This program has been running from 2015 long before the Regent of East Flores launched the Gerobak Cinta program to storm malnutrition.



Iggoy El Fitra

Antara Foto

Pria asal Padang yang bernama lahir Fitra Yogi ini adalah jurnalis foto yang bekerja untuk Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara sejak tahun 2010 - sekarang.

Beberapa foto jurnalisme memenangkan penghargaan kompetisi foto nasional dan pernah dimuat dalam publikasi internasional, antara lain Majalah Time, Arabnews, ABC News, dan Washington Post. Selain itu, ia menulis cerpen, puisi, dan strip komik untuk surat kabar lokal Padang dan Sumatera Barat.

PENCEMARAN PANTAI MUARO LASAK



Dipublikasikan di Antara Foto pada 5 Maret 2019

Oleh **Iggoy El Fitra (Fitra Yogi)**

Seorang anak mencari kaleng bekas di antara tumpukan sampah yang datang dari hulu, di Pantai Muaro Lasak, Padang, Sumatera Barat, Selasa (5/3/2019).



Chaideer Mahyuddin

Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta

Sejak tahun 2008 bekerja sebagai jurnalis foto di Agence France-Press (AFP) Biro Jakarta. Karyanya pernah dipublikasikan di media lokal dan internasional, antara lain: Majalah Time, The Telegraph, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, Focus Magazine Germany, ABC News, dll.

Chaideer pernah menerima beberapa penghargaan, yang terbaru adalah Juara I Anugerah Pewarta Foto Indonesia (2019). Selain itu, dia juga pernah berpartisipasi dalam beberapa ajang pameran foto, salah satunya Pameran Foto Peringatan 15 Tahun Gempa dan Tsunami Aceh (2019).

VAKSIN SEHAT



Dipublikasikan di Agence France Presse (AFP) Biro Jakarta pada 29 Oktober 2019

Oleh **Chaideer Mahyuddin**

Salah satu murid menahan sakit saat mendapat suntikan vaksin difteri di salah satu sekolah di Banda Aceh, Selasa (29/10/2019).



Theo Rizky

Tribun Pekanbaru

Ia adalah lulusan Universitas Islam Bandung tahun 2005. Theo bekerja sebagai jurnalis di Tribun Pekanbaru sejak tahun 2007 - sekarang.

PAHLAWAN SUPER IKUT MERIAHKAN PEMBERIAN VAKSIN MR PERDANA DI RIAU



Dipublikasikan di Tribun Pekanbaru pada 1 Agustus 2018
Oleh **Theo Rizky**

Imunisasi Measles Rubella (MR) diberikan kepada para murid di SDN 002 Pekanbaru, Selasa (1/8/2018). Pelaksanaan imunisasi yang dimeriahkan dengan penampilan karakter pahlawan super tersebut merupakan tanda dimulainya pelaksanaan imunisasi MR di Riau. Campak dan rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus campak dan rubella. Campak dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti radang paru, radang otak, kebutaan, gizi buruk bahkan kematian. Sedangkan rubella biasanya penyakit ringan pada anak, akan tetapi bisa menulari ibu hamil pada trimester pertama awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan.



Agung Parameswara

The Jakarta Post

Ia memulai karir sebagai jurnalis foto sejak tahun 2010 dan memiliki pengalaman bekerja di The Jakarta Post, Getty Image News dan Barcroft Media.

Karya-karya pria yang menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Udayana ini pernah dipublikasikan di media nasional dan internasional, antara lain: The New York Times, Terra Mater Magazine Austria, Days Japan, Reuters News Wire, GEO Germany, TIME Magazine dan Getty Images.

RAY OF HOPE



Dipublikasikan di The Jakarta Post pada 13 januari 2018
Oleh **Agung Parameswara**

Ulil and Safitri walk hand in hand as they practice with their prosthetic legs they have long waited for.



Riski Cahyadi

Tribun Medan

Menjadi jurnalis foto sejak 2005, Riski pernah bekerja di Harian Umum Medan Pos, LKBN Antara dan Metro TV. Sekarang, ia bekerja sebagai jurnalis foto di Harian Tribun Medan sejak 2012.

Ia pernah meraih berbagai penghargaan, yang terbaru adalah Juara III Lomba Foto Jurnalistik Pewarta Foto Indonesia (2020).

GUNAKAN MASKER HINDARI DEBU SINABUNG



Dipublikasikan di Tribun Medan pada 19 Februari 2018
Oleh **Riski Cahyadi**

Dua bocah melintasi desa yang terkena dampak debu vulkanik erupsi Gunung Sinabung di Desa Gurukinayan, Karo, Sumatera Utara, Senin (19/2/2018).

Kategori TV

Juri Kategori TV

Revolusi Riza

AJI Indonesia

Hal menggembirakan dari Lomba Karya Jurnalistik Terbaik tentang Anak untuk Kategori Televisi adalah meningkatnya kesadaran jurnalis-jurnalis televisi akan hak-hak anak. Dari sekitar 80 karya jurnalistik yang lolos seleksi awal dan dimajukan ke Dewan Juri, hampir tidak ada persoalan dengan etika jurnalistik untuk pengambilan visual dan audio anak. Jurnalis-jurnalis yang mengirimkan karyanya sudah memahami perlindungan hak anak. Karya jurnalistik yang dikirim pun beragam, dari media televisi yang berpusat di ibukota Jakarta hingga televisi-televisi lokal dari berbagai kota di tanah air. Hanya saja, harus diakui jika masih terasa perbedaan kualitas, terutama dari sisi teknis, antara karya jurnalistik yang dikirim oleh media televisi yang berpusat di ibukota dengan sejumlah karya dari media televisi lokal. Ini harus menjadi perhatian banyak pihak agar kualitas jurnalis televisi lebih merata di tanah air.

Mimah Susanti

Komisi Penyiaran Indonesia

Memberikan penilaian kepada puluhan karya jurnalistik yang diproduksi dengan sentuhan cerita yang penuh dengan kreatifitas bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi saya sebagai seorang juri diminta untuk objektif. Terkadang tanpa disadari subjektifitas masuk dalam penilaian karena terbawa dengan emosi dan hanyut dalam cerita.

Ide cerita sebuah karya Jurnalistik banyak lahir dari realitas yang dihadapkan pada idealitas. Dengan menceritakan sebuah realitas, diharapkan dapat menjawab rasa ingin tahu masyarakat tentang informasi yang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut

tentang fakta dan kebenaran. Untuk membuktikannya, jurnalis akan menggali informasi yang utuh dan lengkap, dengan melakukan proses penelusuran/investigasi. Narasumber yang dihadirkan akan semakim menguatkan sebuah cerita menjadi lebih nyata. Di dukung oleh gambar/rangkaian gambar serta efek suara, sehingga cerita menjadi lebih menarik.

Dari 10 (Sepuluh) nominator, kami para juri memberikan penilaian bahwa “Anakku Tidak Akan Jadi Teroris”, menjadi pemenang pada kompetisi karya jurnalistik Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen bekerja sama dengan UNICEF. Diantara semua tema, karya yang satu ini memang berbeda. Fakta anak-anak bangsa yang dihadapkan pada realitas keluarganya yang masuk dalam jaringan terorisme. Terorisme adalah sebuah ancaman bagi negara, tindakannya menimbulkan ketakutan dan kengerian. Anak-anak yang secara psikologis belum mampu untuk memilih, didoktrin untuk masuk dalam dunia radikalisme. Doktrin bahwa apa yang dilakukan adalah untuk membela agama, dan kematian syahid baginya. Cerita ini menghadirkan nara sumber yang mau membuka diri tentang fakta dan menyampaikan harapannya bagi anak-anak mereka untuk “lepas” dari ideologi radikalisme yang melekat pada keluarganya. Orang tua membentengi anak-anaknya untuk tidak memupuk kebencian dan dendam dan fokus untuk menata masa depan.

Selamat untuk semua tim yang sudah bekerja keras. Kemenangan ini semoga semakin memotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi.

Kinanti Pinta Karana

UNICEF

Jurnalisme televisi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh platform lain yaitu kemampuan untuk menarik pemirsa secara immersiv dengan fasilitas audio dan visual. Paket berita televisi, seperti juga jurnalistik di platform-platform lain, adalah sebuah karya yang memadukan ketajaman angle, informasi akurat dari wawancara dengan narasumber yang kredibel dan relevan,

pengetahuan mendalam tim produksi dan peliputan yang terlibat tentang suatu topik, dan yang tidak kalah pentingnya: kemampuan untuk meramu elemen-elemen itu menjadi sebuah karya yang bermanfaat dan enak ditonton. Berdasarkan kriteria itu, pilihan saya jatuh pada karya bertajuk *Anakku Tidak Akan Jadi Teroris* yang sudah disiarkan oleh CNN Indonesia TV. Kedalaman riset reporter dan tim yang bertugas cukup mengesankan. Melalui paket panjang itu, saya bisa merasakan gejolak emosi para narasumber yang memilih meninggalkan jalan pedang dan berangsur kembali ke masyarakat. Topik ini patut dipujikan karena cukup jarang diangkat di pemberitaan. Untuk para peserta yang karyanya belum terpilih, tetap semangat dan sebagai pegiat hak anak, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk komitmen teman-teman memberikan sorotan dan porsi airtime bagi peliputan berkualitas yang bisa membantu setiap anak mendapatkan haknya.

Yovantra Arief

Remotivi

“Meski berada di bawah kategori karya jurnalis televisi, banyak dari karya yang saya nilai juga berupa produk audio visual media daring. Selain itu, liputan televisinya pun beragam, ada yang berupa feature dokumenter, straight news, atau soft news. Perbedaan format dan medium ini merupakan tantangan tersendiri dalam melakukan penilaian. Di luar tantangan ini, karya-karya yang muncul cenderung menggunakan pendekatan emosi kesedihan. Pendekatan semacam ini memang sering dianggap efektif dalam membangkitkan empati dan rasa peduli penonton terhadap isu yang diperbincangkan. Namun pendekatan ini punya masalahnya tersendiri, apabila mengeksploitasi kesedihan dari subjek liputan. Pendekatan ini juga seringkali terjebak dalam nada yang bermasalah, yakni menjadikan subjek liputan sebagai “korban” yang pasif, yang harus diselamatkan oleh “orang baik”. Meski empati dan kepedulian sosial yang riil merupakan salah satu impact penting dari jurnalisme, penggambaran subjek yang berdaya juga merupakan salah satu tantangan etis dalam penggarapan karya

jurnalisme. Pemenang dalam liputan anak terbaik kategori televisi tahun 2020 ini, dalam penilaian saya, menjawab dua tantangan ini: ia merupakan karya jurnalisme yang mampu memanfaatkan mediumnya dengan maksimal untuk menciptakan karya yang selain ketat secara metode jurnalistik, juga menimbulkan dampak. Ia mampu mengeksplorasi keragaman emosi serta harapan-harapan dari subjek yang secara aktif berjuang dalam hidupnya.”



Nima Grafina Sirait

Kompas TV

Ia adalah alumni jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Nima mengawali karir di DAAI TV sebagai reporter news feature dan program dokumenter sejak Juli 2006 - Februari 2012. Kemudian, bergabung di Kompas TV sebagai produser program investigasi mendalam dan talkshow sejak Februari 2012 - sekarang.

Saat ini bertanggung jawab untuk program Jejak Kasus di Kompas TV, sebuah program yang melaporkan tentang isu hukum, kebudayaan, sosial, dan kasus kriminal di Indonesia.

MELAWAN DIFTERI, IMUNISASI WAJIB

Dipublikasikan di Kompas TV

Oleh **Maryo Sarong dan Dicky Kurniawan**

Tahun 2017, wabah difteri mengagetkan negara ini. Wabah yang telah lama hilang ini tiba-tiba kembali, tak hanya pada anak-anak tapi juga terjadi pada orang dewasa.

Difteri dikenal pada tahun 1920-an dan sempat menjadi wabah di banyak negara. Program imunisasi yang sudah berlangsung selama lebih dari 50 tahun di Indonesia sejatinya telah membuat Indonesia bebas dari difteri. Selama puluhan tahun, difteri menjadi penyakit langka di negeri ini. Tapi tahun 2017 hantu itu kembali. Hingga Desember 2017, dilaporkan terjadi 593 kasus difteri di 23 provinsi. Kasus difteri terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur.

Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri korin bakterium difteriae (*corynebacterium diphtheriae*). Bakteri ini bersarang di tenggorokan dan kulit, dengan membentuk selaput putih tebal. Selaput putih itu bisa menutup saluran pernafasan, hingga menyebabkan kematian.

Kemunculan difteri yang mengakibatkan kematian tahun 2017 mengejutkan banyak pihak. Sebab, hingga 2017, pemberian imunisasi di Indonesia terbilang berhasil. Difteri bisa dikendalikan dengan pemberian vaksin DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus). Pada anak-anak, vaksin DPT diberikan sebanyak lima kali.

Setelah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, Kementerian Kesehatan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan Outbreak Responses Immunization (ORI). ORI adalah pemberian imunisasi sebagai tindakan penanggulangan KLB suatu penyakit. Pemerintah lalu memberikan imunisasi DPT pada semua anak yang berusia 15 tahun ke bawah yang tinggal di wilayah KLB.

ORI menjadi upaya untuk meningkatkan kekebalan individu dan komunitas sehingga difteri tidak meluas.



Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Sri

CNN Indonesia TV

Ia bekerja di CNN Indonesia TV untuk area Bali dan sekitarnya sebagai reporter dan produser lapangan. Alumni Universitas Udayana ini, sebelumnya pernah bekerja di Dewata TV sejak 2008-2015 sebagai reporter, script editor dan news producer.

BEREBUT SEHAT DI UJUNG KARANGASEM

Dipublikasikan di CNN Indonesia TV, 23 Desember 2019

Oleh **Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Sri**

Stunting dan gizi buruk masih menjadi masalah kesehatan utama pada anak di Indonesia. Riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada tahun 2018 menunjukkan angka stunting di Indonesia masih berada di atas angka 30 persen.

Angka tersebut masih berada di atas angka yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu sebesar 20 persen. Di Karangasem, Bali, upaya menekan angka masalah gizi pada anak dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan pendekatan sosial budaya untuk memberikan pemahaman kesehatan pada ibu dan anak.

Komang Budiani dan Putu Suandewi, dua orang bidan yang bekerja pada sebuah yayasan di Dusun Muntigunung, Karangasem, Bali, rela menempuh perjalanan yang berliku dan naik turun bukit demi berbakti pada profesi mereka untuk menyetatkan ibu dan anak. Keduanya berboncengan motor dan mendarangi dusun tersebut, tak peduli meski kerap motor yang mereka tumpangi tergelincir karena kondisi jalan yang tak layak.

Di balik bukit, ada 36 kelompok warga yang terpisah oleh perbukitan tinggi serta ngarai yang terjal dan dalam. Masing-masing kelompok masyarakat sepakat membuat balai banjar sederhana yang berlokasi di cabang air yang ada di masing-

masing kelompok. Balai banjar ini setiap waktu luang dimanfaatkan oleh para ibu untuk membawa anak-anak mereka mengerjakan berbagai aktivitas dari menganyam kerajinan, hingga membuat perlengkapan upacara.

Meski jarak antar kelompok warga berjauhan, tapi Komang Budiani dan Putu Suandewi tak gentar. Sejak tahun 2015, mereka rutin mendatangi masing-masing kelompok warga untuk memberikan edukasi tentang kesehatan ibu dan anak. Keduanya mengakui, upaya mereka tak sia-sia. Kini, banyak ibu yang memilih melahirkan di fasilitas kesehatan, padahal sebelumnya warga merasa cukup meski melahirkan di rumah.

Untuk mempermudah komunikasi, masing-masing kelompok dibentuk kader atau perwakilan. Tujuannya, agar jika terjadi permasalahan kesehatan dapat segera diatasi.

Bagi kedua bidan ini, pendekatan sosial budaya di masyarakat lebih efektif untuk memberikan pemahaman dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Upaya yang mereka lakukan mampu menekan angka stunting dan kurang gizi di dusun tersebut.



Kintan Wida Bastari

DAAI TV

Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Interstudi tahun 2016 yang bekerja sebagai reporter di DAAI TV sejak Mei 2017 - sekarang.

Selain itu, dia juga memiliki pengalaman kerja sebagai presenter TV Streaming (Mivo TV) sejak 2016 hingga sekarang dan reporter Creative Indigo Production (Silet) di tahun 2016.

LANGKAH SUNYI IKMAH

Dipublikasikan di DAAI TV, 1 Mei 2019

Oleh **Kintan Wida Bastari**

Ikma, gadis berusia 17 tahun terlahir dengan kondisi tuna rungu. Orang tua Ikma tak menyadari bahwa anaknya terlahir tanpa bisa mendengar.

Hal tersebut baru mereka sadari setelah Ikma berusia dua tahun. Sejak itu mereka berupaya melakukan pengobatan. Sayangnya upaya tersebut sia-sia.

Ikma sempat tak disekolahkan oleh kedua orang tuanya. Namun lama kelamaan Sukidi, orang tua Ikma, tak tega melihat anaknya tak bersekolah. Usia 8 tahun Ikma masuk Taman Kanak-kanak. Usia 9 tahun Ikma masuk SD. Sukidi ingin anaknya tak malu dan tetap bisa bergaul dengan teman-temannya.

Ikma lalu didaftarkan ke SDN Kebonharjo. Wakijem, Kepala Sekolah SDN Kebonharjo mengakui menerima Ikma karena anak itu memang perlu sekolah. Meski bukan sekolah inklusi, ia melaporkan kebutuhan Ikma pada dinas setempat.

Wakijem mengakui, untuk upaya akademik pihaknya sudah tidak bisa mengupayakan karena memang tak memiliki kemampuan mengajar khusus seperti itu. Tapi ia menyadari, Ikma perlu memiliki ketrampilan atau life skill, bersosialisasi, dan kemudian melayani dirinya sendiri.

Ikamah beruntung, ia dipertemukan dengan Nana Nawangsari, Pendiri Komunitas Dunia Tak Lagi Sunyi. Nana menangkap sejak awal, kebutuhan Ikamah adalah bahasa, agar bisa berkomunikasi. Sebab Ikamah sama sekali tak paham bahasa isyarat. Ikamah hanya bisa dipahami oleh orang tuanya.

Nana lalu bekerjasama dengan Pusbisindo, dan akhirnya disepakati, Pusbisindo akan bekerja sama dengan sekolah untuk menyediakan pengajar khusus.

Sekarang, di usia 17 tahun, Ikamah duduk di kelas 6 SD. Nana Nawangsari memilih mengembangkan kehidupan sosial Ikamah. Pergaulan sosial Ikamah harus dilebarkan dengan bertemu banyak teman bukan hanya teman sekitar sekolah dan rumahnya saja, tapi teman lain, terutama sesama teman tuli.

Tujuannya supaya Ikamah punya cita-cita, punya semangat untuk belajar, dan muncul rasa percaya dirinya.



Miftah Faridl
CNN Indonesia TV

La saat ini bekerja sebagai koresponden di CNN Indonesia TV.

Sebelumnya, Faridl memiliki pengalaman kerja di Harian Memorandum (2007-2010) dan Harian Surya (2010-2015).

Sudah beberapa penghargaan jurnalistik yang diterimanya, salah satunya adalah Diversity Award dan Fellowship Liputan Keberagaman (2018).



**Priyuda
Anangga Dipa**
CNN Indonesia TV

Pria bernama lengkap Priyuda Anangga Dipa ini bekerja sebagai jurnalis foto di CNN Indonesia sejak tahun 2014 - sekarang.

Lulusan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2012 ini memiliki kegemaran dalam bidang desain tata letak (layout design) dan videografis.

ANAKKU TAK AKAN MENJADI TERORIS

Dipublikasikan di CNN TV

Oleh **Miftah Faridl dan Priyuda Anangga Dipa**

Aksi bom bunuh di Surabaya pada Mei 2018 menghentak publik. Aksi tersebut dilakukan oleh keluarga lengkap, ayah, ibu dan anak-anak mereka.

Aksi tersebut mengungkap kondisi terbaru aksi terorisme, melibatkan anak dan perempuan dalam aksi bom bunuh diri. Sebuah keprihatinan yang mendalam karena pelaku teror akhirnya melibatkan perempuan dan anak-anak yang belum paham ideologi dalam ideologi yang mereka paksakan.

Meski demikian, ternyata tak semua pelaku teror memiliki pemikiran yang sempit dan merasa melibatkan perempuan dan anak akan mempertemukan kembali mereka di surga. Sebagian di antara pelaku teror yang sudah tercerahkan menyadari kekerdilan mereka.

Beberapa pelaku teror yang diwawancarai oleh CNN mengakui, anak mereka adalah hal yang membuat mereka berubah. Jumirin, Ali Fauzi, dan Khairul Ghazali, yang pernah menjadi pelaku kekerasan berbasis agama akhirnya memutuskan untuk menghentikan mata rantai terorisme setelah melihat gejala radikalisme yang tumbuh di anak-anaknya sendiri.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dengan lugu oleh anak-anak mereka membuat mereka tak ingin apa yang mereka

alami dilakukan dan dialami juga oleh anak-anak mereka. Jumirin, misalnya. Ia terhenyak ketika mendengar anaknya bertekad akan membalas dendam pada mereka yang telah memenjarakannya.

Ali Fauzi juga menyatakan kekegetannya ketika mendengar sang anak minta diajari cara merakit bom dan hal-hal lain terkait aksi teror. Ali dan Jumirin memilih untuk mengajak anak mereka fokus pada pendidikan, dan meski tak mudah buat mereka, mengajarkan anak-anak mereka tentang pluralisme dan belajar menerima keragaman.

Hal tersebut tak mudah, karena mereka juga harus bisa menjelaskan pada anak-anak tentang luka-luka di tubuh mereka, bagaimana kehidupan mereka di masa lalu, sekaligus meminta agak anak-anak tersebut tak mengikuti jejak mereka.

Khairul Ghazali bahkan memilih mendirikan pesantren yang ia beri nama "Al Hidayah." Pesantren ini ia dirikan khusus untuk menampung anak-anak mantan teroris. Khairul Ghazali menyadari, anak-anak yang orang tuanya pernah menjadi pelaku teror tak mudah diterima masyarakat. Anak-anak itu juga hidup dalam stigma negatif, bahkan dikucilkan.

"Anak-anak itu secara mental terganggu. Mentalnya lemah, emosional, dan banyak yang bodoh dan tak bisa baca tulis. Dan ada kebencian kepada thogut, kepada lambang negara, bahkan pada pelajaran," ujar Khairul.

Khairul Ghazali, juga Jumirin dan Ali Fauzi bertekad untuk mengembalikan anak-anak mereka. Dari Islam yang mereka yakini penuh kebencian, amarah dan perang menjadi Islam yang rahmatan lil 'alamin. Mereka tahu itu bukan hal yang mudah, tapi mereka bertekad, apa yang mereka alami tak boleh dialami kembali oleh anak-anak mereka.



Fitriana Ambarwati

DAAI TV

Ia bekerja sebagai creative writer di DAAI TV sejak Desember 2018 hingga sekarang, setelah sebelumnya semasa menempuh pendidikan di Jurusan Televisi Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, sempat magang di media tersebut pada November 2015 - Januari 2016.

Sebelum berkarir di DAAI TV, ia pernah memiliki pengalaman bekerja di TVRI Yogyakarta pada tahun 2018 dan bergabung dalam tim Pemutaran Film di Desa, Dinas Kebudayaan DIY pada tahun 2012.

Ia sudah memiliki beberapa pengalaman dalam produksi program televisi dan film, antara lain: acara ragam berjudul Kacamata sebagai produser lini (2015) dan film Malam Minggu Kliwon (2018) sebagai produser.

HAN HAN BANTU TEMAN

Dipublikasikan di DAAI TV, 29 September 2019

Oleh **Fitriana Ambarwati**

Han Han Bantu Teman, adalah program yang dilakukan oleh seorang anak bernama Wajendra Hanif Athoillah Lutfi, dan Han Han adalah panggilannya. Han Han mengaku menyukai berbagai olah raga, sebab olah raga membuat tubuhnya selalu bugar. Ia rutin latihan taekwondo, atletik, dan berenang.

Sejak kecil ayah Han Han, yang ia panggil Abi, selalu mengajarkannya terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan. Kebiasaan yang dilakukan sang ayah membuat Han Han terinspirasi. Ia berjanji, akan menjadi anak dengan kepedulian sosial tinggi. Anak yang selalu mengutamakan nilai-nilai sosial kemanusiaan.

Han Han bersyukur karena ia terlahir normal dan sehat. Sebagai bentuk rasa syukur karena memiliki tubuh yang sehat, Han Han ingin membantu sesama. Tapi bukan membantu dengan uang, ia akan membantu dengan cara yang lain.

Pada bulan Mei 2019, ia memilih melakukan triathlon untuk mengumpulkan dana bagi seorang anak bernama Fahri yang ingin mengganti bola matanya dengan yang baru. Saat itu terkumpul dana hingga 12 juta rupiah dari tantangan yang ia lakukan. Han Han berhasil menaklukkan tantangan pertama yang menggabungkan lari, bersepeda dan berenang.

Han Han kemudian melakukan tantangan kedua, yaitu berlari

ke puncak gunung Gede. Kali ini ia berniat mengumpulkan dana untuk Zahira, seorang anak perempuan yang menderita kanker. Ia berharap bisa menyebarkan semangat, juga energi positif bagi teman-teman yang sedang berjuang melawan kanker.



Rangga Umara

CNN Indonesia TV

Ia bekerja sebagai produser di CNN Indonesia TV dan anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya.

Alumni Universitas Sebelas Maret Solo ini juga memiliki pengalaman bekerja di Radio Prambors Solo, Radio Suara Surabaya, Metro TV Biro Surabaya.



Andreas Wicaksono

CNN Indonesia TV

Pria yang berdomisili di Surabaya ini, adalah kamerawan CNN Indonesia sejak Desember 2015 - sekarang.

Sebelum bergabung dengan CNN Indonesia, ia memiliki pengalaman bekerja di RCTI Surabaya sejak Januari 2004 - Juni 2013.

Selain sebagai jurnalis, Andreas juga adalah dosen luar biasa di Universitas Airlangga Surabaya sejak tahun 2012 dan salah satu pengurus AJI Surabaya.

PEMBERI HARAPAN ODHA – HEROES

Dipublikasikan di CNN Indonesia TV pada 5 Mei 2019

Oleh **Andreas Wicaksono dan Rangga Umara**

Jika ada perempuan dengan status Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) hamil, maka anaknya dipastikan tertular. Itu sebabnya, perempuan yang terdeteksi memiliki virus HIV dalam tubuhnya disarankan tidak memiliki anak, atau jika terlanjur hamil disarankan melahirkan dengan proses operasi caesar.

Ibu dan anak ODHA (Orang Dengan HIV Aids) rentan stigma. Mereka ditolak warga, diusir dan dijauhi karena dianggap bisa menularkan, termasuk dianggap sebagai aib. Penderitaan ibu dan anak ODHA menjadi berlipat. Setelah ibuang keluarga, ditolak sana sini, akses mereka terhadap layanan kesehatan juga sulit.

Tapi sebuah rumah di Jawa Timur menjadi rumah yang dengan kasih sayang menampung ODHA. Dan sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu. Didirikan oleh Rini Setyowati, akrab dipanggil Vera, pada 1995 di bawah naungan Yayasan Abdi Asih.

Awalnya Vera giat melakukan kampanye untuk mencegah penularan HIV dengan menggiatkan penggunaan kondom di lokasi prostitusi. Tapi Vera akhirnya melebarkan aktivitas setelah melihat banyak perempuan dan anak ODHA terlantar dan menjadi gelandangan di jalan. Mereka diusir oleh keluarga, dan dianggap sebagai mimpi buruk yang hadir menghantui warga.

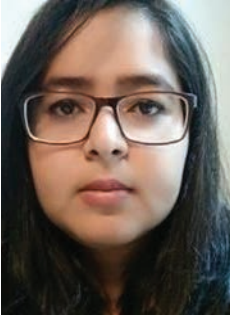
Tak hanya menjadi miskin, mereka juga tak bisa mendapatkan layanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Hingga kini, Vera telah merawat lebih dari 300 penderita HIV-AIDS yang terlantar. 153 diantaranya adalah anak-anak. Dari penuturan Vera kepada CNN, biasanya anak-anak itu diantar oleh Dinas Sosial untuk dirawat di Yayasan Abdi Asih.

Anak-anak itu dibuang oleh orang tuanya karena stigma warga. Ada juga anak dan orang tua yang diusir dari tempat tinggal mereka karena warga khawatir tertular. Vera menerima mereka, tanpa pernah menolak sama sekali. Vera mengaku sedih, karena ODHA juga manusia yang memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlakuan layak.

Kebanyakan, ODHA yang dirawat adalah mereka yang sudah berada dalam kondisi buruk karena terlambat diobati. Tak hanya orang tuanya, tapi juga anak-anak yang tertular. Mereka datang atau diantar Dinas Sosial dalam kondisi penyakit yang sudah kronis.

Meski demikian, Vera tetap menerima mereka. Vera menjadi orang terakhir yang memeluk, menyuapi, memberi susu, dan menghibur para ODHA. Ia memilih menemani dan memperlakukan ODHA dengan kasih sayang, sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir.



Latifah Zaid Nahdi

Narasi TV

Ifa, begitu ia akrab disapa, adalah content creator di Narasi TV sejak Desember 2017 - sekarang.

Ia juga pernah bekerja di Trans TV, Tempo Inti Media dan CNN Indonesia.

MELAWAN BULLY DENGAN BALET

Dipublikasikan di Narasi TV, 31 Oktober 2018

Oleh **Latifah Zaid Nahdi dan Pandu Prakoso**

Rebecca Alexandria adalah pemenang kontes balet, Youth American Grand Prix tahun 2018. Melalui tarian, ia berhasil mengatasi perundungan yang ia alami dan tampil menjadi pemenang.

Rebecca mengaku telah berlatih balet sejak berusia 2,5 tahun. Ia jatuh cinta pada tarian ini setelah menonton sebuah film yang berkisah tentang ballerina. Tak seperti kebanyakan ballerina, Rebecca berasal dari keluarga yang sederhana. Ia bahkan sempat mengalami bullying karena latar belakang ekonominya.

Ia bercerita, suatu hari gurunya meminta Rebecca untuk ikut latihan bareng teman-temannya yang akan berlomba. Tapi itu berdampak pada pertemanan. Teman-teman Rebecca yang akan lomba tak mengerti, mengapa Rebecca, bukan orang berkecukupan secara ekonomi ikut latihan bersama mereka. Akibatnya ia dikucilkan, dan tak punya teman.

“Aku didiemin seharian, kadang mereka buang muka. Kalau aku panggil, mereka pura-pura tak dengar dan langsung pergi. Pernah suatu hari, salah satu teman mereka berulang tahun. Mereka foto-foto bareng, dan tak ada yang mau berfoto bareng aku. Mereka don’t care sama aku,” tutur Rebecca.

Gadis itu beruntung karena mendapat pelatih yang tak henti

memotivasinya dan selalu mengarahkan Rebecca untuk tampil sebaik-baiknya tanpa perlu memikirkan menang atau kalah. Sang guru hanya meminta Rebecca melakukan yang terbaik.

“Kamu tidak usah berpikir menang atau kalah, yang penting kamu sudah latihan. Enam bulan buat ke sini, orang tua kamu udah semangatin kamu. Kamu enggak usah mikirin menang kalah yang penting kamu do the best di panggung. Itu sudah yang terbaik,” ujar Rebecca mengulangi pesan pelatihnya.

Kalimat itu mampu memacu Rebecca untuk melakukan yang terbaik. Hasilnya, ia meraih juara.



Oki Budhi Priambodo

BBC News Indonesia

Ia memiliki pengalaman selama 18 tahun dalam jurnalisme siaran dan jurnalisme video dengan tugas mengelola berita harian, isu terkini dan program dokumenter.

Saat ini, ia bekerja sebagai jurnalis video untuk BBC World Service. Oki juga memiliki pengalaman bekerja baik sebagai reporter, jurnalis video maupun produser di beberapa media lain, yaitu: Metro TV, Global TV, Astro TV dan Kompas TV.

Karyanya pernah meraih beberapa penghargaan, salah satunya adalah “Wae Rebo Menjaga Hunian Demi Peradaban” sebagai salah satu nominasi Film Dokumenter Unggulan FFI 2012.

PERNIKAHAN ANAK DI SULAWESI: "BERIKAN IJAZAH, JANGAN BUKU NIKAH"

Dipublikasikan di BBC News Indonesia , 25 Juli 2019

Oleh **Oki Budhi Priambodo**

Lebih dari 35 keluarga di Desa Mattiro Ulung, Sulawesi Selatan menikah di usia anak. Seorang penjual sayur yang resah dengan keadaan tersebut mengampanyekan agar orang tua berpikir ulang tentang niat mereka menikahkan anak di usia yang belum cukup umur.

Indotang, sang penjual sayur dengan gigih menceritakan dampak buruk pernikahan dini pada para pelanggannya. Salah satu yang ia sampaikan adalah banyak pasangan yang menikah di usia muda ternyata tak cukup mental.

Ia sadar, apa yang ia sampaikan bertentangan dengan adat di wilayah tersebut. Di sana, banyak orang tua yang takut jika tak segera menikahkan anak mereka, maka anak tersebut akan menjadi perawan tua.

Hal paling menarik dari perempuan penjual sayur ini adalah kesadarannya soal kesehatan organ reproduksi perempuan. Sebagai ibu dari seorang anak perempuan, ia tak ingin anaknya mengalami hal buruk karena menikah di usia anak.

Indotang mengaku mendapat masukan tentang dampak buruk dari pernikahan usia anak dari LSM dan sekolah-sekolah tentang perempuan. Kini, sudah lima tahun ia berkampanye agar orang tua menghindari pernikahan usia anak.

Kampanye Indotang ternyata didengar ibu-ibu pelanggannya. Karena kegigihannya, ia pernah diganjar penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



**Dwiki Marta
Muharam**

BBC News Indonesia

Ia bekerja di BBC News Indonesia sebagai jurnalis video sejak 2017 - sekarang.

Dwiki juga pernah bekerja di beberapa media, antara lain: Detik TV dan CNN Indonesia.

Sudah beberapa penghargaan yang berhasil ia raih, yang terbaru adalah Juara 1 Karya Jurnalistik Terbaik tentang HAM yang diselenggarakan AJI-Internews-Kedubes Belanda untuk karya liputannya yang berjudul "Penyintas tragedi '65: Dituding PKI, Ditelanjangi untuk cari cap Gerwani" (2019).



**Ayomi
Amindoni**

BBC News Indonesia

Ayomi merupakan alumni Jurusan Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang berhasil lulus dengan predikat cumlaude pada tahun 2009.

Saat ini ia bekerja sebagai jurnalis yang fokus liputannya terkait dengan isu HAM, kesenian dan lingkungan di BBC News Indonesia sejak tahun 2017. Dia juga memiliki pengalaman bekerja di Media Indonesia, The Jakarta Post dan NHK Biro Jakarta.

Wanita yang memiliki kegemaran menulis dan kesenian ini pernah berpartisipasi dalam pameran fotografi "I am Me, Pameran Fotografi & Film Pendek Independen" dan "Sobekan Buku Harian".

Selain itu, ada beberapa pelatihan seni dan fotografi yang pernah ia ikuti, antara lain : "Workshop Penulisan Seni Rupa dan Budaya Visual" yang diselenggarakan oleh Ruang Rupa (2012) dan Kalvdij Sluban Photography Workshop (2017).

PERNIKAHAN ANAK DI KAMP PENGUNGSIAN PALU: ‘SAYA MASIH INGIN SEKOLAH’

Dipublikasikan di BBC News Indonesia pada 22 Juli 2019

Oleh **Dwiki Marta Muharam dan Ayomi Amindoni**

Pasca gempa dan tsunami yang melanda Palu pada 2019, warga yang terdampak banyak yang tinggal di tenda pengungsian. Rumah yang mereka tempati tak hanya rusak dan hancur akibat gempa dan tsunami, namun juga hilang karena longsor dan likuifaksi yang terjadi akibat gempa.

Di pengungsian, warga tidur berhimpitan dengan kondisi yang tidak layak. Toilet yang tersedia juga minim dan selalu antri. Kondisi pengungsian untuk satu keluarga jauh dari pantas. Situasi itu membuat anak tak nyaman dan memilih keluar rumah.

Kondisi ini menjadi berbahaya bagi anak perempuan. Sebab, banyak anak yang kehilangan orang tua sehingga mereka tak ada yang menjaga dan melindungi. Dalam situasi terdesak seperti itu, kasus perkosaan terhadap anak perempuan banyak terjadi. Pelakunya beragam. Mulai dari paman, pacar, hingga orang yang tak mereka kenal.

Banyak kisah yang muncul terkait pemerkosaan anak ini. Pemerkosaan terjadi di berbagai lokasi, mulai dari toilet umum, hingga bangunan tak bertuan di sekitar lokasi pengungsian.

Tapi, solusi yang dipilih oleh orang tua atau orang dewasa yang bertanggungjawab terhadap anak perempuan adalah solusi instan, yaitu menikahkan anak dan pemerkosanya. Atau memaksa anak menikah dengan pacarnya meski usia mereka masih di bawah umur.

Situasi itu ditunjang sikap orang tua yang menganggap punya anak perempuan adalah beban. Ketika melihat anak perempuan mereka sudah memiliki pacar, bahkan ketika tahu anaknya menjadi korban pemerkosaan, maka orang tua akan memilih untuk segera menikahkan anaknya. Pola pikir orang tua adalah ingin segera melepaskan tanggung jawab mereka. Bukan menyelesaikan melalui jalur hukum.

Dalam tayangan tersebut, pendapat anak tak didengar. Bahkan meski anak tetap ingin sekolah, namun orang tua tetap pada keputusannya.

Di sisi lain, sejumlah anak yang menjadi korban pemerkosaan atau mereka yang dinikahkan di usia sangat muda tetap memilih melanjutkan sekolah. Meski datang dengan kondisi hamil, atau sudah punya anak, gadis-gadis muda itu tetap bertekad melanjutkan mimpi dan kembali ke bangku sekolah.



Yogi Tujuliarto

CNN Indonesia TV

Ia adalah lulusan Universitas Indonesia tahun 2005 yang memiliki pengalaman bekerja sebagai jurnalis selama 13 tahun sejak tahun 2006 hingga sekarang dengan bergabung di Trans Media.

Dia pernah bekerja sebagai jurnalis di Trans 7 (2006-2013) dan saat ini bekerja di CNN Indonesia TV (2015-sekarang).

Karya liputannya pernah meraih beberapa penghargaan, salah satunya adalah karya “Konservasi Sawit Tesso Nilo” sebagai Best Shortlist Coverage dalam ICCTF Media Award 2015.

MIMPI ANAK-ANAK DI TANAH KERING

Dipublikasikan di CNN Indonesia TV, 25 Januari 2020
Oleh **Yogi Tujuliarto**

Tulisan ini dibagi dalam tiga segmen:

1. Cita-cita yang Tenggelam di Sumur Kering
2. Tetap Sekolah Tanpa Air Bersih
3. Anak Perbatasan Sulit Jangkau Air Bersih

Dusun Salala, Desa Kaguna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menjadi satu contoh betapa warga sangat menderita saat musim kemarau. Kemarau panjang yang terjadi setiap tahun menyebabkan terjadinya krisis air. Tak hanya air bersih untuk cuci dan mandi, bahkan air untuk ternak dan pertanian juga habis karena kekeringan.

Dampak kekeringan bukan hanya dirasakan oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Banyak siswa yang menolak sekolah. Sebab, guru mereka meminta agar mereka datang ke sekolah dengan mandi terlebih dulu. Padahal, tak ada air bersih yang bisa mereka akses untuk mandi. Situasi itu membuat siswa tak berani bertemu guru, akibatnya mereka tak sekolah, dan orang tua lebih meminta mereka membantu di sawah atau membantu jualan sayur.

Setiap kali musim kering, Kabupaten Belu akan berhadapan dengan kasus anak-anak yang putus sekolah. Menurut catatan Dinas Pendidikan setempat, musim kering ini tercatat 155 kasus anak putus sekolah pada tingkat pendidikan dasar, dan 197

kasus anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Perjuangan dua anak, Akina dan Akita, menjadi inspirasi kuat bagaimana keduanya mencoba bertahan dan bersiasat agar satu di antara mereka tak sampai putus sekolah dan tetap bisa berjuang mencapai cita-citanya.

Kisah Dusun Dilagusun, Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen di Kabupaten Belu, NTT lebih parah lagi. Dusun yang berlokasi di perbatasan dengan Timor Leste ini bahkan nyaris tak mendapat akses air bersih sepanjang tahun. Hujan terakhir turun pada April lalu.

Mereka menunggu tanki air datang, antre dengan jeriken hingga bak mandi bayi. Kadang juga berebut menarik selang karena takut tak kebagian mendapat kesempatan mengakses air bersih. Sayangnya, meski air terlihat bening, namun kadar kapurnya tinggi sekali. Dan sisa kandungan kapurnya akan tampak pada alat masak milik warga.

Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kekeringan membuat kehidupan seperti tak bergerak. Saat tanah mengering, pertanian pun terhenti, ekonomi masyarakat setengah mati, karenanya banyak anak yang putus sekolah.

Dan jika ada anak-anak yang bertahan di kelas untuk melanjutkan pendidikan bukan berarti mereka tanpa perjuangan, setiap pulang sekolah mereka harus bekerja demi bakti kepada orang tua.



Muhamad Sridipo

Jawapos TV

Lulusan Universitas Negeri Jakarta ini bekerja sebagai produser di Jawa Pos TV sejak tahun 2015 - sekarang.

Dipo, begitu ia akrab disapa, juga pernah bekerja sebagai reporter dan jurnalis video di Watchdoc sejak Mei 2013-Mei 2015.

Pengalaman liputannya antara lain: Liputan Alpha Zetizen di New Zealand (2016), Liputan Gempa Tsunami di Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Utara (2018) dan Liputan Piala Indonesia (2018).



Defry Novaldi

Jawapos TV

Ia bekerja sebagai jurnalis video di Jawapos TV sejak tahun 2016 - sekarang. Ia juga pernah bekerja di Harian Umum Republika, Pro-Goal.co.id, Detaktangsel.com dan Kompas.

Defry adalah lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta



Wahyu Santiko

Jawapos TV

Jurnalis Foto yang pernah bekerja di Kompas TV (2014-2018) dan Jawapos TV (2018- sekarang). Wahyu, selain memiliki keahlian dalam editing video dan pengoperasian kamera juga memiliki keahlian menyelam dan menyelam skuba, Ia merupakan alumni AKINDO Yogyakarta jurusan Broadcasting TV.

IRONI KONTROVERSI IMUNISASI

Tayang di Jawa Pos TV, 19 Februari 2020

Oleh **Muhammad Sridipo, Defry Novaldi, Wahyu Santiko**

Vaksin, adalah sebuah inovasi penting dalam dunia kesehatan. Melalui vaksin, beragam penyakit yang menular dan berbahaya dapat dicegah. Tapi ternyata tak semua orang yakin dan percaya bahwa vaksin bisa menjadi salah satu cara untuk bertahan hidup dan meningkatkan kualitas kesehatan.

Hasil riset kesehatan dasar (Diskesdas) Kementerian Kesehatan, terjadi penurunan pemberian imunisasi dasar lengkap untuk bayi. Hal itu berpotensi anak-anak menjadi rentan tertular penyakit. Sebab, bayi dan anak-anak yang tidak diberi imunisasi, tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang kuat. Anak yang diberi vaksin, akan lebih kuat menghadapi serangan penyakit dibanding anak yang tak diberi vaksin.

Tapi di negeri ini, pemberian vaksin menghadapi sejumlah tentangan. Beragam alasan diajukan untuk menolak pemberian vaksin pada bayi dan anak-anak. Banyak yang yakin, vaksin tak baik untuk tubuh dengan merujuk pada beberapa kejadian yang dialami anak setelah imunisasi. Isu lainnya adalah soal kandungan vaksin yang disebut tidak halal sehingga diharamkan masuk tubuh.

Padahal pemberian vaksin pada anak wajib dilakukan sebagai salah satu pemenuhan hak kesehatan anak. Pemenuhan hak

kesehatan anak ini bahkan diatur dalam undang-undang. Anak harus mendapat hak sehat dengan pemberian vaksin yang wajib diberikan secara berkala.

Kategori Radio

Juri Kategori Radio

Heyder Affan

BBC Indonesia

Mendapat kepercayaan menjadi juri lomba karya jurnalistik radio tahun ini, saya semula pesimis: kategori ini bakal sepi diminati peserta – seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun anggapan saya itu keliru.

Agus Sunarto

VOA Indonesia

Problem kesejahteraan anak di Indonesia masih menjadi PR bagi bangsa ini. Banyak diantara kita luput perhatian akan nasib anak-anak yang karena situasi tertentu harus menghadapi ketidakberuntungan dalam mendapatkan hak haknya secara memadai, seperti dalam pendidikan, perlindungan hukum dan hak mendapatkan kesehatan baik fisik maupun mental. Media diharapkan menjadi pendorong dengan fungsinya sebagai kontrol sosial dengan menyampaikan informasi apa yang terjadi dengan anak anak ditengah masyarakat dengan sebenar benarnya. Agar masyarakat dan para pengambil kebijakan publik lebih peduli dan berpihak kepada anak anak dalam segala hal dan juga menemukan langkah solusi yang tepat.

Beberapa karya jurnalistik radio dalam lomba ini berhasil merefleksikan kondisi tersebut dengan baik dan memberikan fakta dan informasi dengan baik pula sehingga mampu mencerahkan dan membangkitkan rasa empati pendengarnya hingga menyadarkan bahwa ini adalah pekerjaan rumah kita semua.

Berharap lomba karya jurnalistik ini terus berlanjut, agar media

dan para jurnalis terdorong untuk terus menyampaikan informasi tentang kondisi anak-anak Indonesia agar mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Karena masa depan mereka sesungguhnya adalah masa depan bangsa kita.

Kenny Peetosutan

UNICEF

Selamat untuk terpilihnya karya jurnalistik radio “Imunisasi Measles Rubella, Upaya Melindungi Generasi Bangsa” dari I Radio FM dalam kriteria “special mention”. Ulasannya – yang dikombinasikan dengan teknik penyampaian yang baik – menggambarkan dampak yang sangat berat pada masa depan anak bangsa dengan pas, menggugah dan mengedukasi pendengarnya, serta sesuai dengan strategi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah untuk menghapus penyakit Campak – Rubella dari muka bumi Indonesia.

Bahaya penyakit Rubella pada anak yang lahir dari ibu yang menderita Rubella saat hamil muda digambarkan secara lugas dimana anak menderita gangguan perkembangan multipel pada otak, mata, telinga dan jantungnya yang dikenal dengan Sindroma Rubella Kongenital sehingga anak akan menderita cacat bawaan seumur hidup dan membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan yang sangat tinggi.

Tidak seperti penyakit Corona Virus-19 yang sekarang sedang mewabah dan belum ada vaksinnnya, penyakit Rubella bisa dicegah bahkan dibasmi dari muka bumi dengan imunisasi Rubella. Karya jurnalistik radio ini mengajak para orang tua untuk menyadari pentingnya imunisasi Rubella mengingat dampaknya yang sangat berat bagi si anak yang menderitanya, dampak finansial dan sosial bagi keluarga & pemerintah.

Laban Abraham Laisila

AJI Indonesia

“Sudah dua kali saya diminta menjadi juri dalam kompetisi karya jurnalistik kolaborasi AJI-Unicef. Pada kompetisi kali ini, karya yang ikut serta semakin menunjukkan kualitasnya berkaitan ragam isu anak Indonesia.

Dari tema imunisasi sampai anak-anak korban pengaruh terorisme yang sangat personal bisa menjadi perhatian dan tak luput menjadi garapan yang genuine, serta berdampak pada semua orang yang melihat, mendengar, plus membacanya.

Ini adalah bukti kalau isu anak adalah isu yang tak lekang waktu. Selamat kepada para pemenang dan bravo kepada semua nominator”.



Ardi

RRI Merauke

Saat ini, Ardi bekerja sebagai reporter di LPP-RRI Merauke. Pengalaman liputanya antara lain: menjadi reporter Haji 2017 di Mekkah, Arab Saudi dan Border Liaison Officers Meeting Indonesia - PNG.

Ia juga pernah meraih beberapa penghargaan, yang terbaru adalah lomba karya jurnalistik Piala Presiden (2019).

RAYUAN MAUT LEM AIBON

Dipublikasikan di LPP RRI Merauke pada 15 Februari 2020

Oleh **Ardi**

Populasi anak pecandu lem aibon yang sering di sebut anak aibon setiap tahun terus mengalami peningkatan di Kabupaten Merauke, Papua. Jumlah jalanan yang akhirnya menjadi pecandu aibon di perkirakan mencapai ratusan anak.

Mereka bekerja di sektor informal sebagai tukang parkir dan lain lain. Anak-anak ini juga berkelompok yang tersebar di sejumlah emperan toko.

Anak aibon yang sebagian besar merupakan anak usia sekolah seharusnya mengenyam pendidikan dan mendapat pelayanan kesehatan layaknya anak lainnya guna menuju generasi emas Indonesia pada tahun 2045.

Namun kenyataannya anak aibon ibarat jamur yang tumbuh makin tak terkendali dan belum ada penanganan serius. Anak-anak ini menggunakan penghasilannya untuk makan dan membeli lem. Cara mereka membeli lem adalah dengan mengumpulkan uang bareng-bareng. Lalu lem tersebut dibagi-bagi.

Mereka menikmati lem tanpa pikir panjang apa dampak lem tersebut pada diri mereka.

Padahal dampaknya sangat berbahaya pada kesehatan mereka. Lem tersebut bisa merusak sistem pernafasan, juga merusak otak dan organ-organ lainnya. Psikologi anak-anak tersebut juga bisa terganggu.

Anak-anak pecandu lem aibon ini biasanya anak-anak yang tumbuh dengan perhatian yang minim dari orang tua. Sebagian mengaku masih punya orang tua, tapi kurang kasih sayang dan perhatian.

Jika tak diseriusi penanganannya, jumlah anak aibon bisa terus mengalami peningkatan. Ini seakan menjadi momok yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan anak Papua. Peran pemerintah dan orang tua dinilai sangat penting untuk membimbing dan membina mereka.

Pemerintah Papua harus segera menemukan formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan semakin banyaknya anak-anak aibon di Merauke. Dan orang tua wajib memberikan perhatian maksimal atas perkembangan anak-anaknya.



Achmad Aulia
Smart FM Palembang

Saat ini, ia bekerja sebagai program director di Radio Smart FM Palembang.

Dia pernah meraih beberapa penghargaan, salah satunya dalam ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina (2019).

HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK DENGAN HIV AIDS

Dipublikasikan di Smart FM Palembang, 23 Februari 2020

Oleh **Achmad Aulia**

Kisah Dedek, seorang balita berusia lima tahun yang positif HIV Aids memperlihatkan layanan kesehatan yang layak diterima oleh anak dengan HIV Aids.

Ia ditemukan setahun lalu dengan kondisi sangat memprihatinkan. Kedua orang tuanya sudah meninggal karena HIV Aids. Dedek nyaris tak bisa diselamatkan karena penyakit penyertanya.

Namun perawatan yang intensif di rumah sakit membuat anak kecil itu berhasil pulih dari berbagai penyakit. Meski demikian, dedek masih memiliki masalah dengan gangguan tumbuh kembangnya. Walaupun sudah berusia lima tahun, ia masih terlihat seperti bocah berusia tiga tahun.

Jalan panjang dan berliku dialami dedek untuk sehat dari mulai ditemukan hingga dirawat. Banyak pihak yang terlibat untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dedek, mulai dari relawan, pemerintah, rumah sakit, tim dokter dan masyarakat.

Sari Palupi relawan Sriwijaya Plus, sebuah yayasan yang bergerak untuk orang-orang dengan B20 (HIV Aids) mengatakan/ saat ditemukan dedek dalam kondisi yang memprihatinkan dan perlakuan yang kurang baik dari kedua orang tuanya. Namun kini kondisinya mulai pulih.

Selain relawan pemerintah juga ambil bagian dalam perawatan dedek. Irma Tiara Riski, pengelola Program HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan, pemerintah memiliki program seperti kasus yang dialami Dedek.

Selama dirawat, Dedek juga selalu dipantau Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sehingga keperluan Dedek dapat terpenuhi. Pemerintah juga menyediakan terapi kejiwaan jika dibutuhkan di kemudian hari. Perlahan-lahan, ia harus diberitahu tentang kondisinya sesuai tingkatan usianya.

Dedek diharapkan bisa kembali menjalani hidup seperti sedia kala. Saat ini ia masih menjalani pengobatan rutin di rumah sakit. Semoga dedek bisa tumbuh tanpa harus terbebani stigma negatif masyarakat. Sebab, stigma negatif itu juga juga yang bisa membuat penderita kehilangan semangat bertahan dan akhirnya menyerah pada penyakitnya.

Peran masyarakat dan Pemerintah sangatlah penting dalam upaya Dedek mendapatkan layanan kesehatan yang menjadikan haknya sebagai warga negara sehingga kelak Dedek bisa hidup normal seperti anak-anak Indonesia lainnya.

Setiap bulannya dedek tetap mendapatkan rawat jalan dirumah sakit dengan dokter spesialis anak//

Insert Sari Palupi

Insert Irma Tiara Riski

Insert Irma Tiara Riski

Pemerintah juga memfasilitasi terapi kejiwaan untuk Dedek dikemudian hari/

Insert Irma Tiara Riski

Suatu saat Dedek juga akan diberitahukan kondisi status B20 positifnya/ menurut psikolog Devi Delia perlahan-lahan Dedek harus diberitahu sesuai tingkatan usianya/

Insert Devi Delia



Citra Dyah Prastuti

KBR

Bekerja di Kantor Berita Radio (KBR) sejak 2002 - sekarang.
Citra menjabat sebagai Pemimpin Redaksi KBR sejak November 2014 - sekarang.

Ia juga merupakan pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia sejak tahun 2007 - sekarang.

HIDUP USAI TEROR

Dipublikasikan di Radio KBR

Oleh **Tim KBR**

Seri ini bercerita tentang kehidupan anak-anak yang orang tuanya adalah jihadis, termasuk di antaranya adalah pelaku bom bunuh diri. Kisah ini menggali bagaimana anak-anak yang orang tuanya menyebarkan paham radikalisme diajak menjalani kehidupan tanpa kebencian dan dendam.

Dalam seri tersebut diceritakan, bagaimana anak-anak dengan orang tua yang memiliki paham radikalisme yang tinggi ikut dijejali dengan pola pikir yang radikal, penuh kecurigaan, dan kebencian.

Berbagai atribut dan lambang negara, termasuk juga polisi dan TNI, disebut sebagai 'thogut' (setan yang disembah manusia) dan bertentangan dengan agama. Beberapa anak bahkan rutin diajak menonton tayangan kekerasan atas nama agama.

Salah satu bocah, sebut saja bernama Rambu, mengalami proses radikalisasi dari ayahnya sendiri. Pemahamannya soal bom bunuh diri tak jauh beda dengan pemahaman sang ayah.

"Ketika berjihad akan bertemu bidadari, jika masuk surga akan bertemu dengan 40 bidadari."

Berbagai gejala mental dialami anak-anak yang orang tuanya menjadi pelaku jaringan terorisme. Gendis, salah satunya. Ia tahu ayahnya mengunjungi pamannya bukan sekadar silaturahmi

biasa, tapi untuk merakit bom. Tapi, bom itu meledak sebelum digunakan. Paman dan beberapa anggota keluarga lain tewas. Ayahnya lalu menjadi buronan, dan akhirnya mati ditembak polisi.

Gendis lalu dirawat dinas sosial. Sebulan dalam masa perawatan ia mengalami halusinasi. Merasa selalu didatangi keluarganya yang tewas dan diminta melanjutkan perjuangan sebagai jihadis.

Anak-anak itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi, melepaskan trauma secara perlahan dan mengikis pemikiran radikal yang terlanjur melekat dalam benak mereka sebagai pola didik dari orang tuanya.

Tak mudah, tapi perlahan mereka berbaur dengan rekan sebaya, membangun mimpi dan cita-cita baru dan berjuang agar lepas dari stigma dan label sebagai anak teroris.



Petrus Riski

VOA Indonesia

Ia adalah jurnalis di media Voice of America (VOA) - Indonesia sejak 2009.

Selain itu, Petrus pernah bekerja antara lain di Radio Sonora FM, KBR 68H, Mongabay Indonesia, Majalah Artha Praja, Super Radio 107,1 FM Surabaya.

Ia adalah lulusan Pasca Sarjana Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

MENGUBAH TRADISI KAWIN ANAK DI LOMBOK

Dipublikasikan di VOA pada 30 Oktober 2019

Oleh **Petrus Riski**

Di tengah kemajuan teknologi dan kebudayaan global, tradisi pernikahan anak masih dipertahankan di sejumlah desa dan kampung adat di Indonesia. Salah satunya Dusun Sasak Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Hal itu menjadi tantangan dalam memerangi dampak negatif kawin anak.

Dusun Sasak Sade, salah satu desa tradisional di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih mempertahankan banyak tradisi warisan nenek moyang, seperti menenun untuk kaum perempuan, dan mengepel lantai rumah menggunakan kotoran kerbau atau Belulut.

Tidak hanya itu, Dusun Sasak Sade juga masih mempraktikkan tradisi kawin culik atau kawin lari, untuk anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Tradisi itu sudah ada sejak 1097 masehi.

Thalim (26), seorang warga Kampung Sasak Sade menuturkan, tradisi kawin culik berlaku untuk anak perempuan di dusun itu yang telah masuki masa akil balig, atau ketika menginjak jenjang sekolah menengah pertama (SMP). Biasanya, mereka diculik oleh kerabat terdekat untuk dinikahi.

“Kalau kita mengambil orang luar, agak jauh dari garis keturunan itu harus dengan cara kawin lari atas dasar suka sama suka. Tidak ada unsur paksaan. Kalau perempuannya tidak suka atau misalnya agak jauh garis keturunan, tidak boleh dipaksa. Kalau (kerabat) dekat harus mau,” kata Thalim.

Akibat tradisi kawin anak itu, banyak perempuan di Dusun Sasak Sade berpendidikan rendah. Rata rata anak perempuan di dusun Sade menikah pada usia 14 atau 15 tahun dengan cara kawin culik atau kawin lari, papar Thalim. Alasannya, perempuan akan dicap perawan tua oleh para kerabat bila belum menikah pada usia 20 tahun.

Thalim mengatakan, perempuan yang telah menikah akan kembali ke rumah dan menjadi ibu rumah tangga, meski sebelumnya ia bersekolah atau bekerja sebagai pegawai di luar kampungnya.

“Itu cowok paling maksimal 25. Tapi khusus untuk perempuan di sini, sekali pun sekolahnya tinggi, susah untuk jadi pegawai. Karena perempuan di sini sekalipun sudah kerja, kemudian menikah tidak boleh dilanjutkan kerjanya itu, harus tetap tempatnya di dapur,” ujar Thalim.

Meski banyak perkawinan usia muda di kampung Sasak Sade, Thalim mengaku anak perempuan yang menikah dini tidak mengalami masalah kesehatan reproduksi. Thalim atau biasa disapa Amak Eva atau bapak dari Eva (nama anak pertamanya), mengaku saat menikah dia berusia 17 tahun, sedangkan istrinya masih berusia 14 tahun.

Seperti tradisi di Dusun Sasak Sade, Thalim juga menikahi istrinya dengan kawin culik. “Alhamdulillah di sini tidak ada (masalah kesehatan), banyak juga yang sudah mempertanyakan. Hubungan rumah tangga saya sudah berjalan kurang lebih sembilan tahun, sudah punya anak dua,” tutur Thalim.

Menurut Pendiri dan Direktur Eksekutif Arek Lintang (Alit),

Yuliati Umrah, kawin anak masih marak di kawasan pedesaan yang minim akses pendidikan, baik dari segi kualitas maupun fasilitas. Perkawinan yang dialami anak-anak di kampung Sade, kata Yuliati Umrah, hanya melihat faktor biologis, yaitu saat anak perempuan mulai menstruasi. Tapi tidak memperhatikan kesiapan mental psikologis maupun pengetahuan anak mengenai pranata keluarga.

“Nilai-nilai yang lebih banyak berkembang itu nilai tradisi yang lama. Kita juga dulu, zaman-zaman nenek moyang juga menempatkan usia perkawinan itu setelah menstruasi, dianggap dewasa itu sama dengan balig, balig itu kemampuan biologis saja, tidak melihat pada faktor-faktor yang lain,” papar Yuliati Umrah.

Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Anis Farida mengatakan, meski budaya dan tradisi dalam masyarakat harus dijaga dan dirawat, namun budaya yang kurang baik seperti pernikahan anak harus mulai ditinggalkan.

“Dengan perkembangan zaman, seharusnya budaya yang semacam ini tidak lagi dilestarikan. Kalau mengikuti pemerintah tentang kewajiban belajar ini berarti sampai lulus SMA kan sebenarnya. Kalau perkawinan itu di bawah usia 18, itu perkawinan dini atau perkawinan anak ini tadi, ini sudah bertentangan dengan kewajiban belajar,” kata Anis Farida kepada VOA.

“Tapi sekali lagi, kultur sosial budaya atau pun tuntutan di masyarakat setempat masih seperti itu, kecuali pada masyarakat yang memang sudah berpendidikan dan ingin anaknya ini menempuh pendidikan yang baik,” imbuhnya.

Yuliati Umrah menambahkan, para pihak khususnya pemerintah harus terus mengedukasi masyarakat mengenai perkawinan yang berisiko, terutama bila seorang anak yang belum siap secara fisik dan mental karena belum cukup umur, dipaksakan untuk menikah.

Mempromosikan, ini lho fakta-fakta yang dialami ketika anak-anak sudah menikah. Ada banyak hak yang hilang, dan ada banyak risiko yang muncul. Yang paling terlihat, misalnya, kasus kematian ibu melahirkan, kematian bayi saat dilahirkan,” lanjut Yuliati.

Kasus-kasus itu terjadi, kata Yuliati, karena pada usia anak-anak, tulang panggul masih rawan hingga menyulitkan kelahiran. “Kasus bleeding atau pendarahan sangat tinggi. Angka ini yang harus terus diekspos,” tambah Yuliati.

Anis Farida menegaskan, para tokoh agama, guru, serta keluarga, memegang peranan penting dalam mencegah orang tua agar tidak menikahkan anaknya sebelum waktu dan usia yang tepat.

“Tokoh agama ya yang paling utama untuk memberikan pencerahan terkait dengan pemaknaan kapan sih usia terbaik untuk menikah,” kata Anis.

Para tokoh agama juga harus menekankan, bahwa pendidikan itu penting sehingga pernikahan bisa ditunda.

“Peran guru juga dan otomatis keluarga, supaya tidak buru-buru menikahkan anak dengan alasan ekonomi ataupun alasan agama,” tegasnya.



Imam Komarudin

RRI Boven Digoel

Imam bekerja sebagai reporter di LPP RRI Boven Digoel sejak tahun 2014 - sekarang.

Saat ini, ia masih menempuh pendidikan di Universitas Terbuka.

JANGAN BIARKAN AKU STUNTING

Dipublikasikan di LPP RRI Boven Digoel, 22 Januari 2020
Oleh **Imam Komarudin**

Stunting atau tubuh kerdil menjadi satu permasalahan serius yang menjadi sorotan nasional. Bahkan Presiden Republik Indonesia Jokowi juga tak luput menyoroiti permasalahan stunting.

Selama ini masyarakat sering beranggapan, kondisi tubuh kerdil atau stunting terjadi karena faktor keturunan. Padahal itu adalah pandangan yang salah. Stunting terjadi karena pasokan gizi yang buruk pada anak, dan itu terjadi dalam waktu yang lama.

Pengetahuan dan kesadaran yang minim di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, hingga faktor ekonomi jadi penyebab kasus kurang gizi dan gizi buruk. Orang tua sering kali tak menyadari hal tersebut dan membiarkannya terjadi dalam waktu yang lama. Hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya stunting.

Di Boven Digoel, kasus stunting masih ditemukan. Namun jumlahnya terus menerus. Tapi di masyarakat pelosok, kasus ini masih ada. Pola hidup masyarakat pelosok yang terbelang kurang sehat ditengarai menjadi salah satu penyebab berbagai persoalan kesehatan terjadi. Tapi untuk mengubah semua itu tidak mudah dan butuh proses, juga pendekatan khusus.

Puskesmas dan posyandu diaktifkan agar masyarakat sekitar mendapat layanan kesehatan yang memadai. Penyuluhan dan edukasi juga terus disampaikan agar angka stunting bisa terus diturunkan.

Faktor lain juga terus meningkatkan kesehatan dan gizi untuk ibu hamil. Sebab, kecukupan gizi saat anak masih dalam kandungan juga memberi pengaruh besar saat anak sudah lahir dan mulai tumbuh dan berkembang. Jika terjadi malnutrisi pada ibu hamil, maka akan berpengaruh besar pada anak yang dikandungnya.

...Insert PRESIDEN JOKOWI...

Bukan menjadi rahasia jika Pemerintahan dibawah komando Jokowi memberi perhatian besar pada papua/ mulai dari segi pembangunan infrastruktur hingga tingkat kesehatan masyarakatnya//

...insert Musik...

Kesempatan ini saya mengajak anda mengetahui lebih dekat bagaimana perkembangan kasus stunting di salah satu kabupaten provinsi papua yang terkenal sebagai tempat pengasingan bung hatta// Boven Digoel//

...insert suara tangis anak...

Pagi itu saya berkesempatan mengunjungi salah satu posyandu di Kota tanah merah dan berbincang bersama beberapa orang tua yang tengah memeriksakan kesehatan anaknya// Dia Mince salah satu orang tua itu// Sambil menggendong anaknya yang berusia dua bulan/ ia katakan/ selalu rutin memeriksakan anaknya di posyandu sesuai dengan jadwal kontrol yang tertera dalam buku kesehatan anak// Dari kontrol yang dilakukan/ anaknya sangat sehat dengan pertumbuhan seimbang/ baik itu berat maupun tinggi badan//

...insert MINCE...

Beberapa ibu lainnya juga mengatakan hal yang tak jauh beda/ jika pertumbuhan anaknya cukup baik/ dan jauh dari kategori stunting// Lalu/ apakah daerah ini sepenuhnya terbebas dari kasus stunting// Saya coba datangi Puskesmas Tanah Merah untuk mengetahuinya// Sayapun berkesempatan menemui Dokter Norbertha selaku kepala Puskesmas/ ini penuturanya//

...insert Dokter NORBERTA...

Dari pelayanan kesehatan yang pihaknya lakukan/ tidak dapat dipungkiri/ masih ditemui masyarakat kota tanah merah dengan kondisi stunting yang tingginya jauh dari kata normal// Menurutnya

...insert Dokter NORBERTA...

Jika Tanah merah yang merupakan kota kabupaten boven Digoel masih ditemui kasus stunting/ lalu bagaimana perkembangan kasus stunting di daerah ini secara keseluruhan//

Saya coba datangi Dinas kesehatan Boven Digoel untuk mengetahui itu// Saya pun berkesempatan bertemu Hj. SYAHIB kepala dinas kesehatan daerah ini// Ini penuturanya//

....insert Hj. SYAHIB...

Senada dengan dokter Norbertha/ Hj. Syahib pun menyatakan pendapat serupa/ dimana

....insert Hj. SYAHIB...

Dalam beberapa kasus/ setelah mendapatkan penanganan dan pulih/ gizi buruk kembali

terulang pada orang yang sama// Jika melihat pemicu gizi buruk dan stunting/ maka itu seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pihaknya/ namun berbagai komponen lainnya// Sebab jika ekonomi masyarakat terjamin otomatis dapat memenuhi asupan gizi yang baik pada anak/ dan stunting sangat kecil kemungkinan terjadi//insert Hj. SYAHIB...

FELISITA TUWOK selaku Sekretaris Dinas Ketahanan pangan Boven Digoel/ tidak menampik jika kesadaran masyarakat daerah ini/ terutama yang tinggal di wilayah pelosok dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya masih terlihat kurang// Ada beberapa program yang dilakukan pihaknya untuk intervensi itu// Ini penjelasannya// ...insert FELISITA TUWOK...

Tidak dapat dipungkiri

Diakuinya belum semua distrik dijangkau pihaknya/ namun telah berupaya Distribusi pangan/ sembako/ setelah bantuan diberikan/ melihay ada perubahan meskipun belum semuanya//

menjadi penyebab/ ditambah Lima tahun kebawah yang dilakukan intervensi/ karna dinilai mereka yang masih bisa diperbaiki kondisi tubunbnya// penyebab utama asupan gizi kurang/ mulai dari kandungan hingga bayi dan balita// Ketersediaan sumber pangan bergizi masih terbatas/ ditambah seringnya penyakit yang terjangkiti// jika melihat di boven digoel banyak terkait diare dan ispa// pola hidup bersih sehat masih permasalahan berat//

Selama ini masih diintervensi sejak ibu hamil dengam melihat

kondisi kesehatanya//

ini pun dikarakan faktor ekonomi// terkadang kembali berulang//

Posyanu menjadi program rutin/ bila ditemukan gizi buruk maupun stunting/ Ikangsung tangai/ baik mendatangi rumah p[erugas medis gizi// nantinya ada tim//

Stunting sangat dipengaruhi oleh pgizi// biasanya ada poenyakit penyerta// stuning ini sangat berkaitan erat dengan gizi buruk atau kurang// selama ini kasusnya ada namun tidak begitu signifikan//

Ada pasie gizi buruk / sudah dilakukan penanganan/ akhirnya kembali lagi// ini dikarnakan faktyor ekonomi mereka/ dan pengetahuan yanv rendah terkait pemenuhan gizi//

Kesadaran amsayrakat sudah cukup baik untuk posyandu/ namun amsih ditemukan bebrapa/ akhirnya kesehatan mereka kurang dan akhirnya diketahui// faktor keturunan atau gen tidak pengaruhi//

Imunisasi wajib dilakukan/ jika penyakit ditambah gizi buruk menjadi stunting//
Kondisi ibu yang kurang gizi. Juga diberikan tambahan maskanan// selalu intervensi./
mengingat pemenuhan gizi mulai dari kandungan// masih menemukan ibu kurang gizi//



Nurul Mahfud

RRI Batam

Nurul saat ini bekerja sebagai reporter di LPP RRI Batam. Ia pernah meraih beberapa penghargaan, salah satunya Juara I Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) MOR I pada tahun 2019.

PENYANGGA GIZI ANAK PULAU

Dipublikasikan oleh RRI Batam, 28 Februari 2020
Oleh **Nurul Mahfud dan Saryana**

Setiap anak di seluruh dunia sudah selayaknya mendapatkan hak sama dalam mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dan kelangsungan hidup, termasuk bebas dari kekurangan gizi dan stunting.

Kesadaran masyarakat di pesisir Batam untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang terbilang rendah memicu tingginya angka kurang gizi dan stunting di daerah tersebut. Di tengah keterbatasan tenaga medis dan kondisi geografis yang ekstrem, Puskesmas tetap menjalankan tugasnya sebagai penyangga gizi anak Pulau.

Kesehatan itu salah satu hak dasar anak dan itu menjadi penilaian dari pemerintah daerah untuk keberhasilan pembangunan. Sehingga ketika ada kasus anak stunting dan gizi buruk, maka akan menjadi catatan merah.

Angka prevalensi stunting di Batam pada semester pertama 2019 lebih tinggi dari angka stunting tahun 2018 di periode yang sama. Hingga triwulan ketiga 2019, Dinas Kesehatan Batam menemukan ada 1.6023 kasus stunting di kota Batam.

Kehidupan masyarakat pulau yang mata pencahariannya didominasi oleh nelayan masih jauh dari kesejahteraan. Akibatnya kerentanan kesehatan keluarga nelayan, khususnya pada anak-anak juga semakin tinggi.

Mata pencaharian sebagai nelayan kini tak seperti dulu. Banyak yang penghasilannya sangat menurun sehingga kebutuhan sehari-hari tak tercukupi dengan layak yang berakibat pada pola konsumsi. Ketika penghasilan sangat minim, maka kebutuhan makan tak bisa tercukupi dengan layak. Dampaknya kesejahteraan menjadi rendah dan ini bisa berpengaruh hingga terjadinya stunting.

Selain gizi, masalah klasik warga yang tinggal di kepulauan adalah tak adanya layanan kesehatan yang memadai. Kondisi geografis wilayah yang terdiri dari gugusan pulau berdampak pada pemusatan layanan kesehatan di satu pulau yang padat penduduk dan mudah diakses.

Di Kecamatan Bulang, Batam, contohnya. Di sana hanya ada satu puskesmas yang berada di Pulau Buluh. Dengan luas wilayah 463 km persegi dan didominasi 80 persen oleh lautan, puskesmas Bulang menaungi enam kelurahan berpenduduk 11.614 jiwa. Kondisi itu tak membuat tenaga medis di puskesmas Pulau Buluh melemah. Mereka terus mencari cara agar kesadaran masyarakat untuk menjalani pola hidup sehat terus meningkat. Salah satunya dilakukan dengan menggelar pelayanan gratis.

Petugas kesehatan berkeyakinan, ancaman penyakit stunting atau masalah gizi kronis lainnya dapat dilawan dengan memperbaiki gizi dan menjalani perilaku hidup bersih. Semangat tak pantang menyerah menjadi modal kuat petugas medis di puskesmas Bulang.



Ustad Mukorobin

RRI Purwokerto

Ia adalah alumni STAIN Purwokerto dan bekerja sebagai jurnalis di LPP RRI Purwokerto.

Pria yang lebih dikenal sebagai Robin Abdulrahman ini, pernah mengikuti beberapa pendidikan kilat/ lokakarya jurnalistik, antara lain: Pendidikan Kilat Jurnalistik Online di University of the Arts London, Inggris (2019) dan Pendidikan Kilat Jurnalistik Televisi di Lasalle College Of The Arts Singapura (2019).

JAGA POSYANDU, TEKAN STUNTING

Dipublikasikan di RRI Purwokerto, 16 Juli 2019

Oleh **Ustad Mukorobin**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menekan angka stunting yakni dengan menguatkan kelembagaan dan kapasitas kader posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga dokter gigi Hanung Wikantono mengatakan angka stunting di Purbalingga saat ini mencapai 15 ribu anak. Meski stunting masih tinggi, namun trendnya terus mengalami penurunan.

Dari data pada tahun 2013 angka stunting di Purbalingga mencapai 36,7 persen dari angka kelahiran, namun pada tahun 2019 ini, sudah turun hingga 26,4 persen.

Salah satu faktor penurunan angka stunting yakni keberhasilan Posyandu. Saat ini di Purbalingga terdapat 1.200 Posyandu di 224 Desa dan kelurahan. Seluruh posyandu itu menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang aktif memantau kesehatan anak, juga sebagai kader edukasi kesehatan.

Keutamaan posyandu dalam menekan angka stunting, karena posyandu bisa melakukan Intervensi gizi spesifik dan juga intervensi gizi sensitif berupa ketersediaan air bersih, sanitasi, ketahanan pangan, juga pemberdayaan perempuan.

Menurunkan angka stunting sangat penting. Sebab, stunting

akan memberikan masalah di kemudian hari, yakni menyebabkan penyakit akibat tumbuh kembang organ yang tidak sesuai. Kecerdasaan yang dibawah rata- rata, dan produktivitas kerja atau kesempatan kerja penderita stunting lebih rendah.

Perjuangan mengurangi stunting harus terus digeliatkan. Posyandu sudah membuktikan mampu menekan angka stunting di Purbalingga.



Eko Susanto

I Radio FM Jakarta

Ia adalah lulusan Universitas Diponegoro tahun 2006. Eko mengawali karir sebagai news reporter di iRadio Jakarta pada tahun 2007 - 2011. Saat ini, ia bekerja sebagai news producer iRadio Jakarta sejak 2011.

IMUNISASI MEASLES RUBELLA, UPAYA MELINDUNGI GENERASI BANGSA

Dipublikasikan di I Radio FM pada 29 September 2018

Oleh **Eko Susanto**

Rubella atau campak Jerman adalah penyakit menular dan terjadi akibat infeksi virus. Gejalanya ditandai dengan munculnya ruam merah berbentuk bintik-bintik pada kulit.

Pada anak-anak, rubella bisa menjadi penyakit yang bisa dikendalikan. Tapi jika menulari ibu hamil, terutama di tiga bulan pertama dampaknya bisa menyebabkan keguguran, atau kecacatan seumur hidup pada bayi yang dilahirkan. Bayi bisa lahir dengan ketulian, kebutaan, gangguan otak, jantung, paru-paru dan kelambatan pertumbuhan.

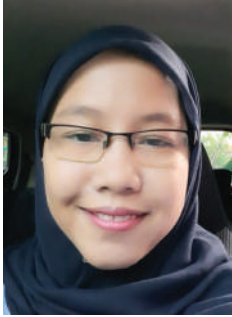
Kementerian Kesehatan mencatat, jumlah kasus campak dan rubella pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2018 telah terjadi sebanyak 57.056 kasus. Angka tersebut terbagi menjadi 8.964 positif campak dan 5.737 positif rubella. Baik campak maupun rubella, rata-rata diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek menganjurkan masyarakat mengikuti vaksin imunisasi campak Measles Rubella atau MR dengan sasaran imunisasi anak usia 9 bulan sampai dengan di bawah 15 tahun.

Tahun 2018, Kemenkes menargetkan pencapaian program imunisasi MR untuk 70 juta anak menjadi 85 persen, dari target awal 95 persen. Tapi hanya satu provinsi yang dapat mencapai target yakni Papua Barat. Sementara, beberapa provinsi diantaranya Aceh, Riau, dan Sumatera Barat capaian imunisasinya masih berada di bawah rata rata nasional.

Dalam Rencana Aksi Vaksin Dunia 2020, campak dan rubella ditargetkan untuk dapat dieliminasi di lima regional WHO, termasuk Indonesia. Imunisasi dipercaya menjadi satu-satunya cara paling efektif dan murah untuk menekan penyakit menular dan berbahaya seperti campak dan rubella.

Supaya anak Indonesia bebas dari campak dan rubella dan dan tak jadi beban keluarga di masa depan, maka negara wajib hadir untuk melindungi generasi penerus bangsa dari ancaman penyakit berbahaya, termasuk campak dan rubella.



Anik Hasanah

RRI Surabaya

Ia mengawali karir sebagai asisten penyiar di Radio Suzanna Surabaya pada 2007-2008. Sejak 2008 hingga sekarang, ia bekerja di Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya.

DERITA MEILANI LAWAN GIZI BURUK

Dipublikasikan oleh Pro 1 RRI Surabaya, 27 Februari 2020
Oleh **Budi Suwarno, Suharjo, dan Anik Hasanah**

Meilani Alfira Damayanti, seorang gadis kecil berusia 2 tahun 8 bulan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo, Surabaya. Ia datang dalam kondisi berat badan hanya 4 kilogram.

Gadis kecil asal Desa Latukan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan itu diduga mengalami gizi buruk akut. Berat badannya jauh dari berat badan anak seusianya. Sebelumnya, Meilani menjalani perawatan di RSUD dokter Soegiri, Lamongan. Tapi RSUD Lamongan tak mampu menangani lebih lanjut lagi. Meilani lalu dirujuk ke RSUD Surabaya.

Dua hari mendapat perawatan intensif di RSUD Surabaya, Meilani akhirnya tak mampu bertahan. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut pada 18 Januari 2020.

Menurut dokter Vitria Dewi, selaku Kepala Bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, rata rata kasus ini ditemukan dalam kondisi sudah terlambat, karena orang tuanya tidak secara rutin membawa ke posyandu.

Dwi Novita, ibu Meilani, mengatakan telah berusaha mengobati anaknya dengan berbagai cara. Mulai dari pengobatan umum, hingga pengobatan alternatif. Tapi Meilani tak juga sembuh.

Pihak RSUD Surabaya memastikan, Meilani mengalami Marasmus atau kekurangan gizi kronis

Meilani hanya satu diantara ribuan balita yang tercatat mengalami gizi buruk di Jawa Timur Sepanjang tahun 2019 sampai awal 2020, ada 4.835 balita di Jawa Timur mengalami kasus gizi buruk. Meskipun angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 lalu, yang berjumlah 5.326 kasus.



Elvidayanty
KBR

Ia adalah alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jambi yang bekerja sebagai kontributor KBR sejak tahun 2004.

Selain menjadi kontributor KBR, ia dipercaya KKI Warsi untuk membantu mengelola Radio Benor FM sejak akhir tahun 2013 hingga Februari 2018.

Menjadi mentor untuk program jurnalis warga Suku Rimba tahun 2017 - 2018.

Lewat Feature Radio “Beteguh, Teguh Mengajar Anak Rimba”, pernah menjadi nominator penghargaan liputan terbaik tentang anak AJI-UNICEF kategori radio, tahun 2015.



Khairil Anwar
KBR

Ia bekerja sebagai penyiar dan pengelola Radio Benor FM, radio komunitas Orang Rimba yang berlokasi di pinggir Taman Nasional Bukit Duabelas, Jambi.

POSYANDU UNTUK MASA DEPAN ANAK RIMBA

Dipublikasikan di KBR.id pada 29 Januari 2020

Oleh **Elvidayanti dan Khairil Anwar**

Penyakit menular dan berbahaya begitu mudah diderita dan menyerang balita dan anak-anak Rimba di Kawasan Taman Nasional Bukit XII Jambi. Kurangnya kesadaran tentang pentingnya posyandu membuat angka kesehatan balita dan anak Rimba tak juga membaik.

Kelompok anak Rimba masih enggan membawa anak-anak mereka ke posyandu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Akibatnya, banyak penyakit yang seharusnya bisa dicegah sejak awal akhirnya diderita anak-anak tersebut.

Anemia adalah penyakit yang paling banyak dijumpai pada balita dan anak-anak Rimba. Kepala Puskesmas Pematang Kabau, Kabupaten Sarolangun Jambi, Hartarti Sandora mengatakan belum ada kesadaran dari masyarakat Rimba soal pentingnya imunisasi dan vaksin.

“Belum ada kesadaran masyarakat Orang Rimba untuk menimbang atau imunisasi anak untuk datang ke posyandu di wilayah kerja kami, yaitu yang pertama di pasar dan kedua di Air Panas. Jadi, kita tidak bisa memantau secara maksimal yang balita dari mulai dia lahir sampai umur 5 tahun”, kata Hartati.

Tahun ini, puskesmas Pematang Kabau bekerjasama dengan KKI Warsi, berencana membangun posyandu di pinggir hutan.

Beberapa Orang Rimba juga akan dipilih dan dilatih menjadi kader posyandu. Tujuan merekrut orang Rimba adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi Orang Rimba.

AJI berharap kompetisi ini bisa mendorong jurnalis untuk memiliki kepedulian lebih besar soal tema anak. Dan karya yang menang kompetisi ini, yang dibukukan dan kini di tangan Anda ini, diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi jurnalis lain untuk membuat liputan serupa atau mengangkat topik-topik menarik lain soal anak.

Abdul Manan, Ketua Umum AJI Indonesia

Jurnalisme berjalan beriringan dengan kebenaran. Kebenaran adalah dasar untuk meraih kepercayaan. Dan kembali mengutip Chairil Anwar, kepercayaan harus diperjuangkan. Kami berharap karya-karya terpilih dari Media Awards 2020 dapat menjadi referensi bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi penyemangat bagi rekan-rekan wartawan untuk selalu mengangkat topik-topik pemberitaan tentang anak di media dengan menjunjung prinsip dan etika jurnalistik, untuk setiap anak.

Tim Juri, UNICEF Indonesia



unicef 
untuk setiap anak

